

PEREMPUAN MANDIRI,

PEREMPUAN MEMIMPIN



**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENGURUS NASIONAL KOALISI PEREMPUAN INDONESIA
PERIODE 2014-2019**

PEREMPUAN MANDIRI,

PEREMPUAN MEMIMPIN



**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENGURUS NASIONAL KOALISI PEREMPUAN INDONESIA
PERIODE 2014-2019**

PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa kita panjatkan, atas rahmat dan bimbinganNya selama lima tahun ini, sehingga Pengurus Nasional dapat melaksanakan baktinya sampai padaakhirnya masa Bakti Kepengurusan Nasional Periode 2014-2019.

Kongres Nasional IV Koalisi Perempuan Indonesia yang diselenggarakan di Yogyakarta, dengan Tema “Perempuan Mandiri, Perempuan Memimpin” merupakan awal masa bakti Pengurus Nasional 2014-2019.

Dari hasil sidang Kelompok Kepentingan dan Sidang-Sidang Komisi telah dihasilkan Mandat organisasi yang harus dilaksanakan oleh Pengurus Nasional Koalisi Perempuan Indonesia, Periode 2014-2019. Kini, masa bakti Pengurus Nasional periode 2014-2019 telah berakhir. Dalam forum pengambilan keputusan organisasi yang tertinggi ini, yaitu Kongres Nasional V Koalisi Perempuan Indonesia, menyampaikan laporan pertanggungjawabannya atas pelaksanaan mandat organisasi selama 5 tahun masa bakti kami.

Berbagai rintangan kami hadapi, dan berbagai dukungan kami terima, dalam menjalankan mandat organisasi. Situasi eksternal dan situasi internal bertautan menjadi faktor pendorong atau pun faktor penghambat.

Program-program yang diselenggarakan oleh Koalisi Perempuan Indonesia, seluruhnya ditujukan untuk melaksanakan mandat organisasi. Tentu saja, program tersebut tidak hanya dilaksanakan oleh Sekretariat Nasional. Melainkan juga dilaksanakan oleh Wilayah, Cabang hingga Balai Perempuan. Namun demikian, tidak semua wilayah, cabang dan Balai Perempuan memperoleh dukungan program, karena faktor kesiapan pengurus dan faktor area program donor yang diperbolehkan oleh pemerintah. Hasilnya, sebagian besar dari mandat yang kami terima, dapat mencapai keberhasilan. Sebagian yang lain masih dalam proses untuk mencapai keberhasilan, dan sebagian lainnya lagi masih belum menunjukkan titik terang.

Dalam kurun waktu lima tahun ini, cukup banyak kemajuan organisasi yang dapat dicapai. Kemajuan di tingkat organisasi ini, pada gilirannya juga memberikan dampak positif terhadap kinerja organisasi. Sedangkan peningkatan kinerja organisasi, berdampak pada kerja-kerja dan upaya-upaya perbaikan kebijakan public, yang berdampak luas, bagi seluruh masyarakat Indonesia, bagi perempuan maupun laki-laki, khususnya bagi mereka yang lemah dan berkebutuhan khusus.

Capaian kemajuan dan keberhasilan menjalankan mandat ini, terjadi karena adanya kerjasama antara Pengurus Nasional dengan Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang dan pengurus Balai Perempuan Koalisi Perempuan Indonesia, di seluruh Wilayah Indonesia

Selain kerjasama antar pengurus di berbagai tingkatan, kemajuan organisasi Koalisi Perempuan Indonesia dan perubahan di tingkat masyarakat ini dapat terwujud, berkat kerjasama dan kerja keras anggota, kader, Community Organizer (CO) atau penggerak komunitas, fasilitator dan staff sekretariat Koalisi Perempuan di sekretariat nasional maupun di tingkat wilayah.

Selain itu, Keberhasilan Koalisi Perempuan Indonesia, tidak terlepas dari dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak, antara lain: Pemerintah dan parlemen di tingkat pusat maupun daerah, lembaga-lembaga independen Negara, jejaring organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, media dan berbagai lembaga/ individu, penyandang dana (donor) baik di tingkat daerah, nasional, maupun, internasional.

Berbagai rintangan dan tantangan dari luar organisasi (eksternal) maupun di dalam organisasi (internal). Sebagian besar rintangan tersebut berhasil dilewati karena adanya kerjasama antara pengurus, kader dan anggota. Namun, sebagian lagi dari rintangan dan tantangan masih sangat berat dilalui, dan membutuhkan kerja lebih keras pada periode kepengurusan yang akan datang.

Laporan Pertanggungjawaban ini mencakup gambaran situasi eksternal dan internal, strategi, capaian

dan keberhasilan serta hal-hal yang belum berhasil dicapai. Disamping itu, Laporan PertanggungJawaban ini juga menyajikan analisis trend lima tahun kedepan, sebagai masukan bagi Kepengurusan di tingkat Nasional untuk periode lima tahun yang akan datang (2020-2024)

Dalam kesempatan ini, Pengurus Nasional Periode 2014-2019 menyampaikan terima kasih kepada seluruh pengurus Wilayah, Pengurus Cabang dan Pengurus Balai Perempuan, atas kerjasamanya dalam membangun organisasi dan melakukan perubahan bagi masyarakat. Terima kasih tak terhingga juga disampaikan Kader yang bekerja keras memajukan perempuan melalui berbagai kegiatan pengorganisasian, fasilitasi pendidikan kader dan menduduki posisi strategis kepemimpinan pada lembaga public. Terima kasih juga disampaikan kepada anggota, terutama anggota-anggota yang aktif membayar iuran dan aktif berkegiatan.

Terima kasih tak terhingga juga disampaikan kepada seluruh staff Sekretariat Nasional Koalisi Perempuan Indonesia yang telah bekerja keras mendukung pelaksanaan mandate kepengurusan Periode 2014-2019.

Pengurus Nasional Koalisi Perempuan Indonesia Periode 2014-2019, juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah dan parlemen di tingkat pusat dan daerah, yang telah membuka ruang dialog bagi koalisi Perempuan untuk berpartisipasi dalam proses perumusan, pembahasan dan pengambilan kebijakan publik, sehingga Koalisi Perempuan Indonesia dapat menjalankan perannya dalam mendorong lahirnya kebijakan, program dana lokasi anggaran yang berpihak pada kelompok miskin dan terpinggir, berorientasi pada pemenuhan Hak Asasi Manusia serta mewujudkan kesetaraan dan keadilan bagi semua warga Negara Indonesia

Kami juga menyampaikan terima kasih kepada semua rekan-rekan jejaring kerja masyarakat sipil, media, dan perguruan tinggi, baik di tingkat nasional maupun daerah yang telah membuka diri dan bersama-sama membangun gerakan untuk perubahan kearah Indonesia yang lebih baik. Terima kasih juga disampaikan kepada Jejaring Organisasi Internasional, perwakilan Negara sahabat.

Terima kasih juga disampaikan pada lembaga penyandang dana beserta Programnya: Akuntabilitas Sosial dan Partisipasi Kelompok Rentan dalam Pembangunan Desa (KOMPAK), Akses terhadap Keadilan (World Justice Project) Creating Space (Oxfam Canada), CSO-LA-SDG (EU melalui Oxfam), Akses Perempuan Terhadap Energi Bersih Terbarukan (EBT) (Hivos), Gender & Anti Corruption (UNODC), Gender Justice (Oxfam Aus), IKAT –Power, Peningkatan Keterwakilan Politik Perempuan (USAID-melalui Kemitraan), Kemakmuran Hijau (MCAI), MAMPU Perlindungan Sosial-Kerja Sama Pemerintah Australia-Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (DFAT melalui Cowater), Pembangunan dan Perdamaian (Development and Peace), Pemberdayaan Perempuan Pedesaan (The Asia Foundation)

Pengurus Nasional Koalisi Perempuan Indonesia Periode 2014-2019, menyampaikan permohonan maaf atas berbagai kesalahan, kekeliruan dan ketidaksempurnaan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab selama ini

Jakarta, 22 Februari 2020

Pengurus Nasional Koalisi Perempuan Indonesia
Periode 2014-2020

DAFTAR ISI

3	PENGANTAR
6	KOALISI PEREMPUAN DALAM ANGKA
9	BAB I. ANALISIS SITUASI
	BAB II. LAPORAN PRESIDUM NASIONAL
19	Tugas, Tangung Jawab dan Kewenangan
20	Pelaksanaan dan Capaian Tugas, Tanggung Jawab dan Kewenangan
	BAB III LAPORAN SEKRETARIS JENDERAL
25	Tugas, Tangung Jawab dan Kewenangan
26	Pelaksanaan dan Capaian Tugas, Tanggung Jawab dan Kewenangan
	BAB IV PELAKSANAAN DAN CAPAIAN MANDAT KONGRESNASIONAL IV
29	Mandat Kongres Nasional IV
33	Pelaksanaan Mandat Kongres Nasional IV dan Capaian Keuangan
	BAB V REFLEKSI, PREDIKSI 5 TAHUN KE DEPAN DAN REKOMENDASI
49	Refleksi
50	Prediksi 5 Tahun Ke Depan
51	Rekomendasi



KOALISI PEREMPUAN DALAM ANGKA

ANGKA

8

**RUU
ADVOKASI**

5

**RUU ADOPSI
USULAN KPI**

3

**RUU DALAM
PROLEGNAS**

4

**UJI MATERI
DAN SIDANG MK**

132

BP PIPA

PENJELASAN

- RUU Pelindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Budidaya Ikan dan Petambak Garam
- RUU Penyandang Disabilitas
- RUU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
- RUU Perlindungan Sosial
- RUU Kebidanan
- RUU Perubahan UU Perkawinan
- RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS)
- RKUHP

Sebanyak 5 RUU telah mengadopsi usulan Koalisi Perempuan Indonesia

- RUU Pelindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Budidaya Ikan dan Petambak Garam
- RUU Penyandang Disabilitas
- RUU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
- RUU Kebidanan
- RUU Perubahan UU Perkawinan

- RUU PKS
 - RKUHP
 - RUU Perlindungan dan Bantuan Sosial
- Menjadi prioritas Prolegnas 2020**

Sidang Uji Materi UU di MK

- Uji Materi UU Perkawinan oleh KPI dalam Koalisi 18+
- Uji Materi UU Perkawinan oleh Kader KPI Korban Perkawinan Anak
- Pihak Terkait dalam Uji Materi KUHP
- Uji materi UU Pilkada bersama Perludem

Terbentuk 132 BP PIPA di 132 Desa

ANGKA

30
Rb
**LEBIH ORANG
TERLAYANI**

PENJELASAN

Lebih dari 30.000 masyarakat di sekitar BP PIPA terlayani oleh BP PIPA

32
**KADER JADI
DPRD**

**32 kader Koalisi
Perempuan Indonesia
menjadi anggota KPI**

9
**KADER MENJADI
KOMISIONER
PENYELENGGARA
PEMILU PROVINSI**

Sebanyak 9 Kader
Koalisi Perempuan
Indonesia menjadi
Komisioner KPU
dan Bawaslu di
tingkat Provinsi

4
**ISU BARU
DIKELOLA
ORGANISASI**

Ada 4 isu baru dikelola Koalisi Perempuan Indonesia:

- Pertanian Ramah Lingkungan dan Pengurangan Kemiskinan
- Akses Perempuan Terhadap Energi Bersih Terbarukan (EBT)
- SDG (sustainable Development Goals)
- Pencegahan Ekstremisme dan Pengembangan Budaya Damai

9
**INOVASI
DILANJUTKAN**

Ada 9 inovasi periode 2009-2014 dilanjutkan, yaitu:

- Penyelenggaraan Media Award ,
- Pendidikan Kader berbasis Kelompok Kepentingan,
- Riset Aksi,
- Advokasi berbasis Bukti (hasil riset Aksi) ,
- Balai Perempuan sebagai Pusat Gerakan Perempuan,
- Perlindungan Sosial untuk Semua,
- Peringatan Hari Internasional Perempuan Pedesaan,
- Laporan Universal Periodic review
- Laporan CEDAW

4
**REPLIKASI BP
PIPA JKN**

Replikasi BP PIPA JKN, yaitu:

- BP PIPA Pertanian Ramah Lingkungan
- BP PIPA Energi Bersih Terbarukan (EBT)
- BP PIPA Pencegahan Perkawinan Anak (PPA)
- BP PIPA Pemilu

ANGKA**PENJELASAN**

9.443
PERTAMBAHAN
ANGGOTA KPI

Pertambahan Jumlah
Anggota Koalisi
Perempuan Indonesia
selama 2015-2019

201
PENAMBAHAN BP

Balai Perempuan
Koalisi Perempuan
Indonesia
bertambah sebanyak
201 BP selama
2015-2019

82
PENAMBAHAN
CABANG

Cabang Koalisi Perempuan
Indonesia bertambah
sebanyak 82 Cabang,
selama 2015-2019

1
PENAMBAHAN
WILAYAH

Wilayah Koalisi
Perempuan Indonesia
bertambah sebanyak
1 wilayah, selama
2015-2019

BAB I

ANALISIS SITUASI

A. Analisis Situasi Eksternal

Sepanjang tahun 2014-2019 telah terjadi beberapa peristiwa penting di dalam negeri maupun di regional dan Internasional yang berkaitan dengan pelaksanaan mandat organisasi

1. Situasi Dalam Negeri

1) Pilkada Serentak

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, dilaksanakan sebagai bentuk pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (selanjutnya disebut UU Pilkada)

Sebagai pelaksanaan UU Pilkada, maka diselenggarakan serangkaian pilkada secara parsial dalam beberapa tahun yaitu Pilkada Serentak Tahun 2015, Pilkada Serentak Tahun 2017, Pilkada Serentak Tahun 2018 dan Pilkada Serentak tahun 2020, hingga akhirnya akan ada Pilkada serentak di seluruh Indonesia pada tahun 2027.

Pilkada Serentak 2015 dilakukan untuk memilih 7 Gubernur, 170 Bupati dan 26 Walikota. Sedangkan Pilkada Serentak 2017 memilih 7 Gubernur, 76 Bupati dan 18 Wali Kota. Pilkada Serentak 2018 memilih 17 Gubernur, 115 Bupati dan 39 Wali Kota. Sedangkan Pilkada Serentak 2020 yang akan dilesenggarakan pada 23 September, akan memilih 9 Gubernur, 224 Bupati dan 37 Walikota.

Dilaksanakannya Pilkada serentak membuka peluang meningkatnya jumlah Perempuan kepala /wakil kepala daerah. Pilkada 2015 menghasilkan 25 Perempuan Bupati/Walikota dan 10 wakil Bupati/Wakil Walikota. Pilkada Serentak 2017, berhasil menaikkan 1 perempuan wakil gubernur, 10 perempuan sebagai Bupati/Walikota, dan 3 perempuan sebagai wakil Bupati/wakil walikota. Pilkada Serentak 2018, berhasil memenangkan 1 perempuan sebagai Gubernur, dan 2 perempuan wakil Gubernur, 15 perempuan sebagai Bupati/Walikota, dan 13 perempuan sebagai wakil Bupati/wakil walikota. Namun sepanjang pelaksanaan Pilkada Serentak, hanya 1 perempuan berhasil menduduki posisi sebagai Gubernur, yaitu Gubernur Jawa Timur.

Pilkada serentak menjadi inspirasi bagi kaum perempuan. Bahwa perempuan mampu ikut dalam kontestasi Pilkada Serentak, dan berpeluang untuk mendapatkan kepercayaan dari pemilih.

Sejumlah Perempuan kepala daerah, berhasil membuat perubahan di daerahnya, diantaranya menurunkan angka kematian ibu, menekan laju putus sekolah dan memperbaiki layanan sosial dan layanan publik.

Tetapi di sisi lain, sejumlah kepala daerah atau wakil kepala daerah perempuan hanya menjabat beberapa bulan atau kurang dari setengah masa jabatannya, karena terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam tiap pelaksanaan Pilkada Serentak, Koalisi Perempuan Indonesia melakukan sejumlah kegiatan seperti konsultasi publik, kontrak politik dengan calon kepala daerah dan kampanye keterpilihan perempuan.

Namun seiring dengan pelaksanaan Pilkada serentak ini, terjadi praktek tercela, yaitu penggunaan politik uang dan menguatnya penggunaan politik identitas, terutama penggunaan isu SARA (Suku, Agama, Ras dan Aliran). Pilkada serentak juga menjadi pintu masuk bagi kaum ekstremis dan radikal untuk menolak Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan mempromosikan negara Khilafah.

2) Menguatnya Fundamentalisme, Konservatifme dan Ekstrimisme

Sesungguhnya kekuatan kaum fundamentalis, ekstremis dan radikal telah menguat selama 10 tahun, sejak 2004 hingga 2014. Mereka mendapatkan ruang gerak yang cukup luas untuk bergerak, tanpa pengawasan kepolisian maupun pemerintah.

Namun penggunaan kekuatan massa oleh kaum fundamentalis. Ekstremis dan radikal, baru bertemu momentumnya saat pilkada serentak. Terutama saat pelaksanaan pilkada serentak di Jakarta. Dimana kaum ini menggunakan isu agama dan media demonstrasi secara berseri untuk menekan proses persidangan Calon Gubernur Basuki Tjahaya Purnama (Ahok).

Di sisi lain, aksi penggunaan kekerasan, seperti pengeboman tempat ibadah terjadi di beberapa tempat seperti di Surabaya, Samarinda dan beberapa tempat lainnya. Selain itu, kelompok ini juga melakukan penyerangan di beberapa kantor kepolisian. Peledakan Bom di Samarinda dan Surabaya menjadi perhatian serius bagi Koalisi Perempuan Indonesia, karena menasar anak-anak sebagai korbannya, dan menggunakan anak-anak sebagai martil atau senjata bunuh diri.

Menguatnya fundamentalisme dan Konservatifme dan ekstremisme, tidak hanya mengancam gereja dan tempat ibadah non muslim serta kantor polisi, tetapi juga mengancam keselamatan jiwa anak-anak. Selain dalam bentuk penggunaan anak-anak sebagai bom bunuh diri, juga pelarangan atau penolakan imunisasi bagi bayi, balita dan anak-anak. Akibatnya sejumlah daerah mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB) Difteri, hingga beberapa diantaranya meninggal. Praktek fundamentalisme, konservatifme dan ekstremisme juga muncul dalam bentuk protes terhadap kebijakan Menteri Kesehatan yang melarang Sunat terhadap perempuan dan menyuarakan pesan, "Dilarang melarang Sunat Perempuan" meskipun tidak ada dasar hukumnya dalam hukum Islam. Selain itu praktek pemaksaan penggunaan hijab atau Jilbab terjadi di berbagai sekolah. Disamping itu, terdapat pula gerakan Indonesia tanpa pacaran dan gerakan nikah muda. Dua gerakan yang terakhir ini, berpotensi merintangikan keberhasilan upaya penghentian Perkawinan Anak. Padahal gerakan perempuan tengah berupaya mendorong penghapusan praktek perkawinan anak.

Kaum fundamentalis, konservatif dan radikal juga semakin nyata-nyata berhadapan dengan gerakan perempuan, serta memberikan label negatif terhadap gerakan perempuan menuduh kaum feminis adalah kaum pendukung perilaku seks bebas, mendukung Lesbian, Biseksual dan Transgender (LBT), melawan pada suami dan bertentangan dengan Islam. Diawali dengan kemenangannya menolak Rancangan Undang-Undang Kesetaraan dan Keadilan Gender (RUU KKG), kelompok ini kemudian mengajukan uji materi terhadap pasal perzinahan, perkosaan dan pencabulan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ke Mahkamah Konstitusi. Kelompok ini juga membentuk kelompok Indonesia Tanpa Feminis Kelompok ini juga merupakan kelompok yang paling lantang menolak pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS).

Kelompok ini juga secara langsung merugikan Koalisi Perempuan Indonesia, karena kelompok ini merekrut kader-kader Koalisi Perempuan Indonesia, dan mempengaruhinya untuk keluar dari Koalisi Perempuan Indonesia. Hingga akhir 2019, setidaknya ada 3 Sekretaris Cabang Koalisi Perempuan Indonesia yang mengundurkan diri karena pengaruh dari kelompok ini. Dua diantaranya menyatakan mengundurkan diri karena sudah tidak setuju dengan perjuangan Koalisi Perempuan Indonesia tentang HAM (Hak Asasi Manusia), Demokrasi dan keadilan Gender. Satu lagi, mengundurkan diri karena terpengaruh isu SARA.

3) Refleksi 20 tahun Reformasi

Tahun 2018 merupakan momentum penting bagi berbagai pihak yang terlibat dan atau menikmati perjuangan reformasi. Tahun 2018 adalah tepat 20 tahun turunnya kekuasaan diktator Presiden Soeharto, dan dimulainya demokratisasi di segala bidang.

Gerakan perempuan memaknai, 20 tahun reformasi dengan berbagai kemajuan, seperti adanya jaminan terhadap hak berorganisasi, sehingga memungkinkan bertumbuhnya berbagai organisasi perempuan. Lahirnya berbagai peraturan perundangan yang mendukung kesetaraan dan keadilan gender, meningkatnya representasi politik perempuan, meningkatnya akses warga negara terhadap pelayanan publik dan perlindungan sosial serta diakuinya peran dan sumbangan perempuan dalam berbagai bidang pembangunan.

Namun pada saat yang sama, 20 reformasi juga menunjukkan fakta bahwa ruang demokrasi yang terbuka luas, telah digunakan oleh kelompok-kelompok ekstremis dan radikal untuk menolak NKRI, HAM, Demokrasi dan Kesetaraan Gender. Kelompok ini menggunakan jaminan hak berorganisasi, dan menyampaikan pendapat untuk melancarkan sejumlah serangan terhadap NKRI, HAM, Demokrasi dan Kesetaraan Gender. Pada saat yang sama kelompok ini menggunakan ruang demokrasi untuk mempromosikan negara kilafah dan sejumlah paham konservatif dan intoleran.

Meski terdapat berbagai kemajuan di bidang kesetaraan dan keadilan gender, namun setelah 20 tahun reformasi, kekerasan terhadap perempuan dan anak tetap tinggi, baik kekerasan fisik maupun kekerasan seksual.

Bagi Koalisi Perempuan Indonesia, 20 tahun Reformasi, juga 20 tahun lahirnya Koalisi Perempuan Indonesia yang lahir pada 17 Mei 1998. Refleksi 29 tahun Koalisi Perempuan Indonesia juga menunjukkan sejumlah kemajuan di berbagai bidang. Namun di samping kemajuan tersebut, masih terdapat sejumlah masalah, terutama terkait dengan kemandirian organisasi, utamanya dalam hal pembiayaan organisasi. Padahal, kemandirian organisasi ini akan sangat berpengaruh pada keberlanjutan organisasi.

4) Ancaman Terhadap Hak Berorganisasi

Ancaman terhadap hak berorganisasi mulai dikhawatirkan oleh berbagai pihak saat disahkannya Perppu No 2 tahun 2017 menjadi Undang-Undang No 16 Tahun 2017. Perppu ini dianggap mengancam hak berorganisasi, karena pencabutan ijin organisasi tidak lagi dilakukan melalui pengadilan, namun lembaga/kementerian yang menerbitkan ijin, dapat langsung mencabut ijin tersebut.

Bersamaan dengan proses legislasi Perppu tersebut, pemerintah, melalui Kementerian Hukum dan HAM, mencabut status badan hukum Hizbut Tahir Indonesia (HTI), sebuah organisasi politik di tingkat global, yang telah dilarang di berbagai negara. Ada tiga alasan pembubaran HTI yaitu: **1)** HTI sebagai Ormas berbadan hukum tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional, **2)** Kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan UUD 1945, sebagaimana diatur dalam UU No 17 Tahun 2013 Tentang Ormas. **3)** Aktifitas yang dilakukan oleh HTI dinilai telah menimbulkan berbenturan dalam masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat serta membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tindakan pemerintah ini dinilai dapat membahayakan hak berorganisasi bagi organisasi-organisasi lain, karena pemerintah dapat dengan mudah dan secara sepihak memberikan alasan pencabutan badan hukum.

Selain melalui mekanisme pencabutan Status Badan Hukum, hambatan terhadap organisasi juga dapat dilakukan melalui pemberhentian kerja sama, seperti dilakukan Kementerian Lingkungan

Hidup dengan WWF (World Wild Fund for nature), atau cara lain juga digunakan dalam bentuk tidak diterbitkannya Surat Keterangan Terdaftar (SKT)

5) Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Sejak Januari 2014 Pemerintah telah meluncurkan Program Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Program ini bersifat wajib bagi semua warga negara untuk mengikutinya. Bagi Fakir miskin dan warga tidak mampu mereka tetap dapat mengikutinya, namun iuran mereka dibayar oleh pemerintah atau menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI)

Seiring dengan pergantian Presiden, program JKN pun mengalami perubahan, yaitu bagi mereka yang menjadi termasuk dalam PBI, menerima Kartu Indonesia Sehat (KIS). Jumlah fakir miskin dan orang tidak mampu yang masuk golongan PBI atau penerima KIS pun semakin meningkat. Dari 80 juta di awal Tahun 2015 menjadi 96 juta pada akhir 2019. Problem utama program ini adalah kesalahan pentargetan pada orang miskin atau tidak mampu, sehingga banyak orang miskin dan tidak mampu yang tidak masuk dalam data PBI. Problem lainnya adalah kartu KIS dikirim langsung ke desa oleh pemerintah pusat. Namun karena pak Kepala Desa /Lurah mengkhawatirkan adanya keributan atau konflik, karena tidak semua warga memperoleh KIS, maka KIS tersebut dibiarkan menumpuk di kantor desa atau kelurahan. Problem lainnya adalah sejumlah warga miskin, meski menerima KIS, yang bersangkutan tidak mengetahui cara menggunakannya. Selain itu, terdapat pula problem sulitnya mengakses layanan kesehatan dengan menggunakan KIS atau kartu BPJS lainnya. Disamping itu, program JKN, yang sangat bermanfaat bagi warga ini pun, tidak menyediakan mekanisme penyampaian keluhan.

Oleh karenanya, Koalisi Perempuan Indonesia membangun Balai Perempuan sebagai Pusat Informasi Pengaduan dan Advokasi Jaminan Kesehatan Nasional (BP PIPA JKN) sebagai tempat memberikan informasi atau pun pusat penyampaian keluhan

6) Pelaksanaan Undang-Undang Desa

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, mulai efektif berlaku sejak tahun 2016. Namun sejumlah persiapan menyongsong diberlakukannya UU Desa, dilakukan sejak tahun 2015. Sejumlah persiapan tersebut adalah penyusunan sejumlah peraturan pelaksana, baik peraturan pemerintah maupun peraturan menteri, serta rekrutmen fasilitator desa. Lahirnya UU tentang Desa juga diikuti dengan dibentuknya Kementerian baru yaitu Kementerian Desa, Transmigrasi dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

Koalisi Perempuan Indonesia, telah terlibat dalam proses penyusunan undang-undang desa sejak tahun 2010. Karena pada saat diimplementasikannya UU Desa ini, Koalisi Perempuan Indonesia merasa berkewajiban untuk meningkatkan pengetahuan perempuan tentang UU Desa dan meningkatkan ketrampilan perempuan untuk terlibat dalam pelaksanaan UU Desa. Selain itu, setengah penduduk desa adalah perempuan, dimana mereka masih mengalami rintangan bersifat internal maupun eksternal untuk mengembangkan dan memperkuat diri sebagai perempuan pemimpin. Oleh karenanya Koalisi Perempuan Indonesia memiliki sejumlah program untuk melaksanakan program pemberdayaan perempuan desa.

Koalisi Perempuan Indonesia juga memperkenalkan peringatan Hari Internasional Perempuan Pedesaan, yang jatuh pada tanggal 15 Oktober. Peringatan ini dimaksudkan agar setiap warga, pemerintah dan media memahami pentingnya pemberdayaan perempuan pedesaan.

7) Pemilu Dewan dan Pilpres

Pengertian Pemilihan Umum 2019, diatur dalam Pasal 1, Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagai berikut: “Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

Berbeda dengan Pemilu di tahun 2014, yang diselenggarakan secara terpisah antara penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota DPR, anggota DPD dan anggota DPRD dengan Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu 2019 diselenggarakan serentak dan bersamaan untuk memilih anggota DPR, anggota DPD dan anggota DPRD, sekaligus memilih Presiden dan Wakil Presiden.

Peserta Pemilihan Umum yang dilaksanakan pada April 2019 ini, terdiri dari Partai Politik dan Perorangan. Partai Politik Peserta Pemilu 2019 terdiri dari 20 Partai Politik, terdiri dari 16 (enam belas) partai nasional dan 4 (empat) partai lokal khusus untuk Aceh

Pemilu 2019 dilaksanakan di dalam dan di luar negeri. Di Dalam Negeri, pemilu diselenggarakan di 34 Provinsi, 514 kabupaten/kota dan 7.201 kecamatan dan 83.370 kelurahan/desa.

Jumlah Pemilih, berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang diumumkan oleh KPU pada 5 September 2018, mencapai 185.732.093 pemilih, terdiri dari laki-laki: 92.802.671 pemilih dan Perempuan: 92.929.422 pemilih dengan jumlah Tempat Pemungutan suara (TPS) sebanyak 805.075 TPS.

Sedangkan Pemilu di luar negeri, berdasarkan data dari 130 kantor Perwakilan luar negeri, KPU mencatat jumlah pemilih mencapai 2.049.791 pemilih, terdiri dari Laki-Laki: 984.491 pemilih dan perempuan 1.065.300 pemilih. Jumlah ini masih mungkin bertambah sesuai dengan jadwal pemutakhiran data pemilih.

Koalisi Perempuan Indonesia memiliki kepentingan terhadap pelaksanaan Pemilu terutama berkaitan dengan peningkatan Keterwakilan Perempuan di Parlemen, peningkatan keterwakilan Perempuan di lembaga penyelenggara Pemilu dan terlaksananya pemilu damai tanpa politik uang dan eksploitasi politik identitas.

2. Situasi Internasional

1) Diadopsinya SDG sebagai Agenda Pembangunan Global

Dokumen *Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*, akhirnya disahkan, dalam Forum UN Summit, 25 – 27 September 2015. Sebanyak 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan 169 target yang ada dalam dokumen tersebut memberikan harapan bagi perempuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Dokumen ini efektif berlaku di berbagai negara sejak Januari 2016

Dokument Agenda Pembangunan Berkelanjutan yang merujuk pada *The Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)*, *International Convention on Population and Development (ICPD)* dan *Beijing Platform for Action (BPFA)*, diharapkan dapat menjawab dan mengakhiri feminisasi kemiskinan dan ketimpangan gender yang terjadi di berbagai Negara di dunia.

Tujuan dan target-target SDG yang terintegrasi, tidak terpisah-pisah dan menyeimbangkan antara

Sosial, ekonomi dan lingkungan serta mendorong aksi-aksi penting bagi kemanusiaan dan planet, mencakup manusia, planet, kemakmuran, perdamaian dan kemitraan.

Visi dari SDG yang mentransformasional membayangkan terwujudnya kehidupan dunia yang bebas dari kemiskinan, kelaparan, penyakit dan keserakahan, dimanaseluruh kehidupan dapat tumbuh dengan subur. Dunia yang bebas dari ketakutandan kekerasan. Dunia dengan kemampuan membaca yang universal. Dunia dengan akses yang setara danuniversal terhadap pendidikan yang berkualitas pada setiap tingkatan, akses terhadap pelayanan kesehatan danperlindungan sosial, dimana kesejahteraan fisik, mental dan sosial setiap manusia terjamin. Dunia dengan pemenuhan hak atas air minum, sanitasi dan lingkungan yang sehat dan bersih, pangan yang berkecukupan, aman, terjangkau dan bernutrisi, energi yang terbarukan dan terjangkau.

SDG juga memiliki visi transformasional untuk mewujudkan dunia dengan penghargaan universal terhadap HAM, Hak Perempuan, Hak Anak dan martabat manusia, keadilan hukum, kesetaraan dan non diskriminasi, penghargaan terhadap suku, etnis dan budaya, persamaan kesempatan yang menjamin setiap manusia mengembangkan potensinya serta berkontribusi pada terwujudnya kemakmuran yang sama. SDG juga memiliki visi untuk melindungi anak-anak, agar setiap anak dapat tumbuh dengan bebas dari kekerasan dan eksploitasi.

Tujuan dan Target-target SDG juga bertujuan mewujudkan dunia dimana setiap perempuan dapatmenikmati secara penuh kesetaraan gender, dan seluruh kendala legal, sosial dan ekonomi terhadappemberdayaan mereka sudah dihilangkan. Dunia yang adil, setara, toleran, terbuka dan inklusif secara sosial dimana seluruh kebutuhan dari mereka yang paling rentan dapat terpenuhi.

Koalisi Perempuan Indonesia yang telah ikut dalam berbagai forum Konsultasi penyusunan dokumen SDG sejak tahun 2012, terlibat dalam berbagai kegiatan advokasi kebijakan untuk mendukung pelaksanaan SDG.

2) Donald Trump Effects

Presiden Amerika Serikat ke 45 ini, Donald Trump, terpilih sebagai pemenang pemilu pada november 2016 dan dilantik pada Januari 2017. Salah satu kebijakannya yang kontroversial adalah kebijakan mengutamakan kepentingan Amerika atau dikenal dengan America First. Kebijakan tersebut mencakup : 1) Pemberlakuan tarif di beberapa negara atau perang dagang dan perubahan kebijakan *Generalized System Preferences* (GSP) . Kebijakan GSP adalah pemotongan bea masuk impor bagi sejumlah negara.Perubahan kebijakan GSP diantaranya mengurangi atau mencabut pemotongan bea masuk impor, 2) Penurunan Pajak, 3) Larangan masuknya imigran berketrampilan rendah, untuk memperluas kesempatan kerja bagi warga Amerika 4) Penolakan sejumlah perjanjian kerja sama perdagangan bebas internasional (NAFTA) dan kemitraan Trans-Pacific, serta penerapan proteksi dagang 5) Larangan eksport teknologi canggih.

Kendati kebijakan Donald Trump dianggap kontroversi, namun sejumlah negara di dunia mengikuti kebijakan Donald Trump tersebut, terutama terkait proteksi perdagangan dan industri dalam negeri, pengetatan masuknya imigran ke dalam suatu negara-atau dikenal sebagai kebijakan anti imigran dan anti tenaga Kerja Asing (TKA).

Di sisi lain, kebijakan pemberlakuan tarif dan perang dagang antara Amerika -China berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi dan munculnya krisis ekonomi di berbagai negara di dunia.

Indonesia termasuk negara yang terkena dampak langsung mau pun tidak langsung dari kebijakan Donald Trump. Dampak langsung dari kebijakan Trump adalah menurunnya ekspor Indonesia ke Amerika, sehingga berakibat pada penutupan sejumlah perusahaan atau industri. Sedangkan dampak tidak langsung adalah menurunnya ekspor Indonesia ke berbagai negara yang mengalami

krisis akibat perang dagang Amerika –China. Dampak tidak langsung lainnya yang dialami Indonesia adalah sulitnya Tenaga Kerja Indonesia untuk memasuki lapangan kerja di berbagai negara – termasuk Amerika, karena pengetatan kebijakan imigrasi di berbagai negara.

Di penghujung akhir 2019, Donald Trump menghadapi upaya Pemakzulan oleh Kongres Amerika. Peristiwa ini diduga merupakan peristiwa yang akan berdampak besar terhadap ekonomi dunia.

3) Fundamentalisme, Konservatifme dan Ekstrimisme Global

Fundamentalisme, konservatifme dan ekstremisme Global terjadi di banyak negara. Konservatifme agama dan fundamentalisme agama, seringkali digunakan sebagai landasan kerja partai politik dan Partai politik memanfaatkan Konservatifme dan fundamentalisme untuk mendulang dukungan warga masyarakat di negara itu. Konservatifme dan fundamentalisme seringkali berwujud sebagai tirani mayoritas agama tertentu dan menindas agama minoritas.

Ekstremisme berbasis agama juga terjadi di berbagai negara, kelompok ini melakukan berbagai aksi kekerasan untuk memaksakan fahamnya. Salah satu kelompok ekstremisme yang meluas dan masuk ke berbagai negara, termasuk Indonesia adalah ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) . Kelompok ini pertama kali muncul di Iraq tahun 2004, pada saat invasi Amerika Serikat di Iraq. Sejumlah pihak mempercayai, bahwa kelahiran ISIS difasilitasi oleh Amerika Serikat, namun hal ini masih membutuhkan pembuktian.

ISIS mulai menguasai beberapa kota di Iraq pada tahun 2005 dan pada tahun 2011 ISIS memperluas kekuasaannya di beberapa daerah di Suriah. Pada tahun 2014, di Masjid Nuri Mosul Bagdad mendeklarasikan berdirinya “kekhilafan ISIS” mencakup Iraq dan Suriah.

Namun pemerintah sah Iraq dan Suriah terus melakukan perlawanan terhadap penguasaan ISIS. Di Indonesia, apada Agustus 2014, Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Yudoyono memutuskan bahwa ISIS adalah kelompok yang di larang di Indonesia. Namun, meskipun telah di larang, organisasi ini tetap melakukan aksi-aksi kekerasan serta menggalang dana di Indonesia. ISIS juga melakukan perekrutan warga negara Indonesia untuk ikut berperang di Iraq atau di Suriah. Ratusan, bahkan mungkin ribuan Warga Negara Indonesia (suriah) mengikuti pelatihan militer dan ikut berperang bersama dengan ISIS di Iraq atau di Suriah.

Masa kejayaan ISIS terjadi di tahun 2011 hingga 2017. Di tahun –tahun ini, ISIS mengendalikan Iraq dan Suriah serta kelompok-kelompok ISIS yang ada di berbagai negara, termasuk di Indonesia untuk melakukan berbagai aksi kekerasan di Indonesia .

Sejak tahun 2017, ISIS mulai mengalami kekalahan di Iraq dan pada tahun 2018, ISIS juga mengalami kekalahan di Suriah. Pada masa – masa kekalahannya ini ISIS sangat giat melakukan panggilan jihad kaum kaum muda untuk perempuan maupun laki-laki unuk bergabung dengan ISIS. Pada awal 2019, ISIS mengalami kekalahan sangat besar, di Iraq maupun di Suriah. Sebagian daerah –daerah yang dikuasai oleh ISIS telah direbut kembali oleh pemerintah yang sah. Pada Maret 2019, ISIS dinyatakan kalah total oleh pemerintah Suriah. Seluruh milisi ISIS ditangkap dan dipenjara, atau beberapa diantaranya dimasukkan ke dalam kamp-kamp tahanan.

Di akhir 2019, isu tentang nasib warga negara lain dari berbagai negara yang ikut berperang sebagai ISIS dipermasalahkan oleh Amerika Serikat. Pada intinya, pemerintah Amerika Serikat mendorong agar negara-negara di dunia menerima kembali warga negaranya yang menjadi Foreign Terroris Fighter (FTF) bersama ISIS. Padahal FTF ini sebagian besar sudah menolak menundukkan diri kepada negara dan pemerintahnya, karena mereka menganggap pemerintah dan negaranya adalah Thaghut¹.

¹ Thaghut adalah istilah dalam Islam merujuk pada setiap yang disembah selain Allah yang rela dengan peribadatan yang dilakukan oleh penyembah atau pengikutnya, atau dengan ketaatan orang yang mentaatinya dalam melawan Allah (wikipedia)

4) UPR dan CEDAW Report

Universal Periodic Review (UPR) merupakan mekanisme Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa untuk melihat kemajuan negara-negara dalam pemajuan, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia. Negara-negara anggota PBB berkewajiban melaporkan pemajuan pelaksanaan HAM setiap 4 (empat) tahun sekali.

Laporan UPR pemerintah Indonesia pada tahun 2016 mengacu pada 150 rekomendasi dari Dewan Keamanan PBB (Human Rights Council) dokumen A/HRC/21/7 yang diterima oleh pemerintah Indonesia.

Sebagai bagian dari masyarakat sipil Koalisi Perempuan Indonesia bersama berbagai organisasi turut mengirimkan laporan alternatif UPR versi masyarakat sipil.

Atas laporan UPR Pemerintah Indonesia, sejumlah negara memberikan rekomendasi untuk perbaikan pelaksanaan HAM di Indonesia. Pemerintah telah menerima sejumlah rekomendasi dari berbagai negara. Namun masalahnya, sejumlah rekomendasi tersebut belum dimasukkan dalam Rencana Aksi Nasional (RAN) HAM.

Pemerintah Indonesiaberkewajiban menyampaikan laporan implemmentasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) kepada Komisi Status Perempuan di bawah Dewan Keamanan PBB pada tahun 2017. Namun sayangnya, pemerintah mangkir untuk mengirimkan laporan tersebut. Akibatnya, masyarakat sipil pun tidak dapat mengirimkan laporan bayangan atau laporan alternatif CEDAW kepada Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB)

5) Krisis Multi Dimensi

Krisis ekonomi mulai menunjukkan gejalanya pada pertengahan tahun 2017 akibat perang dagang antara Amerika dengan China. Sejumlah negara mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi .

Beberapa negara yang terkena dampak tersebut antara lain adalah : Jepang, China, Jerman, Inggris, Malaysia, Hongkong.

Krisis di berbagai negara tersebut akan berdampak bagi Indonesia, karena nilai ekspor Indonesia ke negara-negara yang terkena krisis akan menurun. Pada gilirannya terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau bahkan Penutupan perusahaan.

Akibat dari perlambatan pertumbuhan ekonomi ini, organisasi kerja sama pembangunan ekonomi dunia (OECD) mendorong negara-negara di dunia untuk lebih fokus pada ekonomi digital, untuk menyelamatkan ekonomi mereka. Namun ekonomi digital, memberikan dampak negatif pada lapangan kerja. Sejumlah lapangan kerja akan hilang karena digantikan oleh mesin. Pekerja Perempuan, yang pada umumnya bekerja di lapangan kerja trampil, terancam kehilangan pekerjaan, karena digantikan oleh mesin.

B. Analisis Situasi Internal

Koalisi Perempuan Indonesia mengalami pertumbuhan yang pesat. Dalam kurun waktu lima tahun, penambahan jumlah anggota mencapai hampir sepuluh ribu perempuan. Pertambahan Balai Perempuan dan Cabang juga tumbuh dengan baik. Namun pertumbuhan wilayah masih sangat lambat. Dalam kurun waktu, Wilayah Koalisi Perempuan Indonesia hanya bertambah satu provinsi.

Namun, penambahan anggota ini, tidak diikuti oleh kemampuan organisasi untuk memberikan layanan Pendidikan Kader Dasar (PKD) bagi anggota baru. Akibatnya, prosentase anggota yang menerima PKD sangat kecil, jika dibandingkan dengan jumlah penambahan anggota yang ada. Hal

ini disebabkan oleh karena keterbatasan dana dan keterbatasan jumlah fasilitator.

Pertambahan anggota dan struktur di tingkat Balai Perempuan dan Cabang terutama disebabkan oleh adanya **Community Organizing (CO)** atau penggerak masyarakat yang telah dilatih oleh Koalisi Perempuan Indonesia dan terjun ke masyarakat.

Keaktifan BP PIPA (Balai Perempuan sebagai Pusat Informasi, Pengaduan dan Advokasi) Koalisi Perempuan di 132 desa, membuat kerja-kerja Koalisi Perempuan Indonesia dalam melayani dan membantu masyarakat mengakibatkan Koalisi Perempuan Indonesia semakin dipercaya oleh pemerintah dan masyarakat. Lebih dari 30.000 warga masyarakat, terlayani oleh BP PIPA JKN Bahkan beberapa pemerintah Desa mulai mengalokasikan anggaran bagi Balai Perempuan agar dapat bekerja melayani masyarakat. Sedangkan pemerintah Kabupaten dan Kota, juga mulai mengalokasikan anggaran untuk replikasi pembentukan BP PIPA. Namun jika dibandingkan dengan seluruh Balai Perempuan yang kini berjumlah 1.118 Balai Perempuan, jumlah BP PIPA masih sangat kecil, hanya 11,8% dari jumlah Balai Perempuan yang ada.

Kapasitas pengurus dalam mengelola organisasi pun masih sangat beragam. Sejumlah wilayah dan cabang yang memperoleh dukungan program, telah menerima penguatan kapasitas. Namun beberapa wilayah dan cabang yang tidak didukung oleh program, belum mengalami penguatan kapasitas.

Dua wilayah belum terkelola dengan baik, yaitu: wilayah (Sulawesi Tenggara) mengalami kekosongan jabatan Sekwil (Sekretaris Wilayah) dan terjadi Konflik antar pengurus wilayah. Sedangkan satu wilayah lagi, mengalami kekosongan jabatan sekwil, karena sekwil yang bersangkutan menghilang (Sumatera Utara) dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, padahal belum mempertanggungjawabkan dana organisasi yang dikelolanya.

Selama kurun waktu lima tahun terjadi dua kali peristiwa mosi tidak percaya kepada pengurus Wilayah yaitu kepada sekwil Jawa Barat pada tahun 2015 dan Sekwil Sulawesi Tenggara pada tahun 2015. Mosi tidak percaya ini muncul akibat adanya pelatihan Anti Koupasi, yang kemudian memperkuat keberanian pengurus dan kader untuk memantau dan mendorong transparansi dan akuntabilitas pengurusnya. Mosi tidak percaya telah ditangani oleh dewan Kode Etik. Hasilnya, Jawa Barat : terbukti Sekwil Jawa Barat terdapat kesalahan karena kegiatan dilaksanakan tidak sesuai perencanaan dan tidak dapat mempertanggungjawabkan laporan keuangan, sehingga dilakukan Kongres Wilayah untuk pergantian pengurus. Sedangkan Sekwil Sulawesi Tenggara: tidak terbukti terdapat kesalahan, namun tidak memperoleh dukungan politik dari sesama pengurus wilayah, sehingga yang bersangkutan mengundurkan diri.

Jumlah staff Koalisi Perempuan Indonesia masih sangat terbatas, dibanding luasnya tugas dan tanggung jawab sekretariat nasional. Kemampuan staff pun masih sangat beragam. Sehingga beban kerja staff sekretariat nasional sangat tinggi.

Di penghujung akhir tahun masa jabatan (2019) terjadi musibah, Presidium Nasional. Sdr Luki Paramita (alm) meninggal karena sakit kanker hati yang di deritanya, dan Sekretaris Jenderal menderita kanker Payudara, sehingga selama 3 (tiga) bulan penuh tidak masuk kerja dan 3 (tiga) bulan berikutnya hanya bekerja paruh waktu. Selama 6 bulan tersebut, tugas-tugas sekretaris jenderal didelegasikan kepada deputi sekretaris jenderal, yaitu Sdr. Sutriyatmi (Mimi).

Selama tahun 2019, sekretariat nasional dihadapkan pada kesulitan penggalangan dana, sehingga tidak ada kerjasama baru dengan pihak ketiga, hal ini mengakibatkan keuangan Sekretariat Nasional menjadi sangat terbatas.

PEREMPUAN MANDIRI,

PEREMPUAN MEMIMPIN



**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENGURUS NASIONAL KOALISI PEREMPUAN INDONESIA
PERIODE 2014-2019**

BAB II

LAPORAN PRESIDIUM NASIONAL

A. Tugas, Tangung Jawab dan Kewenangan

Tugas, Tangung Jawab dan Kewenangan Presidium Nasional Koalisi Perempuan Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Anggaran Rumah Tangga Koalisi Perempuan Indonesia, adalah sebagai berikut

1. Bertanggungjawab dalam penyusunan dan penetapan kebijakan/ peraturan berdasarkan mandat Kongres Nasional sebagai landasan kerja Sekretariat Nasional Koalisi Perempuan Indonesia, termasuk di dalamnya pengesahan SOP bertanggung jawab menetapkan berdasarkan mandat kongres
2. Bertanggungjawab dalam penyusunan dan penetapan kebijakan/ peraturan berdasarkan mandat Kongres Nasional sebagai landasan kerja bagi Koalisi Perempuan Indonesia di tingkat Balai Perempuan, Cabang, dan Wilayah
3. Memberi masukan kepada Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan di dalam merekrut staf Sekretariat Nasional yang mempunyai posisi strategis setingkat Kepala Bidang.
4. Melakukan pengawasan terhadap perkembangan pengorganisasian dengan setiap Presidium Wilayah dan memberikan tembusan informasi kepada Dewan Kelompok Kepentingan Cabang dan Dewan Kelompok Kepentingan Balai Perempuan terkait.
5. Melakukan pengawasan dan pemantauan (*monitoring*) terhadap pencapaian visi, pelaksanaan misi, dan penghayatan nilai-nilai di kalangan organisasi dan anggota Koalisi Perempuan Indonesia.
6. Melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan Program Kerja Sekretariat Nasional Koalisi Perempuan Indonesia
7. Presidium Nasional Harian bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Program Kerja Sekretariat
8. Membawa aspirasi Kelompok Kepentingan dan mewujudkannya ke dalam agenda Koalisi Perempuan Indonesia
9. Bersama-sama dengan Sekretaris Jenderal, Presidium Nasional mempunyai hak untuk mewakili organisasi dalam kegiatan dengan pihak lain
10. Bersama-sama dengan Sekretaris Jenderal, Presidium Nasional berhak melakukan tindakan-tindakan atas nama Koalisi Perempuan Indonesia.
11. Melakukan pengawasan terhadap perencanaan, pengelolaan, dan pertanggung jawaban keuangan dan kekayaan organisasi.

B. Pelaksanaan dan Capaian Tugas, Tanggung Jawab dan Kewenangan

Pelaksanaan dan capaian Tugas, Tanggung Jawab dan Kewenangan yang dilakukan oleh Presidium Nasional, adalah sebagai berikut:

1. Penetapan Peraturan/Kebijakan

Penetapan peraturan/Kebijakan dilakukan oleh Presidium melalui proses musyawarah dalam forum-forum pengambilan keputusan, antara lain forum Rapat Kerja Nasional, Forum Rapat Monitoring dan Evaluasi, dan Forum Rapat Pengurus Nasional.

Beberapa kebijakan yang dihasilkan adalah:

- Surat Keputusan Pengurus Nasional
- Surat Keputusan Rapat Kerja Nasional

Nomor tahun dan jenis Surat Keputusan (SK) Pengurus Nasional dan SK Rapat Kerja Nasional terlampir dalam laporan ini

2. Masukan dalam Proses Rekrutmen Staff

Masukan Presidium dalam proses Rekrutmen staff dilakukan Presidium Harian. Presidium Harian, Sdr Luki Paramita, terlibat dalam proses test wawancara psikologis, memberikan penilaian dan catatan untuk penerimaan calon staf .

3. Pengawasan terhadap perkembangan pengorganisasian

Pengawasan terhadap perkembangan pengorganisasian dilakukan dalam proses monitoring dan evaluasi (monev) terhadap sekretariat nasional maupun Monev di wilayah.

Selain itu, Presidium Nasional juga melakukan pemeriksaan data perkembangan jumlah anggota berbasis kelompok kepentingan yang dibuat oleh sekretariat Nasional. Serta membahas beberapa kelompok kepentingan yang perkembangannya sangat lambat, seperti kelompok kepentingan Disabilitas, Kelompok Kepentingan Masyarakat Adat, Kelompok Kepentingan Anak Marjinal, Kelompok Kepentingan Lesbian Biseksual dan Transgender (LBT), Kelompok Kepentingan Perempuan Pekerja Rumah Tangga (PRT) dan Kelompok kepentingan Perempuan yang dilacurkan (Pedila).

4. Pengawasan dan pemantauan (*monitoring*)

Monitoring dan Evaluasi (monev) terhadap Sekretaris Jenderal dilakukan sesuai dengan SK Rapat Kerja Nasional, yaitu dilakukan sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun, yaitu monev semester I dan Monev semester II

Disamping itu dilakukan monev terhadap sekretaris jenderal, dalam bentuk informasi, pertanyaan dan klarifikasi terhadap laporan, pengaduan /keluhan atau berita tertentu terkait sekretariat nasional, Wilayah, Cabang, Balai Perempuan atau pengurus/anggota Koalisi Perempuan Indonesia

5. Pengawasan oleh Presidium Nasional Harian

Pengawasan oleh Presidium harian dilakukan dalam bentuk Presidium Harian hadir ke Sekretariat Nasional, dalam waktu-waktu tertentu (seminggu 2 hari) untuk mengawasi beberapa perkembangan sekretariat, menerima informasi, memberikan bantuan/saran kepada Sekretaris Jenderal atau staff, penandatanganan pengajuan check keuangan.

Pengawasan oleh Presidium Nasional ini dilakukan oleh Presidium Harian yang berada di Jakarta, terutama oleh Sdr. Luki Paramita. Setelah sdr Luki Paramita meninggal, pengawasan dilakukan oleh Sdr Maulani

6. Membawa aspirasi Kelompok Kepentingan

Aspirasi Kelompok kepentingan diserap oleh presidium nasional melalui kegiatan : assessment Perlindungan sosial berbasis kelompok kepentingan, pertemuan nasional Kelompok Kepentingan untuk intervensi RUU berkaitan dengan Kelompok Kepentingan, Rapat Kerja Nasional dan Monev di Wilayah saat Presidium Nasional membantu Presidium Wilayah melakukan monev.

Aspirasi kelompok Kepentingan yang disuarakan oleh Presidium Nasional, antara lain terkait isu –isu :

1. **Presidium Nasional KK Ibu Rumah Tangga:** Pencegahan Perkawinan Anak , perlindungan bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga
2. **Presidium Nasional KK Lansia :** Perlindungan sosial khusus bagi Lansia
3. **Presidium Nasional KK Profesional :** anti korupsi
4. **Presidium Nasional KK Perempuan Petani :** Pertanian Ramah Lingkungan, akses tanah, benih dan input pertanian bagi perempuan petani, dan perubahan iklim.
5. **Presidium Nasional KK Perempuan Nelayan:** intervensi RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Petambak Garam untuk memasukkan Pengakuan Perempuan Nelayan dalam definisi nelayan, akses sumber daya dan akses pasar bagi perempuan nelayan, perlindungan sosial bagi perempuan nelayan dan perempuan dalam rumah tangga nelayan.
6. **Presidium Nasional KK Masyarakat Adat:** -
7. **Presidium Nasional KK Informal :** persamaan akses terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan data terpilah KUR, perlindungan sosial bagi perempuan miskin agar dapat berusaha.

8. **Presidium Nasional KK Disabilitas:** intervensi RUU Penyandang Disabilitas, khususnya tentang kekerasan dan Diskriminasi terhadap perempuan penyandang disabilitas, pembentukan KK Disabilitas di Wilayah dan kerja sama antara KK Disabilitas dengan organisasi penyandang disabilitas (HWDI, Pertuni, dll), perlindungan sosial bagi disabilitas, intervensi RUU Penghapusan Kekerasan Seksual terkait diskriminasi terhadap Perempuan penyandang disabilitas mental. (Pasal 104 RUU PKS).
9. **Presidium Nasional KK Perempuan Lajang, Kepala Keluarga :** perlindungan sosial bagi perempuan kepala keluarga, akses layanan kesehatan reproduksi bagi perempuan lajang dan perempuan kepala keluarga, penghapusan diskriminasi layanan kesehatan reproduksi bagi perempuan lajang dan kepala keluarga.
10. **Presidium Nasional KK Buruh Migrant:** intervensi RUU Perlindungan Pekerja Migrant terutama terkait penggunaan BPJS Ketenagakerjaan untuk menggantikan Perusahaan asuransi swasta dalam pertanggungjawaban risiko Pekerja Migrant, Perlindungan Hukum bagi Pekerja Migran yang berhadapan dengan Hukum, penanganan status stateless pekerja migran dan keluarganya, perlindungan dari praktek perdagangan orang.
11. **Presidium Nasional KK Pemuda Pelajar dan mahasiswa :** pencegahan Perkawinan Anak, kekerasan terhadap mahasiswa perempuan, kepemimpinan perempuan muda

7. Mewakili organisasi dalam kegiatan dengan pihak lain

Presidium nasional menghadiri pertemuan di tingkat provinsi, nasional, maupun pertemuan regional, mewakili organisasi. Diantaranya : 1) Pertemuan Pemuda ASEAN, 2) pertemuan kampanye Nasional Stop Perkawinan anak di 5 Provinsi, 3) pertemuan dengan donor yang diselenggarakan di provinsi yang sama dengan tempat tinggal presidium nasional, 3) Pertemuan khusus berkaitan dengan Kelompok Kepentingan, misalnya seminar Perlindungan Sosial khusus untuk Lanjut Usia

8. Melakukan tindakan-tindakan atas nama Koalisi Perempuan Indonesia

Dilakukan dalam bentuk pembahasan dan penandatanganan kerja sama dengan donor, penandatanganan check, pengajuan uji materi di Mahkamah Konstitusi. Beberapa presidium nasional juga mendampingi Sekretaris Wilayah berdialog dengan pemerintah setempat.

9. Pengawasan terhadap perencanaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban keuangan dan kekayaan organisasi.

Pengawasan terhadap perencanaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban keuangan dan kekayaan organisasi dilakukan dalam forum Monev dan Rakernas. Presidium Nasional mengecek apakah perencanaan sudah sesuai dengan mandat Kongres Nasional IV. Serta memeriksa mandat Kongres Nasional IV mana yang belum tercermin pada program. Presidium nasional juga mengecek penggunaan strategi yang diambil oleh sekretariat nasional dan memberikan masukan terhadap strategi yang diambil.

Presidium nasional juga menggali masalah masalah organisasi yang dihadapi oleh wilayah dan cabang yang hadir dalam forum rakernas dan memberikan rekomendasi strategi penyelesaian masalah, serta memeriksa perkembangan penyelesaian masalah melalui pemeriksaan laporan pelaksanaan program dan laporan keuangan sekretariat nasional dalam forum Monev.



PEREMPUAN MANDIRI,

PEREMPUAN MEMIMPIN



**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENGURUS NASIONAL KOALISI PEREMPUAN INDONESIA
PERIODE 2014-2019**

BAB III

LAPORAN SEKRETARIS JENDERAL

A. Tugas, Tangung Jawab dan Kewenangan

Tugas, Tangung Jawab dan Kewenangan Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 46 Anggaran Rumah Tangga Koalisi Perempuan Indonesia, adalah sebagai berikut :

- 1) Dalam peran sebagai badan Eksekutif, Sekretaris bertugas untuk:
 - a. Melaksanakan dan menginformasikan program-program yang telah ditetapkan oleh Rapat Kerja Nasional, Rapat Kerja Wilayah, Rapat Kerja Cabang dan Rembug Balai Perempuan sesuai kewenangannya,
 - b. Melaporkan perkembangan pengorganisasian anggota tiap-tiap Kelompok Kepentingan kepada masing-masing Presidium atau Dewan sesuai Kelompok Kepentingan,
 - c. Menginformasikan undangan pertemuan, pelatihan di tingkat Wilayah, Nasional dan atau Internasional kepada Presidium atau Dewan atau Anggota Kelompok Kepentingan sesuai dengan tingkat kewenangannya,
 - d. Menyampaikan jadwal rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Sekretariat dalam rangka Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan.
 - e. Menyusun dan Menyampaikan Laporan kemajuan organisasi dan laporan Pertanggungjawaban dalam mekanisme pengambilan keputusan organisasi

- 2) Secara khusus, Sekretariat Jenderal berwenang untuk
 - a. Bertanggungjawab dalam penjabaran kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan dalam Kongres Nasional menjadi program kerja di tingkat Sekretariat Nasional.
 - b. Melakukan koordinasi dengan Presidium Nasional guna menjaga serta meningkatkan efektivitas, efisiensi dan kinerja organisasi.
 - c. Bertindak untuk dan atas nama Koalisi Perempuan Indonesia di depan hukum.
 - d. Memimpin Sekretariat Nasional Koalisi Perempuan Indonesia guna menjalankan dan mengelola sehari-hari pelaksanaan program dan kelembagaan Koalisi Perempuan Indonesia sesuai kebijakan yang telah ditetapkan dalam Kongres Nasional dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Koalisi Perempuan Indonesia .
 - e. Bertanggungjawab dalam menyusun anggaran untuk menjalankan program dan organisasi Koalisi Perempuan Indonesia sesuai kebijakan yang telah ditetapkan dalam Kongres

Nasional dan Rakernas Koalisi Perempuan Indonesia

- f. Bertanggungjawab terhadap penggalangan dana guna menjalankan program dan organisasi Koalisi Perempuan Indonesia sesuai kebijakan yang telah ditetapkan dalam Kongres Nasional dan Rakernas Koalisi Perempuan Indonesia.
- g. Bertanggungjawab terhadap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan kegiatan/program dan anggaran di tingkat nasional Koalisi Perempuan Indonesia sesuai kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan.
- h. Bertanggungjawab terhadap pertumbuhan dan penguatan gerakan perempuan di tingkat Balai Perempuan, Koalisi Perempuan Indonesia Cabang dan Koalisi Perempuan Indonesia Wilayah.
- i. Memfasilitasi Rapat Kerja Nasional Koalisi Perempuan Indonesia, Rapat Presidium Nasional Koalisi Perempuan Indonesia, Rapat Dewan Ahli dan Dewan Penasehat Koalisi Perempuan Indonesia
- j. Membuat kebijakan sebagai strategi untuk mengatasi problem hukum, atau rintangan struktural yang menimbulkan masalah dalam pengelolaan dan pertumbuhan organisasi
- k. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Kongres Nasional Koalisi Perempuan Indonesia, termasuk sebagai Panitia Pengarah (*Steering Committee*) maupun Panitia Pelaksana (*Organizing Committee*).
- l. Menyusun dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada Kongres Nasional Koalisi Perempuan Indonesia.

B. Pelaksanaan dan Capaian Tugas, Tanggung Jawab dan Kewenangan

Pelaksanaan tugas butir **a**. Yaitu : Melaksanakan dan menginformasikan program-program yang telah ditetapkan oleh Rapat Kerja Nasional, Rapat Kerja Wilayah, Rapat Kerja Cabang dan Rembug Balai Perempuan sesuai kewenangannya, butir **b**. Melaporkan perkembangan pengorganisasian anggota tiap-tiap Kelompok Kepentingan kepada masing-masing Presidium atau Dewan sesuai Kelompok Kepentingan, **dilaksanakan dan dilaporkan di dalam Rapat Kerja Nasional dan dalam forum monitoring dan evaluasi presidium nasional. Dalam setiap rapat kerja nasional dan monev. Sekretaris jenderal menyampaikan laporan sebagaimana ditentukan dalam butir a dan butir b.**

Pelaksanaan tugas butir **c**. Menginformasikan undangan pertemuan, pelatihan di tingkat Wilayah, Nasional dan atau Internasional kepada Presidium atau Dewan atau Anggota Kelompok Kepentingan sesuai dengan tingkat kewenangannya dan butir **d**. Menyampaikan jadwal rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Sekretariat dalam rangka Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan. **Tugas dalam butir c dan butir d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan bertepatan dengan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan.**

Pelaksanaan tugas butir **e**, yaitu Menyusun dan Menyampaikan Laporan kemajuan organisasi dan laporan Pertanggungjawaban dalam mekanisme pengambilan keputusan organisasi dilaksanakan dalam Kongres Nasional.

Pelaksanaan tugas khusus Sekretaris Jenderal dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Penjabaran kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan dalam Kongres Nasional menjadi program kerja di tingkat Sekretariat Nasional, **dilakukan melalui penyusunan Strategi Nasional (Stranas) Koalisi Perempuan Indonesia yang di sahkan dalam Rapat Kerja Nasional, selain itu juga diterbitkan beberapa SOP (Kebencanaan, Keuangan, Pengelolaan dana hibah, Iuran dan Penggalangan dana Publik) dan Kebijakan Perlindungan Anak,**
- b. Koordinasi dengan Presidium Nasional guna menjaga serta meningkatkan efektivitas, efisiensi dan kinerja organisasi, **koordinasi dilakukan secara langsung melalui forum monev dan rakernas, rapat pengurus nasional, koordinasi dengan presidium harian, koordinasi dengan presidium terkait isu kelompok kepentingan dan koordinasi secara virtual melalui W A Group.**
- c. Bertindak untuk dan atas nama Koalisi Perempuan Indonesia di depan hukum, dilakukan **berkaitan dengan pengajuan uji materi Undang-undang terhadap UUD1945, antara lain UU Perkawinan, UU Pemilu, UU Pilkada dan menjadi Pihak terkait dalam Uji Materi KUHP. Selain itu, juga dilakukan dalam rangka pengurusan badan Hukum Koalisi Perempuan Indonesia dan assessment ormas yang dilakukan oleh Kesbangpol Kemendagri**
- d. Memimpin Sekretariat Nasional Koalisi Perempuan Indonesia guna menjalankan dan mengelola sehari-hari pelaksanaan program dan kelembagaan Koalisi Perempuan Indonesia, dilaksanakan dalam bentuk rekrutment staff, sewa kantor serta pengadaan alat dan bahan kerja
- e. Menyusun anggaran untuk menjalankan program dan organisasi Koalisi Perempuan Indonesia dilakukan setiap tahun dan dilakukan pengecekan setiap 3 bulan dan 6 bulan sekali,
- f. Penggalangan dana guna menjalankan program dan organisasi Koalisi Perempuan Indonesia sesuai kebijakan, dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga donor maupun dengan pemerintah. Selain itu juga dilakukan dalam bentuk penyelenggaraan pelatihan dengan Mahkamah Konstitusi.
- g. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan kegiatan/program dan anggaran di tingkat nasional Koalisi Perempuan Indonesia dilaksanakan dalam forum Rapat Kerja Nasional, Monitoring dan Evaluasi dan rapat-rapat koordinasi di tingkat sekretariat nasional
- h. Pertumbuhan dan penguatan gerakan perempuan di tingkat Balai Perempuan, Koalisi Perempuan Indonesia Cabang dan Koalisi Perempuan Indonesia Wilayah dilakukan melalui penambahan jumlah anggota dan struktur Koalisi Perempuan Indonesia melalui penempatan CO, dan keaktifan pengurus Koalisi Perempuan Indonesia di semua Jenjang. Penguatan gerakan perempuan di tingkat Balai Perempuan dilakukan melalui pengembangan BP PIPA (Balai Perempuan sebagai Pusat Informasi Pengaduan dan Advokasi). Data penambahan jumlah anggota dan struktur organisasi dilaporkan dalam laporan capaian pelaksanaan mandat
- i. Memfasilitasi Rapat Kerja Nasional Koalisi Perempuan Indonesia, Rapat Presidium Nasional Koalisi Perempuan Indonesia, Rapat Dewan Ahli dan Dewan Penasehat Koalisi Perempuan Indonesia. Telah difasilitasi penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional setiap tahun, Rapat Presidium Nasional dilakukan bersamaan dengan Monev dan Rapat Kerja Nasional.
- j. Membuat kebijakan sebagai strategi untuk mengatasi problem hukum, atau rintangan struktural yang menimbulkan masalah dalam pengelolaan dan pertumbuhan organisasi, kebijakan dibuat dalam forum Rapat Kerja Nasional dan upaya-upaya strategis dilakukan sesuai dengan keputusan Rapat Kerja nasional tentang penyelesaian masalah-masalah organisasi.

- k. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Kongres Nasional Koalisi Perempuan Indonesia, termasuk sebagai Panitia Pengarah (*Steering Committee*) maupun Panitia Pelaksana (*Organizing Committee*). Serta Menyusun dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada Kongres Nasional Koalisi Perempuan Indonesia Dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali. Saat ini telah dan sedang dilaksanakan.



LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGURUS NASIONAL KOALISI PEREMPUAN INDONESIA PERIODE 2014-2019

BAB IV

DELAKSANAAN DAN CAPAIAN MANDAT KONGRES NASIONAL IV

A. Mandat Kongres Nasional IV

Kongres Nasional IV Koalisi Perempuan Indonesia yang diselenggarakan pada 8-12 Desember 2014 di Gabusan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menentukan **Garis Besar Kebijakan dan Program Organisasi (GBKPO)** sebagai Berikut:

Visi lima, tahun ke depan Koalisi Perempuan Indonesia adalah berjuang untuk mewujudkan: **Perempuan mandiri dan perempuan memimpin**

Perempuan Mandiri dimaknai sebagai situasi dan kondisi perempuan yang terdidik, memahami hak-hak sebagai warga Negara, mampu mengambil keputusan untuk dirinya serta mampu memperjuangkan kepentingannya, kepentingan sesama perempuan dan kepentingan warga Negara serta menanggulangi permasalahan dan rintangan secara bersama-sama untuk memenuhi kepentingan tersebut.

Sedangkan **Perempuan Memimpin** adalah perempuan yang memiliki pengetahuan dan sikap positif, serta memiliki harapan untuk mencapai suatu perubahan yang lebih baik dan mampu mengajak orang lain untuk bergerak bersama mencapai suatu perubahan yang lebih baik dan lebih adil

Misi periode 2014-2019 :

- Melakukan upaya-upaya Penegakan dan pemenuhan HAM dan HAP adalah : serangkaian upaya atau kegiatan untuk meningkatkan kesadaran anggota dan masyarakat terhadap Hak-haknya, serta mendorong pemerintah untuk menerbitkan kebijakan dan tindakan administratif untuk menjamin terpenuhinya Hak Asasi Manusia dan Hak Asasi Perempuan serta mencegah terjadinya pelanggaran dan Pengabaian terhadap HAM dan HAP
- Memperkuat Anggota dan Organisasi adalah serangkaian upaya atau kegiatan untuk meningkatkan jumlah dan peran anggota serta kelompok kepentingan untuk memperkuat organisasi, serta meningkatkan jumlah struktur organisasi di semua tingkatan dan menjalankan tata kelola organisasi berdasarkan prinsip demokrasi, sehingga anggota dan organisasi Koalisi Perempuan Indonesia menjadi organisasi yang memiliki kemampuan tanggap terhadap perubahan, kredibel dan memiliki pengaruh.
- Peningkatan Kapasitas Anggota adalah meningkatkan pengetahuan, kecakapan khusus, serta mengembangkan lingkungan yang memungkinkan anggota memiliki kepercayaan diri dan militansi sehingga anggota Koalisi Perempuan Indonesia, baik dalam kapasitas individu maupun kelompok memiliki kapasitas kepemimpinan dan kemandirian dalam pengambilan keputusan untuk berperan ruang domestic maupun domestic
- Menjamin Keberlanjutan Organisasi adalah menggalang dan mendayagunakan sumber daya berdasarkan prinsip tata kelola yang transparan dan akuntabel agar organisasi Koalisi

Perempuan Indonesia terus tumbuh dan berkembang serta tetap relevan tata kelola masyarakat Indonesia yang demokratis.

Kebijakan Strategis untuk mencapai Visi:

A. Mengoptimalkan segala sumber daya yang ada

Yaitu mengoptimalkan segala sumber daya yang telah ada setiap dikelompok kepentingan, dan struktur organisasi untuk menjadi perempuan mandiri dan memimpin.

B. Melakukan upaya-upaya untuk memperjuangkan:

I. Hak Asasi Manusia dan Hak Perempuan, terutama

- a) Hak untuk Hidup Layak
- b) Hak Atas Pendidikan
- c) Hak Atas Pangan
- d) Hak Atas Pekerjaan yang Layak
- e) Hak Atas Kesehatan
- f) Hak Atas Tempat Tinggal
- g) Hak Atas Pelayanan Publik
- h) Hak Atas Sumberdaya Alam

II. Demokrasi dan Politik

- a) Hak untuk berorganisasi
- b) Hak atas informasi
- c) Hak untuk ikut dalam perumusan dalam pengambilan keputusan
- d) Hak untuk menduduki posisi politik, posisi strategis, posisi pengambilan keputusan
- e) Hak untuk berekspresi dan menyampaikan pendapat
- f) Mendorong keterwakilan perempuan dalam kepemimpinan partai politik di semua tingkatan.

III. Perlindungan Sosial

- a) Transparansi dan Akuntabilitas penyelenggaraan perlindungan sosial dan pemenuhan Hak atas informasi kebijakan & program perlindungan sosial
- b) Adanya kebijakan afirmasi bagi kelompok minoritas, marginal dan rentan
- c) Kebijakan perlindungan sosial yang menyeluruh, berkeadilan gender dan memberdayakan

IV. Perlindungan Hukum dan Akses Terhadap Keadilan

- a) Memastikan substansi, kultur dan struktur (pelaksana /penegak) hukum berkeadilan gender
- b) Mendorong pemerintah menyediakan layanan / kemudahan memperoleh dokumen legal personal (KTP, Akta nikah, Akta kelahiran, Kartu Keluarga) bagi kelompok miskin, rentan, minoritas dan terpinggir
- c) Perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dan perdagangan orang
- d) Terpenuhinya hak kelompok miskin untuk memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma (probono)
- e) Mendorong dihapusnya kebijakan, tradisi, praktek-praktek kebiasaan yang diskriminatif terhadap anak dan perempuan
- f) Pengakuan terhadap keberadaan Kelompok kepentingan Koalisi Perempuan Indonesia

V. Pembangunan dan Pemberdayaan Perempuan

- a) Meningkatkan pengetahuan perempuan mengenai tujuan, kebijakan, tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, penganggaran, pengawasan dan evaluasi pembangunan, termasuk didalamnya pencegahan korupsi.
- b) Peningkatan kapasitas dan akses perempuan untuk terlibat dalam perencanaan pembangunan (musrenbang di semua tingkatan)
- c) Peningkatan kapasitas dan akses perempuan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pengawasan dan evaluasi pembangunan.
- d) Mengintegrasikan CEDAW (UU No 7 tahun 1984), BPFA (Beijing Platform For Action), Tujuan Pembangunan berkelanjutan (SDG's) dalam kebijakan pembangunan di Indonesia
- e) Memperkuat kapasitas perempuan pedesaan untuk mewujudkan demokrasi, kesetaraan dan keadilan gender dalam rangka pelaksanaan UU Desa.
- f) Peningkatan kapasitas perempuan mengenai pengelolaan SDA dan dampaknya terhadap lingkungan serta kehidupan perempuan
- g) Peningkatan pengetahuan dan kapasitas perempuan terhadap perubahan iklim dan kebencanaan

C. Memperkuat Kapasitas Anggota dan Organisasi Koalisi Perempuan Indonesia, melalui:

I. Tata Kelola Kelembagaan

- a) SOP pengelolaan iuran anggota
- b) Penguatan kapasitas pengurus dalam tata kelola organisasi
- c) Strategi Organisasi untuk memenuhi kebutuhan administrasi kelembagaan dalam hubungannya dengan pemerintah dan lembaga lain (Balai Perempuan, Cabang dan Wilayah)

- d) Koordinasi antar kelompok kepentingan yang sama dan kordinasi antar kelompok kepentingan dalam satu wilayah
- e) Mengembangkan sistem informasi dan komunikasi yang mudah diakses untuk informasi dan komunikasi antar struktur dan kelompok kepentingan
- f) Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan organisasi dan keuangan disemua tingkatan

II. Memperkuat Kelembagaan

- a) Penambahan jumlah anggota dalam Balai Perempuan dan anggota Kelompok Kepentingan
- b) Penambahan struktur Balai Perempuan, Cabang dan Wilayah
- c) Penambahan jumlah kader organisasi dengan berbagai keahlian yang dibutuhkan organisasi (pengorganisasian, advokasi, fasilitator, narasumber, notulen, penggalangan dana)
- d) Data base anggota berbasis Balai Perempuan dan berbasis Kelompok Kepentingan
- e) Memastikan anggota memiliki KTA (Kartu Tanda Anggota)
- f) Kemandirian Pendanaan

D. Peningkatan Kapasitas

- I. Peningkatan kapasitas anggota melalui skema kaderisasi ditekankan pada Balai Perempuan dan Kelompok Kepentingan, melalui : Pendidikan Kader Berjenjang dan pendidikan/pelatihan lain, Pertemuan rutin anggota
- II. Membangun dan menguatkan jejaring kerja organisasi
- III. Peningkatan Kapasitas Advokasi
- IV. Peningkatan kapasitas Kepemimpinan Perempuan
- V. Peningkatan Kapasitas Manajemen Tehnologi Informasi dan Komunikasi
- VI. Peningkatan kapasitas pengorganisasian anggota dan kelompok kepentingan
- VII. Peningkatan kapasitas administrasi organisasi
- VIII. Peningkatan kapasitas riset dan pengelolaan pengetahuan
- IX. Peningkatan kapasitas pengelolaan program dan pelaporan
- X. Peningkatan kapasitas dan penambahan jumlah kader yang siap menduduki posisi strategis dalam pengambilan keputusan.
- XI. Peningkatan kapasitas bagi perempuan yang telah menduduki posisi kepemimpinan

B. Pelaksanaan Mandat Kongres Nasional IV

A. Mengoptimalkan segala sumber daya

Optimalisasi segala sumber daya yang telah ada setiap dikelompok kepentingan, dan struktur organisasi untuk menjadi perempuan mandiri dan memimpin, dilakukan melalui pendidikan kader dan pendidikan kecakapan khusus bagi kader untuk terlibat dalam mekanisme dan proses pengambilan keputusan serta mendorong kader Koalisi Perempuan Indonesia menduduki posisi strategis dalam pengambilan keputusan.

Sejumlah kader Koalisi Perempuan Indonesia menjadi fasilitator desa, kepala desa atau anggota Badan Permusyawaratan desa. Disamping itu, terdapat kader Koalisi Perempuan Indonesia menjadi penyuluh pertanian, pelatih ketrampilan Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) di komunitas kelompok kepentingan nelayan dan komunitas kelompok kepentingan perempuan petani. Terdapat pula kader Koalisi Perempuan Indonesia sebagai pelatih kelompok penyandang disabilitas. Disamping itu, kader Koalisi Perempuan dari Kelompok Kepentingan profesional menduduki posisi sebagai anggota panitia penyelenggara pemilu di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan di tingkat kecamatan. Penyelenggara Pemilu, Komisi Penyelenggara Pemilu (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di tingkat kabupaten dan provinsi. Sejumlah kader Koalisi Perempuan Indonesia juga menduduki posisi di pemerintah dan di lembaga dewan perwakilan rakyat. Beberapa Kader Koalisi Perempuan Indonesia juga menjadi pengurus partai politik.

Sayangnya, pemutakhiran data kader potensial dan kader yang menduduki posisi strategis tidak selalu dapat diperbaharui setiap tahunnya. Hal ini disebabkan oleh karena kesadaran kader untuk menginformasikan kemajuan posisi kepemimpinannya kepada sekretariat, masih sangat kurang. Sehingga sekretariat yang bersangkutan tidak dapat memperbaharui datanya dan menginformasikan kepada sekretariat di atasnya, secara berjenjang.

B. Lakukan Upaya Upaya memperjuangkan Hak

1. Melakukan upaya-upaya untuk memperjuangkan Hak Asasi Manusia

Pembelaan dan perjuangan Hak Asasi Manusia, khususnya : Hak untuk Hidup Layak, Hak Atas Pendidikan, Hak Atas Pangan, Hak Atas Pekerjaan yang Layak, Hak Atas Kesehatan, Hak Atas Tempat Tinggal, Hak Atas Pelayanan Publik, Hak Atas Sumberdaya Alam, dilakukan melalui :

- 1) **Advokasi Stop Perkawinan Anak**, untuk menjamin agar anak-anak perempuan memiliki kesempatan pendidikan dan menikmati masa kanak-kanaknya sehingga mereka dapat menikmati hak pendidikan dan memiliki derajat kesehatan yang baik. Disamping itu diharapkan, anak-anak perempuan ini kelak menjadi perempuan dewasa yang sehat dan memiliki akses terhadap lapangan pekerjaan yang layak dan baik. Advokasi ini telah dilakukan sejak tahun 2010, melalui kampanye perubahan UU No 1 Tahun 1974.

Advokasi tahun 2014 sampai tahun 2019 dilakukan melalui 2 (dua) kali pengajuan uji materi UU No 1 Tahun 1974 ke Mahkamah Konstitusi, Kampanye Nasional di 5 (lima) provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Barat, pengusulan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) dan terakhir perubahan UU No 1 Tahun 1974 melalui Legislasi Nasional oleh DPR RI dan Pemerintah RI.

Hasilnya, pemerintah dan DPR RI mengesahkan RUU Perubahan UU no 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagai Undang-undang pada 16 September 2019. Pada 16 Oktober 2019, undang-undang tersebut disahkan sebagai No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU no 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- 2) Advokasi RUU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.** Sejak awal advokasi, fokus substansi advokasi Koalisi Perempuan adalah pada bab Perlindungan Pekerja Indonesia sejak pra penempatan, masa penempatan dan Pemulangan, khususnya tentang Bantuan Hukum, Kewarganegaraan, dan asuransi sosial serta mengusulkan satu bab khusus untuk penanganan korban perdagangan orang melalui jalur migrasi.

Pada tahun 2016, untuk menguatkan substansi dan media advokasi, Koalisi Perempuan menyusun tiga rekomendasi khusus mengenai:

- i. Perlindungan Pekerja Migran dari Perdagangan Manusia. Koalisi Perempuan meminta Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah merumuskan Satu (1) Bab Khusus untuk mengatur tentang Penanganan kasus dan Perlindungan Korban Perdagangan orang dalam RUU PPILN.
- ii. Bantuan Hukum, khususnya memasukkan jaminan ketersediaan Bantuan Hukum bagi Pekerja Indonesia di Luar Negeri yang menghadapi masalah hukum; serta
- iii. Perlindungan hak-hak kewarganegaraan. Dimana salah satu rekomendasinya adalah Pemerintah Indonesia menyediakan layanan administrasi dan berbagai bentuk kemudahan bagi Warga Negara Indonesia yang bekerja di luar negeri dan terancam kehilangan kewarganegaraannya, untuk tetap mempertahankan kewarganegaraannya melalui pengurusan administrasi yang mudah dan berbiaya rendah

Advokasi ditingkat nasional dilakukan bersama Presidium Nasional KK Perempuan Buruh Migran, sedangkan advokasi di tingkat daerah dilakukan oleh sekretariat wilayah bersama Preswil dan anggota KK Perempuan buruh migran. Koalisi Perempuan Indonesia turut mengawal hingga disahkannya RUU PPMI menjadi Undang-Undang

Hasilnya : RUU PPMI diterima dan disahkan sebagai Undang-Undang pada November 2017 dan diundangkan sebagai Undang –Undang No 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migrant Indonesia.

- 3) Advokasi RUU Perlindungan dan Pemberdayaan nelayan, Budidaya Ikan dan Petambak Garam,** Substansi advokasi difokuskan pada definisi nelayan dan asuransi sosial untuk perempuan nelayan miskin. Sehingga memastikan adanya pengakuan dan perlindungan terhadap perempuan nelayan, perempuan pembudidaya ikan dan perempuan petambak garam. Disamping itu, advokasi ini juga mendorong adanya perlindungan bagi perempuan dalam keluarga nelayan, karena mereka memiliki berbagai bentuk kerentanan dan risiko.

Pengawasan Pembahasan RUU Nelayan di tingkat nasional dilakukan bersama Presidium Nasional dari Kelompok Kepentingan Perempuan Pesisir dan Nelayan.

Hasilnya : RUU ini telah disahkan menjadi Undang-undang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam pada 16 Maret 2016 dan diterbitkan sebagai Undang-Undang No 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam

Beberapa usulan Koalisi Perempuan Indonesia yang diakomodir dalam UU No 7 Tahun 2016 ini adalah:

- iv. Perubahan definisi tentang Nelayan yang menyatakan Nelayan adalah warga negara Indonesia perseorangan yang mata pencahariannya melakukan Penangkapan Ikan, meliputi Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, Nelayan Buruh, dan Nelayan Pemilik. Dan perluasan definisi tentang ikan. Sehingga profesi atau pekerjaan perempuan sebagai nelayan, diakui dalam undang-undang ini.
- v. Beberapa pasal dalam perlindungan dan pemberdayaan bagi nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam menyebutkan tentang perlindungan dan pemberdayaan bagi perempuan (perempuan dalam keluarga nelayan

Catatan : Hingga saat ini masih banyak Perempuan Nelayan yang belum berhasil mengubah jenis pekerjaannya pada KTP sebagai Perempuan Nelayan. Sehingga mereka tidak dapat mengakses program pemberdayaan dan perlindungan sosial bagi nelayan.

- 4) **Advokasi RUU Penyandang Disabilitas** Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Penyandang Disabilitas, termasuk di dalamnya perlindungan sosial bagi perempuan penyandang disabilitas. Koalisi Perempuan Indonesia juga mendukung posisi jejaring Kerja Kelompok Disabilitas, terutama dalam memperjuangkan Kelembagaan untuk pemantauan pelaksanaan UU Penyandang Disabilitas, yaitu pembentukan Komite Nasional Disabilitas (KND).

Pengawasan Pembahasan RUU Penyandang disabilitas ditingkat nasional dilakukan bersama Presidium Nasional dari Kelompok Kepentingan Perempuan Penyandang Disabilitas.

Dukungan Penguatan Opini Publik dilakukan melalui Konsultasi/dialog Publik yang dilaksanakan di Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat dan Bengkulu, dalam kerangka advokasi Perlindungan sosial bagi Kelompok Penyandang Disabilitas.

Hasilnya : RUU ini telah disahkan oleh DPR menjadi UU Penyandang Disabilitas pada 17 Maret 2016, dan diterbitkan sebagai UU NO 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (UU Disabilitas). Sebagai perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, (dalam UU Penyandang Disabilitas dinyatakan) disahkan dan diundangkan pada tanggal 15 April 2016).

- 5) **Advokasi Perlindungan Sosial** Pada semester 1 tahun 2015, Koalisi Perempuan Indonesia telah menyusun Kertas Posisi RUU Perlindungan Sosial “Menuju Perlindungan Sosial yang Inklusif, Adil Gender dan Transformatif”. Perlindungan sosial yang inklusif menekankan pentingnya perlindungan sosial yang melibatkan serta memberikan manfaat yang sama bagi setiap orang, sesuai dengan kebutuhannya. Sementara itu, adil gender adalah laki-laki dan perempuan memiliki akses, partisipasi, kontrol dan mendapat manfaat yang sama atas perlindungan sosial. Koalisi Perempuan juga menekankan pentingnya perlindungan sosial yang transformatif, yaitu ke arah pemberdayaan masyarakat serta pemenuhan hak-hak konstitusional setiap warga negara. Kertas posisi RUU Perlindungan Sosial sudah disampaikan pada anggota DPR-RI, khususnya Fraksi Gerindra (29 Januari 2015); Fraksi Hanura (22 Januari 2015); Fraksi PKB (29 Januari 2015); dan Fraksi Demokrat (10 Februari 2015)

Advokasi RUU Perlindungan sosial juga dilakukan melalui upaya mendorong Bappenas dan Kementerian sosial untuk segera merealisasikan RPJMN, dimana dalam Buku II, khususnya tentang Pemerataan dan Penanggulangan kemiskinan, bagian perlindungan sosial, direncanakan untuk melakukan revisi UU No 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, UU No 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin, dan UU No 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

Namun advokasi ini mengalami berbagai rintangan, anatara lain karena adanya pergantian menteri Sosial dan sejumlah gender champion di komisi IX, dipindahkan ke Komisi lain. Pembahasan pentingnya RUU Perlindungan sosial baru kembali didiskusikan di DPR pada awal tahun 2019.

Advokasi perlindungan sosial untuk pemenuhan hak atas pangan Koalisi Perempuan Indonesia juga melakukan advokasi tentang Raskin, mengusulkan agar bantuan pangan tidak hanya berupa beras, dan dilaksanakan secara fleksibel berdasarkan kebutuhan di tingkat rumah tangga. Usulan Koalisi Perempuan Indonesia ini ditanggapi dengan adanya Rastra (beras Sejahtera- termasuk bahan pokok lainnya) dan Kartu Keluarga Sejahtera dimana keluarga miskin dapat membeli kebutuhan pangannya di toko yang telah bekerja sama dengan kementerian sosial, untuk memenuhi kebutuhan bahan pokoknya.

Hasilnya: RUU Perlindungan dan Bantuan Sosial, baru masuk ke dalam daftar panjang (long list) Prolegnas 2020-2024 dan Prioritas Prolegnas 2020 yang telah disahkan pada Desember 2019.

- 6) **Advokasi Standar Pelayanan Minimal.** Advokasi mendorong Peraturan Daerah tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai implementasi dari Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 100 Tahun 2018 (Permendagri No 100 Tahun 2018) tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Advokasi masih dalam tahap awal, belum semua Cabang dan Wilayah melakukan pengawalan terhadap penyusunan Perda
- 7) **Advokasi RUU Pertanahan.** Advokasi Pertanahan, hanya fokus pada upaya, memasukkan jaminan persamaan Hak atas tanah bagi perempuan dan laki-laki sebagaimana telah dijamin pada pasal 9 UU Agraria. Namun Pengesahan RUU Pertanahan yang

direncanakan akan disahkan pada September 2019 sebagai akibat adanya penolakan publik secara masif.

- 8) **Advokasi RUU Kebidanan** Koalisi Perempuan Indonesia telah menerbitkan Catatan Koalisi Perempuan Indonesia Tentang Prolegnas 2019 yang memberikan kritik terhadap prioritas RUU yang akan dibahas pada tahun 2019 serta kritik terhadap substansi RUU yang telah ada draft nya . Salah satu kritik substansi tersebut adalah kritik terhadap RUU Kebidanan yang hanya mengatur administrasi perijinan dan kelembagaan, tanpa mengatur tentang layanan yang harus diberikan oleh bidan, dan tidak memberikan jaminan pemerataan distribusi bidan untuk daerah terpencil. Disamping itu, tidak ada afirmasi bagi bidan di daerah terpencil dalam mengurus administrasi. Kritik Koalisi Perempuan Indonesia tersebut disampaikan kepada anggota Kaukus Perempuan Parlemen RI dan anggota Komisi IX. Bahan Catatan Perempuan tentang Prolegnas tersebut, kemudian diakomodir oleh DPR dalam pembahasan RUU Kebidanan.
- 9) **Advokasi Akses terhadap Energi Bersih Terbarukan (EBT)**. Advokasi ini dilakukan untuk mendukung tercapainya Hak Atas Hidup Layak, dimana di beberapa desa perempuan masih sangat sulit untuk mengakses energi, terutama energi untuk memasak dan energi listrik untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan penerangan jalan umum.

2. Melakukan upaya-upaya untuk memperjuangkan Demokrasi dan Politik

Advokasi sebagai bentuk upaya pembelaan terhadap Hak untuk berorganisasi, Hak atas informasi, Hak untuk ikut dalam perumusan dalam pengambilan keputusan, Hak untuk menduduki posisi politik, posisi strategis, posisi pengambilan keputusan, Hak untuk berekspresi dan menyampaikan pendapat, Mendorong keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik di semua tingkatan, dilakukan melalui :

- 1) Advokasi Implementasi UU Desa yaitu meningkatkan pengetahuan perempuan pedesaan tentang Hak dan Kewajibannya sebagai warga desa, serta peluang-peluang strategis untuk meningkatkan petan dan kedudukan perempuan pedesaan dalam pembangunan desa, termasuk mendorong perempuan untuk mengikuti Musrenbangdes dan Musdes. Koalisi Perempuan Indonesia juga memperkuat pengetahuan anggota di Balai Perempuan tentang siklus perencanaan dan penganggaran, serta kewajiban pemerintah desa untuk menjangkau aspirasi masyarakat.
- 2) Advokasi Kodifikasi UU Pemilu dilakukan dalam jejaring advokasi Kodifikasi UU Pemilu. Koalisi Perempuan Indonesia hanya mengambil bagian kecil dari advokasi ini, khususnya terkait dengan jaminan keterwakilan perempuan dalam daftar calon legislatif, kepengurusan partai politik dan lembaga penyelenggara pemilu, sistem pemilu dan sistem konversi suara ke kursi yang memungkinkan dan memperkuat keterpilihan perempuan, serta definisi pemilih.
- 3) Advokasi Hak Berorganisasi dilakukan berkaitan dengan diterbitkannya Perppu tentang ormas dan pengurusan status badan hukum organisasi. Termasuk memperjuangkan status badan hukum Koalisi Perempuan Indonesia yang sudah diperjuangkan sejak tahun 2013. Hasilnya, Koalisi Perempuan Indonesia berhasil memperoleh SK

Kementerian Hukum dan HAM tentang Pengesahan Badan Hukum Koalisi Perempuan Indonesia.

- 4) Peningkatan Keterwakilan Perempuan di lembaga Penyelenggara Pemilu dilakukan dengan menginformasikan tahapan rekrutmen anggota Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan anggota komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) serta memberikan surat dukungan dan rekomendasi bagi kader Koalisi Perempuan Indonesia yang telah lolos seleksi administrasi.
- 5) Peningkatan Keterwakilan Politik Perempuan di Parlemen dilakukan melalui serangkaian kegiatan pelatihan bagi Calon Legislatif, pembentukan Tim Pemenangan, Pengawasan Suara melalui Pemantauan Partisipatif dan pemilihan. Hasilnya, dari 215 kader Koalisi Perempuan Indonesia, terdapat 32 kader Koalisi Perempuan Indonesia yang berhasil menjadi anggota legislatif. Dari 1.200 kader Koalisi Perempuan Indonesia yang terdaftar sebagai pengawas Pemilu Partisipatif, sekitar 770 kader menjadi pengawas partisipatif, sedangkan sisanya direkrut oleh partai politik atau calon legislatif untuk menjadi saksi.

3. Melakukan upaya-upaya untuk memperjuangkan Perlindungan Sosial

Advokasi Perlindungan sosial diarahkan pada upaya untuk mewujudkan : 1) Transparansi dan Akuntabilitas penyelenggaraan perlindungan sosial dan pemenuhan Hak atas informasi kebijakan & program perlindungan sosial , 2) Adanya kebijakan afirmasi bagi kelompok minoritas, marginal dan rentan dan 3) Kebijakan perlindungan sosial yang menyeluruh, berkeadilan gender dan memberdayakan.

Untuk mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas penyelenggaraan perlindungan sosial dan pemenuhan Hak atas informasi kebijakan & program perlindungan sosial dilakukan advokasi JKN yang didahului dengan penelitian pelaksanaan Undang-Undang (UU) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), UU Kesehatan, UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Peraturan Pemerintah serta peraturan Presiden tentang Jaminan Kesehatan Nasional. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, ditemukan banyaknya masalah dalam implementasi perlindungan sosial di tingkat layanan administrasi oleh BPJS maupun layanan Kesehatan oleh Instansi Penyedia layanan kesehatan dan rendahnya akses terhadap informasi serta tidak adanya mekanisme penyampaian keluhan.

Untuk memperkuat substansi advokasi Perlindungan Sosial, Koalisi Perempuan Indonesia juga melakukan assessment Perlindungan Sosial berbasis Kelompok Kepentingan.

Berdasarkan hasil penelitian dan assessment tersebut Koalisi Perempuan Indonesia **membangun Balai Perempuan sebagai Pusat Informasi Pengaduan dan Advokasi Jaminan Kesehatan Nasional (BP PIPA JKN)** di 72 (tujuh puluh dua) desa. Pembangunan BP PIPA JKN dimaksudkan untuk mendekatkan akses masyarakat untuk memperoleh informasi dan menyediakan mekanisme keluhan bagi masyarakat yang mengalami masalah dalam memperoleh layanan kesehatan. Disamping itu, di beberapa daerah, BP PIPA JKN ini terhubung dengan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) dan terhubung dengan Tenaga Kesejahteraan tingkat Kecamatan

BP PIPA JKN , kemudian berkembang dan mengalami replikasi dalam bentuk BP PIPA Pencegahan Perkawinan Anak, BP PIPA Pemilu, BP PIPA Energi Bersih Terbarukan (BP PIPA EBT).

Dari hasil kasus-kasus yang diterima oleh BP PIPA JKN Koalisi Perempuan merumuskan konsep baru pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yaitu **JKN Tanpa Kelas, JKN Dual Sistem, JKN Komprehensif, dan JKN Partisipatif**.

Hasilnya: Hingga akhir 2019 terdapat 132 BP PIPA tersebar di 132 desa di 10 Provinsi. Hingga akhir 2019, BP PIPA JKN membantu lebih dari 30.000 (tiga puluh ribu) warga masyarakat miskin memperoleh akses layanan kesehatan. Disamping itu Koalisi Perempuan Indonesia bekerja sama dengan Ombudsman untuk mendorong perbaikan layanan BPJS dan Layanan Kesehatan. Hasil lain yang masih perlu ditindak lanjuti adalah mempromosikan konsep baru Koalisi Perempuan Indonesia tentang **JKN Tanpa Kelas, JKN Dual Sistem, JKN Komprehensif, dan JKN Partisipatif**

4. Melakukan upaya-upaya untuk memperjuangkan Perlindungan Hukum dan Akses Terhadap Keadilan

Upaya untuk memperjuangkan Perlindungan Hukum dan Akses Terhadap Keadilan dilakukan melalui tiga strategi yaitu :

- i. Penyelamatan dan penanganan Korban Perdagangan Orang. Dalam kurun waktu lima tahun sekretariat nasional Koalisi Perempuan Indonesia bekerja sama dengan sekretariat wilayah, jejaring organisasi kementerian sosial dan Kepolisian menggagalkan praktek perdagangan orang terhadap 49 perempuan NTT dan 5 orang asal Sumatera dan Sulawesi.
- ii. Advokasi Korban Perkosaan Kelompok (Gang Rape) kasus Yuyun di Bengkulu.
- iii. Memperbesar Akses perempuan untuk memperoleh surat nikah, KTP dan akte kelahiran melalui kerja sama dengan pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pengadilan. Program terutama dilakukan di beberapa wilayah yang masih banyak warganya yang tidak memiliki E-KTP, surat Nikah dan Akte Kelahiran. Di beberapa daerah terpencil, Koalisi Perempuan Indonesia mendorong adanya layanan terpadu dan jemput bola
- iv. Melakukan Lobby kepada Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan untuk mendorong adanya kebijakan percepatan pelayanan akte kelahiran, khususnya bagi orang tua yang tidak memiliki surat akta nikah, karena tidak adanya akses untuk memperoleh pencatatan perkawinan. Advokasi ini menghasilkan permendagri No 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Cakupan Kepemilikan Akte kelahiran.
- v. Advokasi RKUHP dan JR KUHP untuk mencegah kriminalisasi terhadap perempuan, terutama perempuan yang mengalami ketidakadilan dan menjadi korban tindak pidana.
- vi. Advokasi RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) dilakukan melalui kampanye mendukung pengesahan RUU PKS

5. Melakukan upaya-upaya untuk memperjuangkan Pembangunan dan Pemberdayaan Perempuan.

Upaya memperjuangkan pembangunan dan Pemberdayaan Perempuan, terutama difokuskan melalui :

- 1) Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (Gender Budget) yang diintegrasikan dalam perencanaan penganggaran di tingkat desa. Kegiatan ini dilakukan di 20 desa di NTB, di Jawa Tengah dan di Jawa Timur.
- 2) Pelatihan bagi Pelatih (TOT) anti Korupsi, untuk 80 orang fasilitator dan pelatihan di tingkat komunitas.
- 3) Advokasi Implementasi SDG di tingkat nasional maupun di tingkat Provinsi. Di tingkat nasional Koalisi Perempuan Indonesia menjadi bagian dari Jejaring CSO untuk SDG, melakukan advokasi diterbitkannya Peraturan Presiden, Rencana Aksi Nasional, Penyusunan Definisi Operasional dan Indikator nasional. Di tingkat daerah Koalisi Perempuan Indonesia melakukan advokasi diterbitkannya Rencana Aksi Daerah dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah.
- 4) Memperluas Akses perempuan terhadap tanah dilakukan oleh KK Perempuan Petani yang melakukan advokasi untuk penggunaan lahan desa untuk pertanian ramah lingkungan
- 5) Pengetahuan Perempuan tentang Perubahan Iklim. Peningkatan pengetahuan perempuan tentang perubahan iklim dan peningkatan kapasitas perempuan dalam melakukan mitigasi terhadap perubahan iklim, dilakukan bersamaan dengan program pertanian ramah lingkungan. Namun belum ada kegiatan secara khusus untuk peningkatan pengetahuan. Pembahasan tentang Perubahan Iklim hanya dilakukan karena adanya el nino dan la nina pada saat program pertanian ramah lingkungan akan dilakukan.

C. Memperkuat Kapasitas Anggota dan Organisasi Koalisi Perempuan Indonesia

1. Tata Kelola Kelembagaan

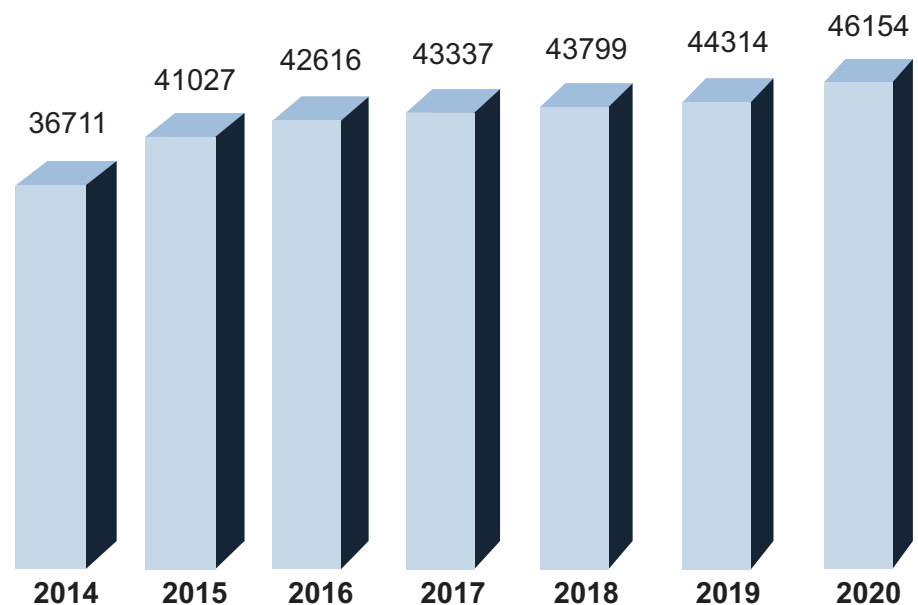
- a) Penyusunan dan Pengesahan SOP pengelolaan iuran anggota dan penggalangan dana publik dalam Rapat Kerja Nasional tahun 2016.
- b) Penguatan kapasitas pengurus dalam tata kelola organisasi dilakukan melalui pelatihan dan orientasi pengurus dan asistensi pengurus dalam pengelolaan organisasi dan pengelolaan konflik. Peningkatan kapasitas ini dilakukan dengan pendekatan khusus untuk masing masing wilayah.

- c) Strategi Organisasi untuk memenuhi kebutuhan administrasi kelembagaan dalam hubungannya dengan pemerintah dan lembaga lain (Balai Perempuan, Cabang dan Wilayah), kegiatan ini dilakukan melalui penyusunan SOP Pengelolaan dana Hibah, pelatihan pencatatan dan pelaporan keuangan, bagi struktur yang menerima program atau bagi yang membutuhkan.
- d) Koordinasi antar kelompok kepentingan yang sama dan koordinasi antar kelompok kepentingan dalam satu wilayah kegiatan ini dilakukan oleh pengurus bersamaan dengan kegiatan-kegiatan advokasi atau kegiatan pengorganisasian atau kegiatan rapat-rapat kerja organisasi (Rakerwil) atau rapat koordinasi program. Beberapa wilayah telah melakukan pertemuan KK Disabilitas, KK Pemuda, Pelajar dan Mahasiswa, KK Ibu Rumah Tangga
- e) Mengembangkan sistem informasi dan komunikasi yang mudah diakses untuk informasi dan komunikasi antar struktur dan kelompok kepentingan, dilakukan melalui pengembangan website, Facebook, Funpage, telegram dan WA Group.
- f) Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan organisasi dan keuangan disemua tingkatan dilakukan melalui Kongres Nasional, Rapat Kerja Nasional, Rapat Kerja Wilayah dan Kongres Wilayah, Rapat Kerja Cabang dan Konferensi Cabang dan Rembug Balai Perempuan

2. Memperkuat Kelembagaan

- a) Penambahan jumlah anggota dalam Balai Perempuan dan anggota Kelompok Kepentingan. Penambahan Jumlah anggota Koalisi Perempuan Indonesia sejak 2015 hingga 2019 mencapai 9.443 orang, sebagaimana dalam grafik di bawah .

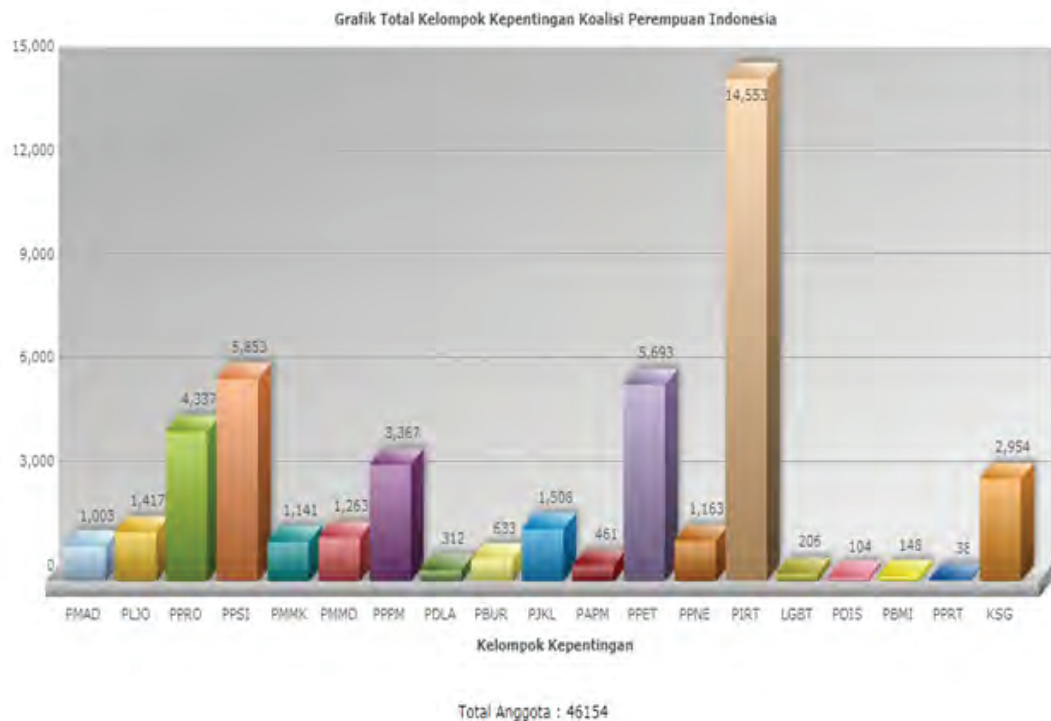
GRAFIK PERTAMBAHAN ANGGOTA



Pertambahan anggota berbasis Kelompok kepentingan menunjukkan ketimpangan. Dilihat dari jumlah anggota, kelompok kepentingan (KK) Perempuan Ibu Rumah Tangga menduduki posisi paling atas yaitu berjumlah 14.553 orang, urutan ke dua

adalah KK Perempuan Pekerja Informal berjumlah 5.853 orang, urutan ke tiga adalah KK Perempuan Petani berjumlah 5.693 orang, urutan ke empat adalah KK Perempuan Profesional berjumlah 4.357 orang dan urutan ke lima adalah KK pemuda Pelajar dan Mahasiswa berjumlah 3.367 orang. Selebihnya tidak mengalami perkembangan secara signifikan, dengan jumlah di bawah tiga ribu orang. Kelompok kepentingan yang stagnan dan tidak mengalami peningkatan jumlah adalah Perempuan Pekerja Rumah Tangga, Perempuan Penyandang Disabilitas dan Perempuan Buruh Migrant. Disamping itu, masih terdapat 2.954 anggota yang belum menentukan kelompok kepentingannya.

Grafik Kelompok Kepentingan Koalisi Perempuan Indonesia



KETERANGAN:

No	Kode	Kelompok Kepentingan
01	PMAD	Perempuan Masyarakat Adat
02	PLJO	Perempuan Lansia (lanjut usia) dan Jompo
03	PPRO	Perempuan Profesional
04	PPSI	Perempuan Pekerja Sektor Informal
05	PMMK	Perempuan Masyarakat Miskin Kota
06	PMMD	Perempuan Masyarakat Miskin Desa
07	PPPM	Pemuda, Pelajar dan Mahasiswa
08	PDLA	Perempuan yang Dilacurkan (Pedila)
09	PBUR	Perempuan Buruh
10	PJKL	Perempuan Janda, Perempuan Kepala Keluarga dan Perempuan Lajang
11	PAPM	Anak Perempuan Marginal
12	PPET	Perempuan Petani
13	PPNE	Perempuan Pesisir dan Nelayan
14	PIRT	Perempuan Ibu Rumah Tangga
15	LGBT	Lesbian, Biseksual dan Trans-gender
16	PDIS	Perempuan Disabilitas
17	PBMI	Perempuan Buruh Migrant
18	PPRT	Perempuan Pekerja Rumah Tangga
19	KSG	Kosong



b) Penambahan struktur Balai Perempuan, Cabang dan Wilayah

Struktur	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Tambah
Balai Perempuan	917	977	1.042	1.051	1.100	1.118	201
Cabang	120	130	157	177	183	202	82
Wilayah	14	14	14	15	15	15	1

c) Penambahan jumlah kader organisasi dengan berbagai keahlian yang dibutuhkan organisasi (pengorganisasian, advokasi, fasilitator, narasumber, notulen, penggalangan dana)

Peningkatan Kapasitas Kader Tahun 2014

Capaian dari Penguatan Organisasi
 Peningkatan Kapasitas Kader

No	Program/kegiatan	Jumlah Penerima Manfaat
1	Pendidikan Kader Dasar (PKD)	8.185
2	Pendidikan Kader Menengah (PKM)	128
3	Pendidikan Kader Lanjut	39
4	TOT Pendidikan Pemilih	113
5	Pendidikan Kewarganegaraan/ Pendidikan Pemilih	4,859
6	Pendidikan HAM dan Gender Bagi Pedula	864
7	TOT Fasilitator PKD	26
8	Fasilitator	65
9	TOT Fasilitator Pendidikan Anti korupsi	80
10	Pelatihan Perempuan Melawan Korupsi	886

No	Jenis Pendidikan	2014	2019	Total
1	Pendidikan Kader Dasar	8.185	7.073	15.258
2	Pendidikan Kader Menengah	128	117	245
3	Pendidikan Kader Lanjut	39	37	76
4	Pendidikan CO	-	106	106
5	Pelatihan Keuangan Keluarga	-	88	88
6	Pelatihan Dasar Koperasi	-	182	182
7	Pelatihan Pembuatan Kompos	-	347	347
8	Pelatihan Rumah Produksi	-	81	81
9	Pelatihan penyusunan Dokumen advokasi	-	28	28
10	Pelatihan Advokasi	-	60	60
11	Pelatihan Fasilitator (TOF)	26	30	56
12	TOT dan uji booklet Pendidikan Pencegahan Extremisme		30	30
13	Pelatihan Pemenangan Caleg			
14	Pendidikan Pemilih			
15	Pelatihan Menyusun Kebijakan Publik untuk Anggota Legislatif		30	
16	Pelatihan Pengelolaan BP PIPA JKN dan BP PIPA PPA (Penghentian Perkawinan Anak)			

- d) Memastikan anggota memiliki KTA (Kartu Tanda Anggota). Pencetakan KTA terus dilakukan, bagi wilayah yang telah melakukan update data anggota. Namun belum semua wilayah melakukan Update data anggota.
- e) Kemandirian Pendanaan masih menjadi masalah, sebagian besar program dan kegiatan masih ditopang oleh penyandang dana. Iuran belum berjalan sebagaimana mestinya. Pengembangan Usaha organisasi melalui Rumah Produksi, masih dalam tahap uji coba.

D. Peningkatan Kapasitas

Peningkatan kapasitas dilakukan melalui berbagai bentuk pendidikan dan pelatihan yaitu :

1. Pendidikan Kader Berjenjang:

PKD, PKM dan PKL

PKD Khusus untuk Kelompok Kepentingan PPM, Ibu Rumah Tangga, Disabilitas

2. Pelatihan - pelatihan:

2.1. Pelatihan CO

CO Pencegahan Perkawinan Anak

CO Pertanian Ramah Lingkungan

CO Penggalangan dan Pembentukan Organisasi Perempuan di Tingkat Desa

2.2. Pelatihan Advokasi

Pencegahan Perkawinan Anak untuk Remaja

Pencegahan Perkawinan Anak untuk Orang Tua/Toga /Toma dan Tokoh Politik

Memperbesar akses perempuan terhadap Energi Bersih Terbarukan

2.3. Pelatihan Dasar Koperasi

2.4. Pelatihan Keuangan Keluarga

2.5. Pelatihan manajemen usaha

2.6. Pelatihan pertanian ramah lingkungan

2.7. Pelatihan Penulisan Dokumen Advokasi, Kertas Posisi

2.8. Pendidikan Pemilih

2.9. Pelatihan Pemenangan Caleg

2.10. Pelatihan Menyusun Kebijakan Publik untuk Anggota Legislatif

2.11. Pelatihan Pengelolaan BP PIPA JKN dan BP PIPA PPA (Penghentian Perkawinan Anak)

2.12. Pelatihan Fasilitator Anti Intoleransi, Anti Ekstrimisme dan Anti Terorisme

2.13. Pelatihan Fasilitator PKD

A. Jejaring Kerja

Selama kurun waktu lima tahun, dalam melaksanakan mandate organisasi, Sekretariat nasional melakukan kerja jejaring /sinergi berbasiskan isu-isu yang diadvokasi, yaitu :

1. Advokasi Hak Perempuan

Advokasi Hak Perempuan dalam bentuk pemantauan implementasi CEDAW dan Beijing Platform for Action (BPFA) dilakukan bersama: Cedaw Working Group Initiative (CWGI), Kalyanamitra, Yayasan Kesehatan Perempuan, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), Kapal Perempuan, AMAN Indonesia, Solidaritas Perempuan.

2. Advokasi Prolegnas

- a. Advokasi RUU Kesenjangan dan Keadilan Gender (RUU KKG), dan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dilakukan dalam jejaring JKP3 (Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan) dan Komnas Perempuan
- b. Advokasi RUU Perlindungan Nelayan, dilakukan berjejaring dengan Kiara

- c. Advokasi RUU Perlindungan Pekerja Migran dilakukan berjejaring dengan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) dan Migrant CARE
- d. Advokasi RUU Penyandang Disabilitas, dilakukan berjejaring dengan Himpunan Wanita penyandang Disabilitas Indonesia (HWDI), PPCI dan Jejaring organisasi penyandang disabilitas, termasuk bekerja sama dengan Pokja RUU Disabilitas serta organisasi non disabilitas pendukung RUU Penyandang Disabilitas seperti ELSAM dan Koalisi Reformasi Hukum Nasional (KRHN)
- e. Advokasi RKUHP dilakukan dengan jejaring dalam Aliansi Reformasi RKUHP
- f. Advokasi RUU Kepemiluan dilakukan berjejaring dengan Jaringan Kodifikasi UU Pemilu dan Perludem
- g. Advokasi RUU Pertanahan dilakukan berjejaring dengan Solidaritas Perempuan

3. Advokasi Peningkatan Keterwakilan Perempuan

Dilakukan bersama Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPPRI), Perludem dan Maju Perempuan Indonesia (MPI). Di beberapa wilayah Koalisi Perempuan Indonesia, khususnya di Indonesia bagian timur, dilakukan berjejaring dengan Bhakti

4. Advokasi Pencegahan Perkawinan Anak

Advokasi Pencegahan Perkawinan Anak dilakukan dengan beberapa Jejaring kerja yaitu Koalisi 18+, Gerakan Bersama (Geber) Stop Perkawinan Anak, Creating Space, Jaringan Aksi serta jaringan Mitra MAMPU. Koalisi Perempuan Indonesia juga berjejaring dengan Kaukus Perempuan Parlemen RI (KPPRI) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Kementerian Agama dan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk mendorong perubahan Kebijakan usia perkawinan

5. Perlindungan Sosial

Advokasi Perlindungan Sosial dan Perbaikan Pelayanan Publik dilakukan bersama jejaring MP3 (Masyarakat Peduli Pelayanan Publik) dan untuk kebijakan perlindungan sosial berjejaring dengan mitra MAMPU yaitu Pekka dan Kapal Perempuan

6. Implementasi SDG

Advokasi Implementasi SDG dilakukan berjejaring dengan INFID, CSO Indonesia for SDG, Mitra MAMPU, dan Oxfam. Bersama sama dengan Jejaring Kerja Koalisi Perempuan Indonesia berjejaring dengan Kantor Staf Presiden (KSP) dan Bappenas untuk mendorong implementasi SDG yang partisipatif.

7. Implementasi UU Desa

Advokasi Implementasi UU Desa dilakukan berjejaring dengan IRE, CCES, Lakpesdam NU dan Mitra Wacana. Disamping itu Koalisi Perempuan Indonesia juga berjejaring dengan Kementerian Desa untuk perubahan Kebijakan Implementasi UU Desa yang responsif Gender.

8. Energi Terbarukan

Advokasi akses Perempuan terhadap energi terbarukan dilakukan melalui jejaring dengan YLKI, IESR, Hivos dan Jejering S-P Energi

9. Promosi Keberagaman dan Pencegahan Intoleransi serta Ekstremisme

Promosi Keberagaman dan Pencegahan Intoleransi serta Ekstremisme dilakukan melalui jejaring dalam Indonesia Beragam, Wahid Institute, Rahima dan KUPI. Disamping itu Koalisi Perempuan Indonesia juga bekerja sama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk mendorong pelibatan perempuan dan organisasi perempuan dalam pencegahan intoleransi dan ekstremisme

B. Analisis Capaian

Dari laporan capaian tersebut diatas terdapat beberapa hal penting yang perlu menjadi catatan yaitu :

1. Koalisi Perempuan Indonesia telah melakukan intervensi terhadap 10 (sepuluh) Rancangan undang-undang
2. Sebanyak 7 telah berhasil diintervensi dan telah disahkan
3. Sebanyak 2 Rancangan undang-undang (RUU PKS dan RKUHP) telah dibahas, tetapi usulan Koalisi Perempuan Indonesia belum diakomodir
4. Sebanyak 1 Undang-Undang yaitu RUU Perlindungan dan Bantuan Sosial baru masuk Prolegnas 2020
5. Penambahan anggota ditargetkan sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) orang namun hanya tercapai sebanyak 9.443
6. Penambahan Balai Perempuan dan Cabang ditargetkan setiap wilayah bertambah 3 Balai Perempuan dan 1 Cabang setiap tahun, tidak semuanya mengalami penambahan.

7. Kemandirian organisasi masih menjadi masalah serius, karena iuran dan usaha yang sah belum berjalan sebagaimana mestinya .

C. Keuangan (Terlampir)

Laporan keuangan disampaikan dalam lampiran



LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGURUS NASIONAL KOALISI PEREMPUAN INDONESIA PERIODE 2014-2019

BAB V

REFLEKSI, PREDIKSI 5 TAHUN KE DEPAN DAN REKOMENDASI

A. Refleksi

Catatan refleksi selama 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut :

- Dalam kurun waktu lima tahun telah terjadi kemajuan dalam pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender. Namun tingkat kekerasan terhadap perempuan masih tetap tinggi dan ketimpangan gender masih terus berlanjut. Ketimpangan gender terbesar terjadi di bidang ekonomi dan bidang politik.
- Koalisi Perempuan Indonesia telah memberikan sumbangan dalam proses dan hasil penyusunan kebijakan publik yang adil gender, terkait UU perlindungan dan pemberdayaan nelayan, budidaya ikan dan petambak garam, UU Perlindungan perkerja Migran, UU Penyandang Disabilitas dan UU perubahan UU Perkawinan. Namun Implementasi terhadap undang-undang tersebut masih dihadapkan pada berbagai tantangan
- Inovasi-innovasi yang dilaksanakan pada periode 2009-2014 tetap dilanjutkan seperti: Penyelenggaraan Media Award , Pendidikan Kader berbasis Kelompok Kepentingan, Riset Aksi, Advokasi berbasis Bukti (hasil riset Aksi) , Balai Perempuan sebagai Pusat Gerakan Perempuan, Peringatan Hari Internasional Perempuan Pedesaan, Laporan Unversal Periodic review dan Laporan CEDAW
- Inovasi periode 2014-2019 tetap dilanjutkan sebagai strategi antara lain: Pendidikan Ketrampilan untuk mendukung kelompok kepentingan, Balai Perempuan sebagai Pusat Informasi Pengaduan dan Advokasi (PIPA) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai perwujudan Balai Perempuan sebagai Pusat Gerakan Perempuan di Desa dan Replikasi BP PIPA JKN menjadi BP PIPA Energi Bersih Terbarukan, BP PIPA Pemilu, BP PIPA Pertanian Ramah Lingkungan, BP PIPA Kebencanaan dan BP PIPA Pencegahan Perkawinan Anak.
- Koalisi Perempuan Indonesia memberikan perhatian terhadap Isu baru : SDG, Pertanian Ramah Lingkungan, Akses Perempuan terhadap Energi Bersih Terbarukan (EBT), Pencegahan Ekstremisme dan Pengembangan Budaya Damai
- Program dan Dukungan Donor:
 - **KOMPAK** : Akuntabilitas Sosial dan Partisipasi Kelompok Rentan dalam Pembangunan Desa ,

dilaksanakan di di wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Barat

- **Akses terhadap Keadilan** didukung oleh WJP (World Justice Project) dan Creating Space (Oxfam Canada): dilaksanakan di wilayah Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat
- **CSO-LA-SDG** (EU melalui Oxfam), dilaksanakan di wilayah NTT dan cabang Dompus NTB
- **Akses Perempuan Terhadap Energi Bersih Terbarukan (EBT)** (Hivos), dilaksanakan di Cabang Salatiga dan Kabupaten Semarang, Jawa Tengah
- **Gender Justice (Oxfam Aus)**, dilaksanakan di Provinsi NTT dan NTB
- **ACCES** : dilaksanakan di NTT dan di NTB
- **IKAT –Power**, Peningkatan Keterwakilan Politik Perempuan (USAID-melalui Kemitraan), dilaksanakan di tingkat Regional dan di wilayah Sumatera Barat dan Aceh
- **Kemakmuran Hijau (MCAI)**, dilaksanakan di NTT dan di NTB
- **Perlindungan Sosial, SDG, GBV dan Penghapusan Perkawinan Anak** dilaksanakan dalam Program MAMPU -Kerja Sama Pemerintah Australia-Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (DFAT melalui Cowater) di 8 Wilayah Koalisi Perempuan Indonesia yaitu di: Aceh, Bengkulu, DI Yogyakarta, Jambi, Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah
- **Pembangunan dan Perdamaian** (Development and Peace), dilaksanakan di Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan
- **Pemberdayaan Perempuan Pedesaan** (The Asia Foundation) di Jawa Barat dan NTB
- **Pemberdayaan Kelompok Perempuan** (ICCO) dilaksanakan di Bali dan Maluku Utara

B. Prediksi 5 Tahun Ke Depan

Dalam lima tahun ke depan akan terjadi :

1. Gagasan Perubahan Konstitusi secara parsial sampai dengan gagasan kembali ke UUD 1945
2. Pembahasan RUU Pemilu, dimana sebagian politisi mendorong sistem pemilu tertutup dan ke arah penyederhanaan jumlah partai politik, mengakhiri pilkada dan PILPRES langsung
3. Pembahasan RUU Perlindungan dan Bantuan Sosial

4. Pembahasan beberapa RUU yang berpotensi mendomestikasi Perempuan dan memperkuat cara pandang patriarki
5. Adanya gagasan Pemerintah terkait moderasi beragama dihadapkan dengan penguatan ekstremisme
6. Tanda-tanda akan terjadinya krisis ekonomi di tingkat global akan berdampak terjadinya krisis ekonomi di tingkat nasional, digitalisasi ekonomi yang menggusur peluang kerja perempuan. Disamping itu pilihan pemerintah untuk memperkuat investasi asing akan berdampak penurunan kualitas lingkungan serta ketidakpastian keamanan kerja bagi pekerja, khususnya pekerja perempuan, karena kebijakan fleksibilitas pasar kerja.

C. Rekomendasi

- a. Koalisi Perempuan Indonesia perlu menentukan posisi politiknya terhadap perubahan yang akan terjadi dalam lima tahun yang akan datang
- b. Koalisi Perempuan Indonesia perlu memprioritaskan Kemandirian organisasi untuk memastikan keberlanjutan organisasi
- c. Koalisi Perempuan Indonesia perlu mengambil keputusan terhadap Kelompok Kepentingan yang stagnan dan tidak mengalami perkembangan
- d. Koalisi Perempuan Indonesia perlu memperkuat Kelompok Kepentingan dalam Koalisi Perempuan Indonesia yang paling rentan dan paling menentukan untuk mewujudkan masyarakat yang inklusif seperti : KK masyarakat Adat, KK Disabilitas, KK PRT, KK Pedula, KK anak Margninal, KK Lansia dan KK LBT.

Demikian laporan ini disampaikan kepada Forum Kongres Nasional V Koalisi Perempuan Indonesia

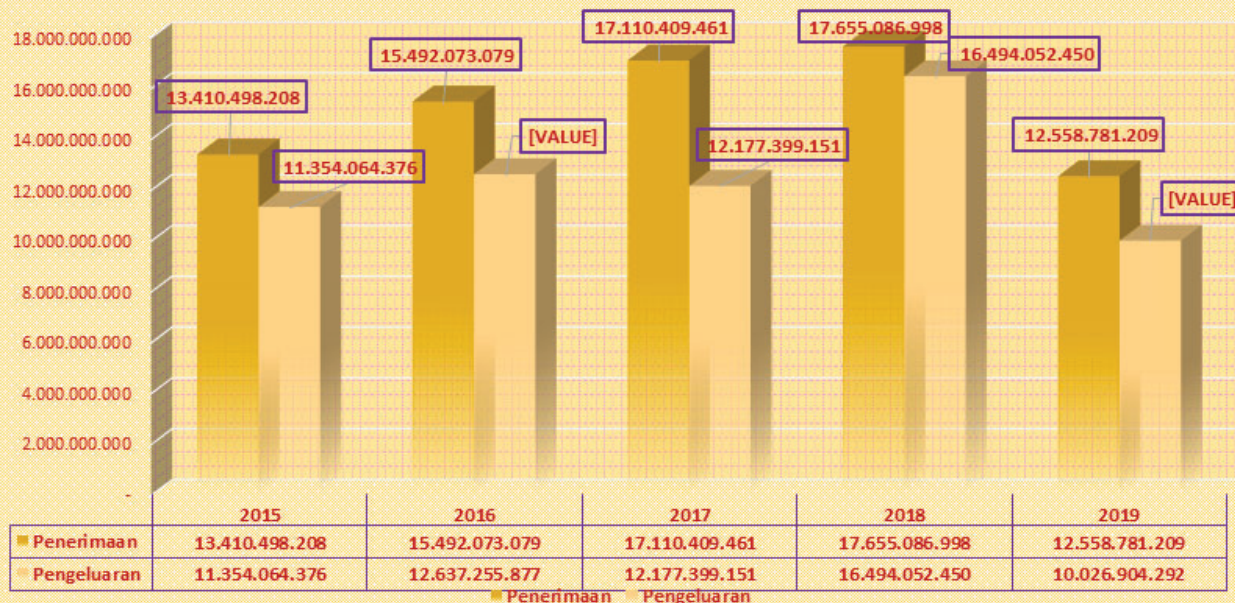
LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA TAHUN 2015 - 2019

NO	KETERANGAN	TAHUN					TOTAL
		2015	2016	2017	2018	2019	
1.	Saldo Awal kas & bank	4,594,482,515	1,102,863,350	3,127,084,381	4,294,474,146	2,139,552,320	15,258,456,712
2.	Penerimaan						
	* Donor :						
	- Mampu	5,944,574,256	9,715,939,271	4,378,281,298	5,386,077,491	5,787,489,374	31,212,361,690
	- Mampu - GMS		(88,330,656)				(88,330,656)
	- Oxfam - GI	923,306,401	483,798,545	648,992,240	13,899,245		2,069,996,431
	- ICCO		(1,057,143,883)				(1,057,143,883)
	- SMALL GRANT	384,902,575	177,162,600		129,974,540		692,039,715
	- D&P	1,101,376,264	1,015,197,507	368,270,453	584,836,066	209,212,728	3,278,893,018
	- Oxfam - CSOLA		746,380,245	1,313,142,762	2,215,055,424	554,126,497	4,828,704,928
	- Oxfam - Creating Space			1,544,475,000	2,004,600,000	1,758,390,000	5,307,465,000
	- HIVOS		265,781,500	148,808,855	432,321,888	331,036,000	1,177,948,243
	- MCAI		1,448,710,476	2,510,152,460	(609,160,909)		3,349,702,027
	- KOMPAK		104,420,765	1,171,269,146	305,719,021		1,581,408,932
	* Internal :						
	- Program, Staff & anggota	405,187,970	1,539,973,753	1,842,226,098	2,852,094,279	1,752,516,857	8,391,998,957
	- Iuran Anggota			127,400		301,000	428,400
	- Fund Raising - Sumbangan pihak ke-3	3,270,000	3,440,000	1,298,000	325,000		8,333,000
	* Bunga/Jasa Giro Bank :	53,398,227	30,629,606	56,281,368	44,870,807	25,006,434	210,186,442
	Total (saldo awal + penerimaan)	13,410,498,208	15,492,073,079	17,110,409,461	17,655,086,998	12,558,781,209	76,226,848,955
3	Pengeluaran						
	* Program & Institusional						
	- Mampu	9,157,525,216	7,316,091,772	4,166,965,303	7,426,393,884	3,985,905,458	32,052,881,633
	- Mampu - GMS	348,119,508					348,119,508
	- Oxfam - GI	999,854,808	910,177,595	496,636,644			2,406,669,047
	- SMALL GRANT	119,765,150	110,138,200	40,476,625	129,972,000	127,348,420	527,700,395
	- D&P	725,526,378	1,314,509,923	46,620,500	586,912,869	328,305,180	3,001,874,850
	- Oxfam - CSOLA		444,061,662	1,392,209,324	1,927,441,128	992,591,305	4,756,303,419
	- Oxfam - Creating Space			741,768,920	1,417,642,889	2,169,609,881	4,329,021,690
	- HIVOS			265,024,415	386,029,646	493,003,299	1,144,057,360
	- MCAI		748,712,928	1,914,849,750	695,213,802	-	3,358,776,480
	- KOMPAK		62,006,000	945,698,489	574,487,561	-	1,582,192,050
	- INTERNAL		1,720,584,910	2,149,991,324	3,335,535,800	1,921,137,898	9,127,249,932
	* Biaya pengeluaran/adm bank	3,273,316	10,972,887	17,157,857	14,422,871	9,002,850	54,829,781
	Total Pengeluaran	11,354,064,376	12,637,255,877	12,177,399,151	16,494,052,450	10,026,904,292	62,689,676,146

SALDO DANA PER 31 JANUARI 2020

1	KAS KONSOLIDASI	37,742,158.27
2	BANK INTERNAL	72,296,031.67
	- MANDIRI SYARIAH : 26570044444	2,238,036.46
	- MANDIRI SYARIAH : 2657004949	45,466,103.28
	- BNI : 0368711585	19,639,322.00
	- Mandiri Giro: 126-00-0606391-0	1,992,153.93
	- BNI : 0473800633	2,960,416.00
3	BANK PROGRAM	1,825,794,773.02
	- MNC Cab Kelapa Gading : 100010000006641(D&P)	68,322,574.92
	- Mandiri : 124-0007769079 (Creating Space)	445,197,361.15
	- BNI :0240653002 (MAMPU)	1,052,202,442.00
	- Mandiri :124-0007531792 (OXFAM - CSOLA)	70,241,235.63
	- Mandiri : 124-0007589527 (HIVOS)	189,831,159.32
SALDO DANA di KAS & BANK per 31 JANUARI 2020		1,935,832,962.96

TABEL PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PERIODE TAHUN 2015 - 2019



KOALISI PEREMPUAN INDONESIA

LAPORAN POSISI KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016
(Dalam Rupiah)

KOALISI PEREMPUAN INDONESIA

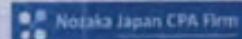
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
AS OF DECEMBER 31, 2017 AND 2016
(Expressed in Rupiah)

	Dec 31, 2017	Catatan/Notes	Dec 31, 2016	
	IDR		IDR	
AKTIVA				ASSETS
AKTIVA LANCAR				CURRENT ASSETS
Kas dan Setara Kas	4.294.474.146	1a	3.127.084.381	Cash and Cash Equivalent
Piutang	356.502.387	1b	523.267.398	Account Receivable
Utang Muka Program	1.517.253.213	1c	797.807.698	Program Advances Payment
Jumlah aktiva lancar	6.168.229.746		4.448.159.476	Total Current Assets
AKTIVA TIDAK LANCAR				NON CURRENT ASSETS
Aktiva Tetap		1d		Fixed Assets
Harga Perolehan	1.893.886.440		1.871.839.753	Acquisition Cost
Akumulasi Penyusutan	(884.749.147)		(795.887.907)	Accumulated Depreciation
Nilai Buku	1.009.137.293		1.075.951.851	Book Value
Jumlah aktiva tidak lancar	1.009.137.293		1.075.951.851	Total non Current Assets
JUMLAH AKTIVA	7.177.367.041		5.524.111.327	TOTAL ASSETS
KEWAJIBAN DAN AKTIVA BERSIH				LIABILITIES AND NET ASSETS
KEWAJIBAN LANCAR				LIABILITIES
Hutang	306.427.984	2a	437.104.108	Account Payable
Jumlah Kewajiban Lancar	306.427.984		437.104.108	Total Current Liabilities
AKTIVA BERSIH				NET ASSETS
Aktiva Bersih Tidak Terikat	1.756.606.843	3a	2.062.329.541	Unrestricted Net Assets
Aktiva Bersih Terikat	5.114.332.214	3b	3.004.677.677	Restricted Net Assets
Jumlah Aktiva Bersih	6.870.939.057		5.067.007.219	Total Net Assets
JUMLAH KEWAJIBAN DAN AKTIVA BERSIH	7.177.367.041		5.524.111.327	TOTAL LIABILITIES AND NET ASSETS

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini
See the accompanying notes which are an integral part of the financial statements.



ACHMAD, RASYID, HISBULLAH & JERRY
REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS
KANTORPUSAT : NIU.KAP : 586/KM.I/2007
Member of : Nozaka Japan Certified Public Accountant Firm



Pusat : Jl. Kupu Barai No. 90-91 B Kemayoran Jakarta Pusat Telp. : 021 - 4247872, 4264971 Fax : 021 - 4249080
website : www.kaprhj.com, E-mail : kap_rhjj@yahoo.co.id
Cabang : Jakarta Mampang, Bandung & Semarang

diebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut pendapat kami, laporan keuangan terlampir yang kami sebutkan diatas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Koalisi Perempuan Indonesia-KPI tanggal 31 Desember 2017, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the financial position of Koalisi Perempuan Indonesia-KPI as of December 31, 2017 its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS
ACHMAD, RASYID, HISBULLAH & JERRY



Abdul Rasyid, SE, Ak, MSI, CA, CPA
NRAP. AP.0074/Public Accountant
Registration Number AP.0074

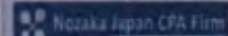
Jakarta, September 03, 2018



ACHMAD, RASYID, HISBULLAH & JERRY
REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS
KANTOR PUSAT : NIU. KAP : 586/KM.I/2007

Member of : Nozaka Japan Certified Public Accountant Firm

Alamat : Jl. Kapu Ilir No. 95-91 B Kemayoran Jakarta Pusat Telp. : 021-4247672, 426-4971 Fax : 021-4240080
Website : www.kaperry-ahj.com, E-mail : kap_ahj@yahoo.co.id
Cabang : Jakarta Kebayoran, Bandung & Semarang



LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

No: 18/ARHJ-RD/HERS-KPI/GA/04.17

Sekretaris Jenderal
Koalisi Perempuan Indonesia (KPI)

Kami telah mengaudit laporan keuangan Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2016 serta laporan aktivitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

Number: 18/ARHJ-RD/HERS-KPI/GA/04.17

General Secretary
Koalisi Perempuan Indonesia (KPI)

We have audited the accompanying financial statements Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) which comprise the financial statements as of December 31, 2016 the related statement of activities, and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

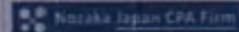
Auditor's responsibility

Our responsibility is to express an opinion on such financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.



ACHMAD, RASYID, HISBULLAH & JERRY
REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS
KANTOR PUSAT : NIU. KAP : 586/KM.LI/2007



Member of : Nozaka Japan Certified Public Accountant Firm
Pasat : J. B. Kupu Baras No. 90-91 II Kemayoran Jakarta Pusat Telp. : 021-4247072, 4264971 Fax : 021-4240080
Website : www.kaperry-rhj.com, E-mail : kap_ahj@yahoo.co.id
Cabang : Jakarta Kebayoran, Bandung & Surabaya

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini
Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir yang kami sebutkan diatas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) tanggal 31 Desember 2016, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion
In our opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the financial position of Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) as of December 31, 2016 its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS
ACHMAD, RASYID, HISBULLAH & JERRY



DR. Achmad R.K. Ak. MM. CPA. CA
NRAP AP.0102/Public Accountant Registration Number AP.0102

Jakarta, 20 April, 2017/April 20, 2017

Laporan keuangan terlampir tidak dimaksudkan untuk menyajikan posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas sesuai dengan prinsip dan praktik akuntansi yang berlaku umum di negara dan wilayah hukum selain Indonesia akuntansi. Standar, prosedur dan praktik untuk mengaudit laporan keuangan tersebut adalah yang berlaku umum dan diterapkan di Indonesia.

The accompanying financial statements are not intended to present the financial position, result of operations and cash flows in accordance with accounting principles and practices generally accepted in countries and jurisdictions other than Indonesia. The standards, procedures and practices to audit such financial statements are those generally accepted and applied in Indonesia.

Lampiran :

Surat Keputusan Pengurus Nasional Priode Tahun 2015-2019

Surat Keputusan Tahun 2015	Surat Keputusan Tahun 2016
<ol style="list-style-type: none">1. SK No :001/SK/Rakernas I/II/2015 tentang Hasil-hasil Rapat Kerja Nasional I Tahun 2015.2. SK No :002/SK/Rakernas I/II/2015 tentang Tindaklanjut Mandat Kongres nasional IV Koalisi Perempuan Indonesia3. SK No :003/SK/Rakernas I/II/2015 tentang Standar Operasional Bencana4. SK No :004/SK/Rakernas I/II/2015 tentang Standar Operasional Perlindungan Anak5. SK No :005/SK/Rakernas I/II/2015 tentang Logical Framework Analisis (LFA) Tahun 2014-20196. SK No :006/SK/Rakernas I/II/2015 tentang Pengesahan Tindaklanjut AD/ART Pergantian antar waktu , tata cara pengaduan dan penyelesain konflik serta Dewan Kode Etik.	<ol style="list-style-type: none">1. SK No :001/SK/Rakernas II/I/2016 tentang Hasil Kerja Nasional 20162. SK No :002/SK/Rakernas II/I/2016 tentang Kelompok Kerja (POKJA)3. SK No :003/SK/Rakernas II/I/2016 tentang Prosedur Operasional Standar.
<p>Surat Keputusan Pengurus Nasional</p> <ol style="list-style-type: none">1. SK No : 001/SK/PENAS/I/2015 tentang Dewan Kode Etik Penyelesain Konflik Koalisi Perempuan Indonesia Wilayah Sulawesi Nasional2. SK No : 002/SK/PENAS/I/2015 tentang Pengelolaan Sekretariat Wilayah Sulawesi Tenggara oleh Sekretariat Nasional3. SK No : 003/SK/PENAS/I/2015 tentang Kongres Nasional IV Koalisi Perempuan Indonesia No 008/SK/XII/2014 tentang Pengesahan Presedium Nasional.	<p>Surat Keputusan Pengurus Nasional</p> <ol style="list-style-type: none">1. SK No :001/SK/MONEV-I/VII/2018 tentang Perpindahan Kelompok Kepentingan

Surat Keputusan Tahun 2017

1. SK No :001/SK/Rakernas III/I/2017 tentang Hasil – hasil Rapat Kerja Nasional Tahun 2017
2. SK No :002/SK/Rakernas III/I/2017 tentang Standar Operasional Pembayaran dan pengelolaan Uang pangkal, luran dan Sumbangan Anggota
3. SK No :003/SK/Rakernas III/I/2017 tentang Standar Operasional Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat
4. SK No :004/SK/Rakernas III/I/2017 tentang Panitia Pengarah (Steering Comitte) Kongres Nasional V
5. SK No :005/SK/Rakernas III/I/2017 tentang Rencana Strategis Organisasi 2015-2019
6. SK No :006/SK/Rakernas III/I/2017 tentang Workplan Organisasi 2017
7. SK No :007/SK/Rakernas III/I/2017 tentang Penyelesaian Masalah-masalah Organisasi
8. SK No :008/SK/Rakernas III/I/2017 tentang Presidium Nasional dari Kelompok Kerja Kelompok Kepentingan
9. SK No :009/SK/Rakernas III/I/2017 tentang Pola Relasi dan Mekanisme Koordinasi dalam Organisasi
10. SK No :10/SK/Rakernas III/I/2017 tentang Kepesertaan pengurus dalam Rapat Kerja.

Surat Keputusan Tahun 2018

1. SK No :001/SK/Rakernas IV/I/2018 tentang Hasil-hasil Rapat Kerja Nasional 2018
2. SK No :002/SK/Rakernas IV/I/2018 tentang Pengesahan Laporan Pengurus Cabang, Pengurus Wilayah, Pengurus Nasional Tahun 2017
3. SK No :003/SK/Rakernas IV/I/2018 tentang Penyelesaian Masalah-masalah Organisasi
4. SK No :004/SK/Rakernas IV/I/2018 tentang Workplan Organisasi 2018
5. SK No :005/SK/Rakernas IV/I/2018 tentang Penyelenggaraan Kongres Nasional V
6. SK No :006/SK/Rakernas IV/I/2018 tentang Rambu-rambu Penggalangan Dana Kongres Nasional V dan Kegiatan Organisasi

Surat Keputusan Tahun 2019

1. SK No :001/SK/Rakernas V/I/2019 tentang Hasil Rapat Kerja Nasional Tahun 2019
2. SK No :002/SK/Rakernas V/I/2019 tentang Pengesahan Laporan Pengurus Cabang, Pengurus Wilayah, Pengurus Nasional Tahun 2018
3. SK No :003/SK/Rakernas V/I/2019 tentang Penyelesaian Masalah-masalah Organisasi
4. SK No :004/SK/Rakernas V/I/2019 tentang Workplan Organisasi 2019
5. SK No :005/SK/Rakernas V/I/2019 tentang Sikap Politik Koalisi Perempuan Indonesia terhadap Pemilihan Umum (PEMILU) Anggota Dewan dan Presiden 2019
6. SK No :006/SK/Rakernas V/I/2019 tentang Pelaksanaan Sifat Non Partisan Organisasi
7. SK No :007/SK/Rakernas V/I/2019 tentang Masa Jabatan Hasil Pemilihan dalam Kongres Wilayah, Konferensi Cabang, dan Rembuk Balai Perempuan Luar Biasa
8. SK No :008/SK/Rakernas V/I/2019 tentang Proses dan Masa Transisi Penggantian Kepemimpinan Nasional
9. SK No :009/SK/Rakernas V/I/2019 tentang Penyelenggaraan Kongres Nasional V
10. SK No :10/SK/Rakernas V/I/2019 tentang Kebijakan Khusus (Affirmasi) Penetapan Syarat dan Ketentuan Pemilihan Presidium Nasional Kelompok Kepentingan

LAPORAN ASET DESEMBER 2019

No	Nama Barang	Merek	HB / S	Tgl. Beli	Status	Jml. Brg	Kode Label Lama	NOMOR BARU	Ruang	Pokja/Divisi	Donor	Keterangan
1	Meja Kantor				Baik		028/KPI/F/RKP/2011	01/F/KPI-NAS/2011	Lia Anggiasih	RKP		
2	AS-A:Meja Kantor				Baik		027/KPI/F/RKP/2011	02/F/KPI-NAS/2011	Indry	RKP		
3	Kursi Rapat Lipet hitam				Baik		114/KPI/F/KRT/2011	03/F/KPI-NAS/2011				Pindahan dari Ruang Keuangan
4	Meja Komputer				Baik		030/KPI/F/RKP/2011	04/F/KPI-NAS/2011				
5	Meja Komputer				Baik		031/KPI/F/RKP/2011	05/F/KPI-NAS/2011				
6	Telephone	Panasonic			Baik	1	53/KPI/E/RKP/2011	06/M/KPI-NAS/2011		RKP		
9	LCD Monitor	Samsung			Baik	1	48/KPI/E/RKP/2011	09/E/KPI-NAS/2011		Presnas		
10	File Cabinet Susun 4	Lion Star			Baik		040/KPI/F/RKP/2011	11/F/KPI-NAS/2011		RKP		
11	Lemari Kayu Besar				Baik		036/KPI/F/RKP/2011	12/F/KPI-NAS/2011		RKP		
12	Lemari Kayu Besar				Baik		037/KPI/F/RKP/2011	13/F/KPI-NAS/2011				
13	Meja Komputer				Baik		033/KPI/F/RKP/2011	14/F/KPI-NAS/2011				
14	Meja Komputer				Baik		032/KPI/F/RKP/2011	15/F/KPI-NAS/2011				
15	Lemari Kayu Rak 4				Baik		034/KPI/F/RKP/2011	16/F/KPI-NAS/2011		RKP		label terdahulu, sudah tidak ada
16	Container Kecil tanpa tutup				Baik		042/KPI/F/RKP/2011	17/M/KPI-NAS/2011				
17	Printer	Epson			Baik	1	52/KPI/E/RKP/2011	19/E/KPI-NAS/2011				
18	LCD Monitor	Samsung			Baik	1	47/KPI/E/RKP/2011	20/E/KPI-NAS/2011				
19	CPU	Power			Baik	1	50/KPI/E/RKP/2011	21/E/KPI-NAS/2011				
20	Kursi Kantor				Baik		003/KPI/F/IT-SMI/2011	22/F/KPI-NAS/2011	NOY			
21	Kursi Kantor				Baik		004/KPI/F/IT-SMI/2011	23/F/KPI-NAS/2011				
22	File Cabinet	Datascript			Baik		005/KPI/F/IT-SMI/2011	24/F/KPI-NAS/2011		IT		label terdahulu, sudah tidak ada
23	File Cabinet	Solit			Baik		006/KPI/F/IT-SMI/2011	25/F/KPI-NAS/2011		PO		
24	Lemari Kayu				Baik		008/KPI/F/IT-SMI/2011	26/F/KPI-NAS/2011		IT		
25	Lemari besi	Elegant			Baik		007/KPI/F/IT-SMI/2011	27/F/KPI-NAS/2011				
26	Meja Kantor				Baik		126/KPI/F/KRT-SEKI/2011	28/F/KPI-NAS/2011				Pindahan dari KRT, ruang bawah
27	Meja Kantor				Baik		001/KPI/F/IT-SMI/2011	29/F/KPI-NAS/2011				
28	Meja Kantor				Baik		002/KPI/F/IT-SMI/2011	30/F/KPI-NAS/2011	Melda	PO		
29	Container Besar Dorong				Baik		041/KPI/F/RKP/2011	31/M/KPI-NAS/2011				Pindahan dari ruang RKP
30	Rak Kayu				Baik		009/KPI/F/IT-SMI/2011	32/F/KPI-NAS/2011				
31	AC	Panasonic			Baik	1	71/KPI/E/KRT-PRES/2011/AC	33/M/KPI-NAS/2011				
32	Monitor	LG			Baik	1	40/KPU/E/IT-SMI/2011	34/E/KPI-NAS/2011	Noy	TI/SMI		
33	CPU	NZXT			Rakitan	1	40/KPU/E/IT-SMI/2011	35/E/KPI-NAS/2011	Noy	TI/SMI		
34	AC	Samsung			Baik	1	29/KPI/E/IT-SMI/2011	36/M/KPI-NAS/2011		TI/SMI		
35	Monitor	Samsung			Baik	1	33/KPI/E/PO/2011	37/E/KPI-NAS/2011	Farida	LITBANG-SMI		
36	CPU	Samsung			Baik	1	31/KPI/E/PO/2011	38/E/KPI-NAS/2011	Meldina	PO		ditukar dengan yg baru (gudang/dirur Ruang Atas
37	AC	SHARP			Baik	1	44/KPI/E/R-1st/2011	41/M/KPI-NAS/2011		PO		Pindahan dari ruang RKP
38	Lemari Kantor				Baik		038/KPI/F/RKP/2011	42/F/KPI-NAS/2011				Pindahan dari ruang RKP
39	Lemari Kayu 4 rak				Baik		034/KPI/F/RKP/2011	43/F/KPI-NAS/2011				Pindahan dari ruang fundrising
40	Meja Komputer				Baik		022/KPI/F/Funel/2011	44/F/KPI-NAS/2011				
45	Meja Kantor				Baik		016/KPI/F/PO/2011	45/F/KPI-NAS/2011	Stephana W.B.S			
46	Meja Kantor				Baik		017/KPI/F/PO/2011	46/F/KPI-NAS/2011	Linarti			
47	Kursi Kantor				Baik		013/KPI/F/PO/2011	47/F/KPI-NAS/2011				label terdahulu, sudah tidak ada
48	Lemari Buku Kayu Jati				Baik		018/KPI/F/PO/2011	48/F/KPI-NAS/2011		IT		
49	Rak Buku Kayu				Baik		019/KPI/F/PO/2011	49/F/KPI-NAS/2011				
50	Meja Kantor				Baik		015/KPI/F/PO/2011	50/F/KPI-NAS/2011		PO		
51	File Cabinet Plastik 4 rak				Baik		147/KPI/F/PO/2011	51/F/KPI-NAS/2011		PO		
52	Kursi Rapat Lipat hitam				Baik		113/KPI/E/KRT/2011	52/F/KPI-NAS/2011				lantai 2

104	Telephone	Advanced			Baik	1	11/KPI/E/ TI-SMI/2011	104/M/KPI-NAS/2011	Dian	PO	
105	AC	Haller			Baik	1	54/KPI/E/KRT-SEKI/2011	105/M/KPI-NAS/2011		Sekj	
106	Monitor	LG			Baik	1	93/KPI/E/KRT/2011	106/E/KPI-NAS/2011		FO	
107	CPU	Power Logic			Baik	1	94/KPI/E/KRT/2011	107/E/KPI-NAS/2011		Presnas	
108	Mesin Fax	Panasonic			Baik	1	85/KPI/E/KRT/2011 (T - F)	108/E/KPI-NAS/2011		FO	
109	Mesin absen	Time Tech KL-3300			Baik	1	95/KPI/E/KRT/2011 (MA)	109/E/KPI-NAS/2011		FO	
110	Printer	Epson			Baik	1	99/KPI/E/KRT/2011	110/E/KPI-NAS/2011		IT	
111	Printer	Canon			Baik	1	82/KPI/E/KRT/2011	111/E/KPI-NAS/2011	Mami	KRT	
112	Monitor	Samsung			Baik	1	75/KPI/E/KRT/2011	112/E/KPI-NAS/2011	Mami	KRT	
114	AC	Panasonic			Baik	1	70/KPI/E/KRT/2011 (AC)	114/M/KPI-NAS/2011		KRT	Kondisi bagus
115	Dispenser				Baik	1	87/KPI/KRT/2011 (DISP)	115/M/KPI-NAS/2011		KRT	ruang rapat
116	Dispenser				Baik	1	88/KPI/KRT/2011 (DISP)	116/M/KPI-NAS/2011		KRT	ruang bawah tengah
117	Dispenser				Baik	1	89/KPI/KRT/2011 (DISP)	117/M/KPI-NAS/2011		KRT	ruang atas
118	Dispenser				Baik	1	90/KPI/KRT/2011 (DISP)	118/M/KPI-NAS/2011		KRT	Rumah KPI
119	AC	Panasonic			Baik	1	72/KPI/E/KRT-RRB/2011 (AC)	119/M/KPI-NAS/2011		KRT	ruang rapat
120	AC	Panasonic			Baik	1	45/KPI/E/RKP/2011 (AC)	120/M/KPI-NAS/2011		KRT	rumah KPI
121	CPU	Seasonic (samsung)			Baik	1	80/KPI/E/KRT/2011	121/E/KPI-NAS/2011		KRT	
122	Almari Kaca Etalase				Baik		055/KPI/F/KRT/2011	122/F/KPI-NAS/2011		KRT	
123	Lemari Kayu				Baik		054/KPI/F/KRT/2011	123/F/KPI-NAS/2011		KRT	
124	Almari Kaca setengah kayu				Baik		054/KPI/F/KRT/2011	124/F/KPI-NAS/2011		KRT	diruang bawah tengah
125	Bangku Kayu ukir				Baik		060/KPI/F/KRT/2011	123/F/KPI-Nas/2014/MU-1	5/F/KPI-NAS/2011	ruang tamu	
126	Bangku Kayu ukir				Baik		061/KPI/F/KRT/2011	123/F/KPI-Nas/2014/MU-2	6/F/KPI-NAS/2011	ruang tamu	
127	Meja Tamu Kayu ukir				Baik		062/KPI/F/KRT/2011	123/F/KPI-Nas/2014/MU-3	7/F/KPI-NAS/2011	ruang tamu	
128	Bangku kayu ukir				Baik		063/KPI/F/KRT/2011	123/F/KPI-Nas/2014/MU-4	8/F/KPI-NAS/2011	ruang tamu	
129	Bangku Kayu ukir				Baik		059/KPI/F/KRT/2011	123/F/KPI-Nas/2014/MU-5	9/F/KPI-NAS/2011	ruang tamu	
130	Meja hias				Baik		128/KPI/KRT-SEKI/2011	130/F/KPI-NAS/2011		KRT-SEKI	Pindahan dari ruangan sekjed
131	Sofa Kulit				Baik		064-065/KPI/F/KRT/2011	131/F/KPI-NAS/2011		KRT	warna abu-abu
132	Meja bundar besar kaca				Baik		124/KPI/F/KRT/2011	132/F/KPI-NAS/2011		KRT	Ruang Presnas
133	File Cabinet	Data Script			Baik		125/KPI/F/KRT/2011	133/F/KPI-NAS/2011		KRT	
134	Meja Kantor				Baik		137/KPI/F/Keu/2011	134/F/KPI-NAS/2011	Emi Kartika	KEUANGAN	
135	Kursi Kerja				Baik		144/KPI/F/KEU/2011	135/F/KPI-NAS/2011		Keuangan	label terdahulu, sudah tidak ada
137	Lemari Kecil				Baik		140/KPI/F/Keu/2011	137/F/KPI-NAS/2011		Keuangan	
138	Rak Buku Kayu				Baik		143/KPI/F/Keu/2011	138/F/KPI-NAS/2011		Keuangan	
139	Meja Kantor				Baik		138/KPI/F/Keu/2011	139/F/KPI-NAS/2011	Dwi H	Keuangan	
140	File Cabinet 4 Susun	Datascrip			Baik		135/KPI/F/Keu/2011	140/F/KPI-NAS/2011		Keuangan	
142	Meja Kantor				Baik		142/KPI/F/Keu/2011	142/F/KPI-NAS/2011	Sabriyah Suleman	Keuangan	
143	Kursi Kerja				Baik		141/KPI/F/Keu/2011	143/F/KPI-NAS/2011		Keuangan	
144	Lemari Brangkas (Besi)	Akashi			Baik		134/KPI/F/Keu/2011	144/F/KPI-NAS/2011		Keuangan	
145	Rice Cooker	Sanken			Baik	1	92/KPI/E/KRT/2011	145/M/KPI-NAS/2011	DAPUR	KRT	
146	Monitor	Samsung			Baik	1	61/KPI/E/Keu/2011	146/E/KPI-NAS/2011		Keuangan	
147	CPU	PowerUP			Baik	1	63/KPI/E/Keu/2011	147/E/KPI-NAS/2011		Keuangan	
148	Monitor	Samsung			Baik	1	59/KPI/E/Keu/2011	148/E/KPI-NAS/2011		Keuangan	
151	Meja Kantor				Baik		136/KPI/F/Keu/2011	151/F/KPI-NAS/2011	Liessya Emizora	Keuangan	
152	White bord Besar	Sakana			Baik		139/KPI/F/KEU/2011	152/F/KPI-NAS/2011		Keuangan	
153	Meja Kantor				Baik		029/KPI/F/RKP/2012	153/F/KPI-NAS/2012	Gaby	Ut-SMI	
154	Meja Printer Kayu				Baik		163/KPI/F/PO/2012	154/F/KPI-NAS/2012		PO	label terdahulu, sudah tidak ada
155	Pembatas ruangan				Baik		154/KPI/F/KRT-SEKI/2012	155/M/KPI-NAS/2012	Dian	Sekjen	
156	File Cabinet	Datascrip			Baik		161/KPI/KRT-SEKI/2012	156/F/KPI-NAS/2012	Dian	Sekjen	label terdahulu, sudah tidak ada

208	Kipas angin kecil									17/E/IT-KPI/2014/Kip	208/E/KPI-NAS/2014			IT
209	Monitor	Lenovo			Baik	1				18/E/LB-SMI-KPI/2014/Mon	209/E/KPI-NAS/2014	Muntakhanah		PO
210	Keyboard	Lenovo			Baik	1				18/E/LB-SMI-KPI/2014/Keyb	210/E/KPI-NAS/2014	Farida Indriani		Lit-SMI
211	Mouse	Lenovo			Baik	1				18/E/LB-SMI-KPI/2014/Mou	211/E/KPI-NAS/2014	Muntakhanah		PO
212	CPU	Lenovo			Baik	1				18/E/LB-SMI-KPI/2014/CPU	212/E/KPI-NAS/2014			LITBANG-SMI-TI
213	Monitor	Lenovo			Baik	1				19/E/LB-SMI-KPI/2014/Mon	213/E/KPI-NAS/2014	Bayu		Lit-SMI
214	Keyboard	Lenovo			Baik	1				19/E/LB-SMI-KPI/2014/Keyb	214/E/KPI-NAS/2014	Bayu		Lit-SMI
215	Mouse	Lenovo			Baik	1				19/E/LB-SMI-KPI/2014/Mou	215/E/KPI-NAS/2014	Bayu		Lit-SMI
216	CPU	Lenovo			Baik	1				19/E/LB-SMI-KPI/2014/CPU	216/E/KPI-NAS/2014	Bayu		Lit-SMI
217	Monitor	Lenovo			Baik	1				20/E/LB-SMI-KPI/2014/Mon	217/E/KPI-NAS/2014			LITBANG-SMI-TI
218	Keyboard	Lenovo			Baik	1				20/E/LB-SMI-KPI/2014/Keyb	218/E/KPI-NAS/2014			LITBANG-SMI-TI
219	Mouse	Lenovo			Baik	1				20/E/LB-SMI-KPI/2014/Mou	219/E/KPI-NAS/2014			LITBANG-SMI-TI
220	CPU	Lenovo			Baik	1				20/E/LB-SMI-KPI/2014/CPU	220/E/KPI-NAS/2014	Muntakhanah		PO
221	Keyboard	HP			Baik	1				13/E/LB-SMI-KPI/2014/Keyb	221/E/KPI-NAS/2014	Farida		Lit-SMI
222	Mouse	HP			Baik	1				13/E/LB-SMI-KPI/2014/Mou	222/E/KPI-NAS/2014	Farida		Lit-SMI
223	CPU	HP			Baik	1				13/E/LB-SMI-KPI/2014/CPU	223/E/KPI-NAS/2014	Farida		Lit-SMI
224	AC	SHARP			Baik	1				14/E/LB-SMI-KPI/2014/AC	224/E/KPI-NAS/2014			LITBANG-SMI-TI
225	Monitor	HP			Baik	1				21/E/PO-KPI/2014/Mon	225/E/KPI-NAS/2014	Meidina		PO
226	Keyboard	Logitech			Baik	1				21/E/PO-KPI/2014/Keyb	226/E/KPI-NAS/2014	Meidina		PO
227	Mouse	Toshiba			Baik	1				21/E/PO-KPI/2014/Mou	227/E/KPI-NAS/2014	Meidina		PO
228	Tong Sampah kecil				Baik					58/F/KPI-Nas/2014/TS	228/M/KPI-NAS/2014			2014
229	Rak Kayu 2 laci				Baik					59/F/KPI-Nas/2014/Rk-2	229/F/KPI-NAS/2014			2014
230	File Cabinet 3 susun	Lion			Baik					60/F/KPI-Nas/2014/Fc-3	230/F/KPI-NAS/2014			2014
231	File Cabinet 4 susun	Datascrip			Baik					61/F/KPI-Nas/2014/Fc-4	231/F/KPI-NAS/2014			2014
232	Lemari besi 2 pintu	Elegant			Baik					63/F/KPI-Nas/2014/LB-2	232/F/KPI-NAS/2014			2014
233	Kursi Kantor kecil				Baik					67/F/KPI-Nas/2014/K	233/F/KPI-NAS/2014			2014
234	Kursi Kantor				Baik					68/F/KPI-Nas/2014/K	234/F/KPI-NAS/2014			2014
235	Tong Sampah besar				Baik					69/F/KPI-Nas/2014/TS	235/M/KPI-NAS/2014			2014
236	Meja Kantor	Big Panel Furniture			Baik					72/F/KPI-Nas/2014/M	236/F/KPI-NAS/2014			2014
237	Meja Kantor				Baik					74/F/KPI-Nas/2014/M	237/F/KPI-NAS/2014			2014
238	Kursi Kantor				Baik					75/F/KPI-Nas/2014/K	238/F/KPI-NAS/2014			2014
239	Kursi Kantor				Baik					78/F/KPI-Nas/2014/K	239/F/KPI-NAS/2014	Dian		Sekjen
240	Tong Sampah kecil				Baik					81/F/KPI-Nas/2014/TS	240/M/KPI-NAS/2014			2014
241	Meja Printer Kayu				Baik					82/F/KPI-Nas/2014/MP	241/F/KPI-NAS/2014	Dian		Sekjen
242	Kaca				Baik					85/F/KPI-Nas/2014/Kkm	242/M/KPI-NAS/2014	Dian		Sekjen
243	Kursi biru	Futura			Baik					54/F/KPI-Nas/2014/K2	243/F/KPI-NAS/2014			2014
244	Keyboard	Logitech			Baik	1				22/E/PO-KPI/2014/Keyb	244/E/KPI-NAS/2014	Welly		PO
245	Mouse	Logitech			Baik	1				22/E/PO-KPI/2014/Mou	245/E/KPI-NAS/2014	Welly		PO
246	Monitor	Lenovo			Baik	1				23/E/PO-KPI/2014/Mon	246/E/KPI-NAS/2014	Linarti		PO
247	CPU	Lenovo			Baik	1				23/E/PO-KPI/2014/CPU	247/E/KPI-NAS/2014	Dwi H		Keuangan
248	Keyboard	Lenovo			Baik	1				23/E/PO-KPI/2014/Keyb	248/E/KPI-NAS/2014	Linarti		PO
249	Mouse	Lenovo			Baik	1				23/E/PO-KPI/2014/Mou	249/E/KPI-NAS/2014	Linarti		PO
250	Printer	Epson			Baik	1				25/E/PO-KPI/2014/Prt	250/E/KPI-NAS/2014			PO
251	Monitor	Lenovo			Baik	1				27/E/PO-KPI/2014/Mon	251/E/KPI-NAS/2014			PO
252	Mouse	Lenovo			Baik	1				27/E/PO-KPI/2014/Mou	252/E/KPI-NAS/2014	Mimi		PO
253	Keyboard	Lenovo			Baik	1				27/E/PO-KPI/2014/Keyb	253/E/KPI-NAS/2014	Mimi		PO
254	CPU	Lenovo			Baik	1				27/E/PO-KPI/2014/CPU	254/E/KPI-NAS/2014	Mimi		PO
256	Keyboard	Logitech			Baik	1				29/E/KEU-KPI/2014/Keyb	256/E/KPI-NAS/2014	Dwi H		Keuangan

ditukar dengan yg baru (gudang/di ru
ditukar dengan yg baru (gudang)
ditukar dengan yg baru (gudang)

257	Mouse	Logitech				Baik	1	29/E/KEU-KPI/2014/Mou	257/E/KPI-NAS/2014	Keuangan	
258	Laci besi 2 laci					Baik		91/F/KPI-Nas/2014/LB-2	258/F/KPI-NAS/2014	Front Office	
259	Kursi Kantor					Baik		92/F/KPI-Nas/2014/K	259/F/KPI-NAS/2014	2014	
260	Tong sampah kecil					Baik		93/F/KPI-Nas/2014/M	260/M/KPI-NAS/2014	2014	
261	Papan White bord					Baik		96/F/KPI-Nas/2014/WB	261/F/KPI-NAS/2014	2014	
262	Tong Sampah kecil					Baik		97/F/KPI-Nas/2014/Ts	262/M/KPI-NAS/2014	Mami	
263	Laci kecil kayu					Baik		100/F/KPI-Nas/2014/Lc	263/F/KPI-NAS/2014	Keuangan	
264	Laci kecil kayu							263a/F/KPI-NAS/2014	263a/F/KPI-NAS/2014	Keuangan	
265	Laci kecil kayu							263b/F/KPI-NAS/2014	263b/F/KPI-NAS/2014	RKP	
266	Papan White bord					Baik		101/F/KPI-Nas/2014/PWB	264/F/KPI-NAS/2014	2014	
267	Kursi Plastik biru					Baik		104/F/KPI-Nas/2014/Kp 1-2	265/F/KPI-NAS/2014	2014	
268	Meja Komputer					Baik		106/F/KPI-Nas/2014/MK	266/F/KPI-NAS/2014	2014	
269	Kursi biru					Baik	17	54/F/KPI-Nas/2014/K3-19	267/F/KPI-NAS/2014	2014	
270	Flichart					Baik		109/F/KPI-Nas/FIC	268/M/KPI-NAS/2014	KPI-Nas	
271	Kursi biru					Baik	2	54/F/KPI-Nas/2014/K20-21	269/F/KPI-NAS/2014	2014	
272	Kursi Rapat Lipet hitam					Baik		114/F/KPI-Nas/2014/K1	270/F/KPI-NAS/2014	lantai 2	
273	Kursi Rapat Lipet hitam					Baik		115/F/KPI-Nas/2014/K1	271/F/KPI-NAS/2014	2014	
274	Kursi Rapat Lipet hitam					Baik		119/F/KPI-Nas/2014/K1h	272/F/KPI-NAS/2014	2014	
275	Kursi Biru					Baik	3	54/F/KPI-Nas/2014/K22-24	273/F/KPI-NAS/2014	2014	
276	Galon					Baik		128/F/KPI-Nas/2014/MK	274/M/KPI-NAS/2014	2014	
277	Tabung gas besar					Baik		129/F/KPI-Nas/2014/Mk	275/M/KPI-NAS/2014	2014	
278	Kursi kerja Hijau					baik		130/F/KPI-Nas/2014/Mk	276/F/KPI-NAS/2014	2014	
279	Kursi kerja Biru					baik		131/F/KPI-Nas/2014/Mk	277/F/KPI-NAS/2014	2014	
280	Keyboard	Logitech				Baik	1	30/E/KEU-KPI/2014/Keyb	278/E/KPI-NAS/2014	Keuangan	
281	Mouse	Logitech				Baik	1	30/E/KEU-KPI/2014/Mou	279/E/KPI-NAS/2014	Keuangan	
283	Printer cetak kartu	Persona				Baik	1	32/E/IT-SMI/KPI/2014/PCKA	281/E/KPI-NAS/2014	TI-SMI	Di Lemari IT - SMI
284	Switch	Dlink				Baik	1	34/E/IT-SMI/KPI/2014/swt	282/M/KPI-NAS/2014	TI-SMI	Di Lemari IT - SMI
285	Mouse	Lenovo				Baik	1	54/E/SEK-KPI/2014/Mou	283/E/KPI-NAS/2014	Sekjen	
286	Keyboard	Lenovo				Baik	1	54/E/SEK-KPI/2014/Keyb	284/E/KPI-NAS/2014	Sekjen	
287	Monitor	Lenovo				Baik	1	54/E/SEK-KPI/2014/Mon	285/E/KPI-NAS/2014	Sekjen	
288	CPU	Lenovo				Baik	1	54/E/SEK-KPI/2014/CPU	286/E/KPI-NAS/2014	Sekjen	
289	Telephone	Panasonic				Baik		56/E/SEK-KPI/2014/Ext.16	287/M/KPI-NAS/2014	Sekjen	
290	Keyboard	SPC				Baik	1	58/E/FO-KPI/2014/Keyb	288/E/KPI-NAS/2014	FO	
291	Mouse					Baik	1	58/E/FO-KPI/2014/Mou	289/E/KPI-NAS/2014	FO	
292	Telephone Operator	Panasonic				Baik	1	60/E/FO-KPI/2014/Ext.10-Op	290/M/KPI-NAS/2014	FO	
293	Meja Printer					Baik		134/F/KPI-Nas/2014/MK	291/F/KPI-NAS/2014	2014	
294	Meja Printer					Baik		135/F/KPI-Nas/2014/MK	292/F/KPI-NAS/2014	2014	
295	Meja Komputer					Baik		139/F/KPI-Nas/2014/Mk	293/F/KPI-NAS/2014	2014	
296	Kursi Kerja					Baik		141/F/KPI-Nas/2014/MK	294/F/KPI-NAS/2014	2014	
297	Rak Kayu 3 susun	Solid				Baik		147/F/KPI-Nas/2014/MK	295/F/KPI-NAS/2014	2014	
299	Rak Buku Pintu Geser					Baik		149/F/KPI-Nas/2014/MK	297/F/KPI-NAS/2014	Keuangan	
300	Tong sampah kecil					Baik		150/F/KPI-Nas/2014/MK	298/M/KPI-NAS/2014	2014	
301	Kursi Kantor					Baik		152/F/KPI-Nas/2014/MK	299/F/KPI-NAS/2014	2014	
302	White bord kecil					Baik		154/F/KPI-Nas/2014/MK	300/F/KPI-NAS/2014	2014	
303	Lemari Perpustakaan	Sakura				Baik	4	155/F/KPI-Nas/2014/MK	301/F/KPI-NAS/2014	2014	
304	Meja makan					Baik	1	156/F/KPI-Nas/2014/MK	302/M/KPI-NAS/2014	2014	
306	Tabung Gas Kecil					Baik		157/F/KPI-Nas/2014/MK	304/M/KPI-NAS/2014	2014	Di Kantor KPI
307	Keyboard					Baik	1	164/E/KRT-KPI/2014/Keyb	305/E/KRT-KPI/2014	KRT	

308	Mouse	Logitech				Baik	1	64/E/KRT-KPI/2014/Mou	306/E/KPI-NAS/2014	Miami	KRT	
309	CPU	HP				Baik	1	64/E/KRT-KPI/2014/CPU	307/E/KPI-NAS/2014	Miami	KRT	
310	Kipas angin besar	Cosmos				Baik	1	66/E/KRT-KPI/2014/Kip	308/M/KPI-NAS/2014		KRT	
311	Keyboard	Compaq				Baik	1	67/E/KRT-KPI/2014/Keyb	309/E/KPI-NAS/2014		KRT	
312	Mouse	Logitech				Baik	1	67/E/KRT-KPI/2014/Mou	310/E/KPI-NAS/2014		KRT	
313	Kipas angin besar					Baik		73/E/KRT-KPI/2014/Kip	311/M/KPI-NAS/2014		KRT	
314	TV	Samsung				Baik	1	75/E/KRT-KPI/2014/TV	312/M/KPI-NAS/2014		KRT	
315	DVD	Samsung				Baik	1	77/E/KRT-KPI/2014/DVD	313/M/KPI-NAS/2014		KRT	
316	VCD	Toshiba				Baik	1	78/E/KRT-KPI/2014/VCD	314/M/KPI-NAS/2014		KRT	
317	Loudspeaker	Tattoo 101				Baik	1	79/E/PO-KPI/2014/Loud (A&B)	315/M/KPI-NAS/2014		PO	
318	kulkas	Samsung				Baik	1	80/KRT-KPI/2014/KULK	316/M/KPI-NAS/2014		KRT	
319	Keyboard	Logitech				Baik	1	82/KEU-KPI/2014/Keyb	317/E/KPI-NAS/2014		Keuangan	
320	Mouse	Logitech				Baik	1	82/KEU-KPI/2014/Mou	318/E/KPI-NAS/2014		Keuangan	
321	Monitor	Lenovo				Baik	1	84/KEU-KPI/2014/Mon	319/E/KPI-NAS/2014		Keuangan	
322	Keyboard	Lenovo				Baik	1	84/KEU-KPI/2014/Keyb	320/E/KPI-NAS/2014		Keuangan	
323	Mouse	Lenovo				Baik	1	84/KEU-KPI/2014/Mou	321/E/KPI-NAS/2014		Keuangan	
324	CPU	Lenovo				Baik	1	84/KEU-KPI/2014/CPU	322/E/KPI-NAS/2014		Keuangan	
325	Keyboard	SPC				Baik	1	85/KEU-KPI/2014/Keyb	323/E/KPI-NAS/2014		Keuangan	
326	Mouse	SPC				Baik	1	85/KEU-KPI/2014/Mou	324/E/KPI-NAS/2014		Keuangan	
327	Telephone	Panasonic				Baik	1	86/KEU-KPI/2014/Ext.13	325/M/KPI-NAS/2014		Keuangan	
328	Monitor	Lenovo				Baik	1	87/KEU-KPI/2014/Mon	326/E/KPI-NAS/2014	Liessya	Keuangan	
329	Keyboard	Lenovo				Baik	1	87/KEU-KPI/2014/Keyb	327/E/KPI-NAS/2014	Liessya	Keuangan	
330	Mouse	Lenovo				Baik	1	87/KEU-KPI/2014/Mou	328/E/KPI-NAS/2014	Liessya	Keuangan	
331	CPU	Lenovo				Baik	1	87/KEU-KPI/2014/CPU	329/E/KPI-NAS/2014	Liessya	Keuangan	
332	Kalkulator	Casio				Baik	1	88/KEU-KPI/2014/Kalk	330/M/KPI-NAS/2014		Keuangan	
333	Laptop	Asus A450L:				Baik	1	90/E/TT-SMI/KPI/2014/Lap	331/E/KPI-NAS/2014		IT	
334	Laptop	Asus A450L:				Baik	1	91/E/TT-SMI/KPI/2014/Lap	332/E/KPI-NAS/2014		IT	
335	Handycamp	Sony DCRSR45				Baik	1	93/E/TT-SMI/KPI/2014/Han	333/E/KPI-NAS/2014		IT	
336	Laptop	Asus A450L:				Baik	1	92/E/TT-SMI/KPI/2014/Lap	334/E/KPI-NAS/2014		IT	
337	Printer	HP150				Baik		93/E/TT-SMI/KPI/2014/Prt	335/E/KPI-NAS/2014		IT	
338	Projector	Epson PL.1761W				Baik		94/E/TT-SMI/KPI/2014/Pro	336/E/KPI-NAS/2014		IT	
339	External Hardisk	WD Pass 1TB				Baik	7	95-101/E/TT-SMI/KPI/2014/Ext-H	337/M/KPI-NAS/2014		IT	
340	lemari Kayu kecil	non merek		S		Baik	2	158-159/F/KPI-Nas/2015/LKK	338/F/KPI-NAS/2015	Keuangan		PO, RKP
341	lemari Kayu kecil	non merek				Baik			338a/F/KPI-NAS/2015			
342	Meja kaca bulat	non merek		S		Baik	1	160/F/KPI-Nas/2015/MKc	339/F/KPI-NAS/2015		2015	
343	Lemari Kaca	brother		S		Baik	1	161-162/F/KPI-Nas/2015/LKc	340/F/KPI-NAS/2015	Sinta	KRT	
346	Kursi staf	BOS		S		Baik	8	163-170/F/KPI-Nas/2015/Mk	341/F/KPI-NAS/2015		2015	
347	Meja Lipat Kayu kecil	non merek		BELI		Baik	15	171-198/F/KPI-Nas/2015/MMKL	342/F/KPI-NAS/2015		2015	DI KANTOR
348	Meja Lipat Besar	non merek		BELI		Baik	4	199/F/KPI-Nas/2015/MLB	343/F/KPI-NAS/2015		2015	
349	Meja Kerja	Super Furniture		450.000		baik	1	200/F/KPI-Nas/2015/MK	344/F/KPI-NAS/2015		2015	
350	Filipchart Kayu	non merek				Baik	17	201-217/F/KPI-Nas/2015/F	345/M/KPI-NAS/2015		2015	
351	Container	aneka				baik	18	218-235/F/Kpi-Nas/2015/Con	346/M/KPI-NAS/2015		2015	
352	Kompor Gas	Miyako				baik	1	236/F/KPI-Nas/2015/KG	347/M/KPI-NAS/2015		2015	Dapur
353	Tangga Lipat	Fortuna				Baik	1	237/F/KPI-NAS/2015/TTL	348/M/KPI-NAS/2015		KRT	
354	Mesin Foto Copy	SHARP		15 jt		Baik	1	102/E/KRT/KPI/2015/FC	349/E/KPI-NAS/2015	Ariyanto	KRT	Ruang Bawah
355	Kipas Angin	aneka				Baik	5	103-107/E/KRT/KPI/2015/KA	350/M/KPI-NAS/2015	Ariyanto	KRT	Ruang Bawah
356	Mouse	HP				Baik	1	108/E/KRT/KPI/2014/Mou	351/E/KPI-NAS/2015	Miami	KRT	
357	Monitor	Dell			april	Baik	1	109/E/KRT/KPI/04/2015/Mon	352/E/KPI-NAS/04/2015/MAMPU	Sinta	KRT	Mampu

358	Keyboard	Dell			april	Baik	1	109/E/KRT/KPI/04/2015/Key	353/E/KPI-NAS/04/2015/MAMPU	Sinta	KRT	Mampu
359	Mouse	Dell			april	Baik	1	109/E/KRT/KPI/04/2015/Mou	354/E/KPI-NAS/04/2015/MAMPU	Sinta	KRT	Mampu
360	CPU	Dell			april	Baik	1	109/E/KRT/KPI/04/2015/Cpu	355/E/KPI-NAS/04/2015/MAMPU	Sinta	KRT	Mampu
361	Monitor	Dell			april	Baik	1	110/E/KEU/KPI/04/2015/Mon	356/E/KPI-NAS/04/2015/MAMPU	Ria	Keuangan	Mampu
362	Keyboard	Dell			april	Baik	1	110/E/KEU/KPI/04/2015/Key	357/E/KPI-NAS/04/2015/MAMPU	Ria	Keuangan	Mampu
363	Mouse	Dell			april	Baik	1	110/E/KEU/KPI/04/2015/Mou	358/E/KPI-NAS/04/2015/MAMPU	Ria	Keuangan	Mampu
364	CPU	Dell			april	Baik	1	110/E/KEU/KPI/04/2015/Cpu	359/E/KPI-NAS/04/2015/MAMPU	Ria	Keuangan	Mampu
365	Mouse	Logitech			april	Baik	1	111/E/KEU/KPI/04/2015/Mou	360/E/KPI-NAS/04/2015/MAMPU	Liessya	Keuangan	Mampu
366	Monitor	Dell			april	Baik	1	112/E/KEU/KPI/04/2015/Mon	361/E/KPI-NAS/04/2015/MAMPU	Sabriyah	Keuangan	Mampu
367	Keyboard	Dell			april	Baik	1	112/E/KEU/KPI/04/2015/Key	362/E/KPI-NAS/04/2015/MAMPU	Sabriyah	Keuangan	Mampu
368	Mouse	Dell			april	Baik	1	112/E/KEU/KPI/04/2014/Mou	363/E/KPI-NAS/04/2015/MAMPU	Sabriyah	Keuangan	Mampu
369	CPU	Dell			april	Baik	1	112/E/KEU/KPI/04/2015/Cpu	364/E/KPI-NAS/04/2015/MAMPU	Sabriyah	Keuangan	Mampu
370	Monitor	Dell			april	Baik	1	113/E/KEU/KPI/04/2015/Mon	365/E/KPI-NAS/04/2015/MAMPU	Syarah	Keuangan	Mampu
371	Keyboard	Dell			april	Baik	1	113/E/KEU/KPI/04/2015/Key	366/E/KPI-NAS/04/2015/MAMPU	Syarah	Keuangan	Mampu
372	Mouse	Dell			april	Baik	1	113/E/KEU/KPI/04/2015/Mou	367/E/KPI-NAS/04/2015/MAMPU	Syarah	Keuangan	Mampu
373	CPU	Dell			april	Baik	1	113/E/KRT/KPI/04/2015/Cpu	368/E/KPI-NAS/04/2015/MAMPU	Syarah	Keuangan	Mampu
374	Monitor	Dell			april	Baik	1	114/E/KEU/KPI/04/2015/Mon	369/E/KPI-NAS/04/2015/MAMPU	Emi K	Keuangan	Mampu
375	Keyboard	Dell			april	Baik	1	114/E/KEU/KPI/04/2015/Key	370/E/KPI-NAS/04/2015/MAMPU	Emi K	Keuangan	Mampu
376	Mouse	Dell			april	Baik	1	114/E/KEU/KPI/04/2015/Mou	371/E/KPI-NAS/04/2015/MAMPU	Emi K	Keuangan	Mampu
377	CPU	Dell			april	Baik	1	114/E/KEU/KPI/04/2015/Cpu	372/E/KPI-NAS/04/2015/MAMPU	Emi K	Keuangan	Mampu
378	Telephone	Panasonic			april	Baik	1	115/E/KEU/KPI/04/2014/ext.18	373/M/KPI-NAS/04/2015		LB-SMI	Mampu
379	Monitor	Dell			april	Baik	1	116/E/KEU/KPI/04/2015/Mon	374/E/KPI-NAS/04/2015/MAMPU	Gaby	LB-SMI	Mampu
380	Keyboard	Dell			april	Baik	1	116/E/KEU/KPI/04/2015/Key	375/E/KPI-NAS/04/2015/MAMPU	Gaby	LB-SMI	Mampu
381	Mouse	Dell			april	Baik	1	116/E/KEU/KPI/04/2015/Mou	376/E/KPI-NAS/04/2015/MAMPU	Gaby	LB-SMI	Mampu
382	CPU	Dell			april	Baik	1	116/E/KEU/KPI/04/2015/Cpu	377/E/KPI-NAS/04/2015/MAMPU	Gaby	LB-SMI	Mampu
383	Monitor	Dell			april	Baik	1	117/E/PO/KPI/04/2015/Mon	378/E/KPI-NAS/04/2015/MAMPU	Meidina	PO	Mampu
384	Keyboard	Dell			april	Baik	1	117/E/PO/KPI/04/2015/Key	379/E/KPI-NAS/04/2015/MAMPU	Meidina	PO	Mampu
385	Mouse	Dell			april	Baik	1	117/E/PO/KPI/04/2015/Mou	380/E/KPI-NAS/04/2015/MAMPU	Meidina	PO	Mampu
386	CPU	Dell			april	Baik	1	117/E/PO/KPI/04/2015/Cpu	381/E/KPI-NAS/04/2015/MAMPU	Meidina	PO	Mampu
387	Monitor	Dell			april	Baik	1	118/E/PO/KPI/04/2015/Mon	382/E/KPI-NAS/04/2015/MAMPU	Welly	PO	Mampu
388	Keyboard	Dell			april	Baik	1	118/E/PO/KPI/04/2015/Key	383/E/KPI-NAS/04/2015/MAMPU	Welly	PO	Mampu
389	Mouse	Dell			april	Baik	1	118/E/PO/KPI/04/2015/Mou	384/E/KPI-NAS/04/2015/MAMPU	Welly	PO	Mampu
390	CPU	Dell			april	Baik	1	118/E/PO/KPI/04/2015/Cpu	385/E/KPI-NAS/04/2015/MAMPU	Welly	PO	Mampu
391	Monitor	Dell			april	Baik	1	119/E/PO/KPI/04/2015/Mon	386/E/KPI-NAS/04/2015/MAMPU	Melda	PO	Mampu
392	Keyboard	Dell			april	Baik	1	119/E/PO/KPI/04/2015/Key	387/E/KPI-NAS/04/2015/MAMPU	Melda	PO	Mampu
393	Mouse	Dell			april	Baik	1	119/E/PO/KPI/04/2015/Mou	388/E/KPI-NAS/04/2015/MAMPU	Melda	PO	Mampu
394	CPU	Dell			april	Baik	1	119/E/PO/KPI/04/2015/Cpu	389/E/KPI-NAS/04/2015/MAMPU	Melda	PO	Mampu
395	Monitor	Dell			april	Baik	1	120/E/RKP/KPI/04/2015/Mon	390/E/KPI-NAS/04/2015/MAMPU	Anggi	RKP	Mampu
396	Keyboard	Dell			april	Baik	1	120/E/RKP/KPI/04/2015/Key	391/E/KPI-NAS/04/2015/MAMPU	Anggi	RKP	Mampu
397	Mouse	Dell			april	Baik	1	120/E/RKP/KPI/04/2015/Mou	392/E/KPI-NAS/04/2015/MAMPU	Anggi	RKP	Mampu
398	CPU	Dell			april	Baik	1	120/E/RKP/KPI/04/2015/Cpu	393/E/KPI-NAS/04/2015/MAMPU	Anggi	RKP	Mampu
399	Monitor	Dell			april	Baik	1	121/E/RKP/KPI/04/2015/Mon	394/E/KPI-NAS/04/2015/MAMPU	Kokom	RKP	Mampu
400	Keyboard	Dell			april	Baik	1	121/E/RKP/KPI/04/2015/Key	395/E/KPI-NAS/04/2015/MAMPU	Kokom	RKP	Mampu
401	Mouse	Dell			april	Baik	1	121/E/RKP/KPI/04/2015/Mou	396/E/KPI-NAS/04/2015/MAMPU	Kokom	RKP	Mampu
402	CPU	Dell			april	Baik	1	121/E/RKP/KPI/04/2015/Cpu	397/E/KPI-NAS/04/2015/MAMPU	Kokom	RKP	Mampu
403	Bolt	Dell			april	Baik	1	122/E/TT-SMI/KPI/04/2015/Bolt	398/M/KPI-NAS/04/2015/MAMPU		2015	Mampu
404	Monitor	Dell			april	Baik	1	123/E/RKP/KPI/04/2015/Mon	399/E/KPI-NAS/04/2015/MAMPU	Husna	RKP	Mampu
405	Keyboard	Dell			april	Baik	1	123/E/RKP/KPI/04/2015/Key	400/E/KPI-NAS/04/2015/MAMPU	Husna	RKP	Mampu

454	Filling Cabinet	Lion		juli	Baik		251/F/KPI-NAS/VII/2017/FC/INDII	434/F/KPI-NAS/07/2017/INDII	FC	INDII	hibah dari INDII
455	Filling Cabinet	Lion		juli	Baik		252/F/KPI-NAS/VII/2017/FC/INDII	435/F/KPI-NAS/07/2017/INDII	FC	INDII	hibah dari INDII
456	Filling Cabinet	Lion		juli	Baik		253/F/KPI-NAS/VII/2017/FC/INDII	436/F/KPI-NAS/07/2017/INDII	FC	INDII	hibah dari INDII
457	Rak Gantung (Hanging Shelves)			juli	Baik		254/F/KPI-NAS/VII/2017/RG/INDII	437/F/KPI-NAS/07/2017/INDII	RG	INDII	hibah dari INDII
458	Manager Chair (Besar)	Informa		juli	Baik		255/F/KPI-NAS/VII/2017/MGC/INDII	438/F/KPI-NAS/07/2017/INDII	MGC	INDII	hibah dari INDII
459	Manager Chair (Kecil)	Informa		juli	Baik		256/F/KPI-NAS/VII/2017/MGC/INDII	439/F/KPI-NAS/07/2017/INDII	MGC	INDII	hibah dari INDII
460	Open Bookshelves (3 Shelves)			juli	Baik		257/F/KPI-NAS/VII/2017/OBS3/INDII	440/F/KPI-NAS/07/2017/INDII	KRT	INDII	hibah dari INDII
461	Open Bookshelves (3 Shelves)			juli	Baik		258/F/KPI-NAS/VII/2017/OBS3/INDII	441/F/KPI-NAS/07/2017/INDII	OBS3	INDII	hibah dari INDII
462	Open Bookshelves (3 Shelves)			juli	Baik		259/F/KPI-NAS/VII/2017/OBS3/INDII	442/F/KPI-NAS/07/2017/INDII	OBS3	INDII	hibah dari INDII
463	Open Bookshelves (3 Shelves)			juli	Baik		260/F/KPI-NAS/VII/2017/OBS3/INDII	443/F/KPI-NAS/07/2017/INDII	OBS3	INDII	hibah dari INDII
464	Open Bookshelves (3 Shelves)			juli	Baik		261/F/KPI-NAS/VII/2017/OBS3/INDII	444/F/KPI-NAS/07/2017/INDII	OBS3	INDII	hibah dari INDII
465	Open Bookshelves (3 Shelves)			juli	Baik		262/F/KPI-NAS/VII/2017/OBS3/INDII	445/F/KPI-NAS/07/2017/INDII	OBS3	INDII	hibah dari INDII
466	Open Bookshelves (3 Shelves)			juli	Baik		263/F/KPI-NAS/VII/2017/OBS3/INDII	446/F/KPI-NAS/07/2017/INDII	OBS3	INDII	hibah dari INDII
467	Open Bookshelves (2 Shelves)			juli	Baik		264/F/KPI-NAS/VII/2017/OBS2/INDII	447/F/KPI-NAS/07/2017/INDII	OBS2	INDII	hibah dari INDII
468	Sofa Kulit			juli	Baik		265/F/KPI-NAS/VII/2017/SK/INDII	448/F/KPI-NAS/07/2017/INDII	SK	INDII	hibah dari INDII
469	Papan Tulis Putih (White Board)			juli	Baik		266/F/KPI-NAS/VII/2017/PTP/INDII	449/F/KPI-NAS/07/2017/INDII	PTP	INDII	hibah dari INDII
470	Papan Tulis Putih (White Board)			juli	Baik		267/F/KPI-NAS/VII/2017/PTP/INDII	450/F/KPI-NAS/07/2017/INDII	PTP	INDII	hibah dari INDII
471	Kursi Kerja (Working Chair)	Stramm		juli	Baik		268/F/KPI-NAS/VII/2017/KK/INDII	451/F/KPI-NAS/07/2017/INDII	KK	INDII	hibah dari INDII
472	Kursi Kerja (Working Chair)	Stramm		juli	Baik		269/F/KPI-NAS/VII/2017/KK/INDII	452/F/KPI-NAS/07/2017/INDII	KK	INDII	hibah dari INDII
473	Kursi Kerja (Working Chair)	Stramm		juli	Baik		270/F/KPI-NAS/VII/2017/KK/INDII	453/F/KPI-NAS/07/2017/INDII	KK	INDII	hibah dari INDII
474	Kursi Kerja (Working Chair)	Stramm		juli	Baik		271/F/KPI-NAS/VII/2017/KK/INDII	454/F/KPI-NAS/07/2017/INDII	KK	INDII	hibah dari INDII
475	Kursi Kerja (Working Chair)	Stramm		juli	Baik		272/F/KPI-NAS/VII/2017/KK/INDII	455/F/KPI-NAS/07/2017/INDII	KK	INDII	hibah dari INDII
476	Kursi Kerja (Working Chair)	Stramm		juli	Baik		273/F/KPI-NAS/VII/2017/KK/INDII	456/F/KPI-NAS/07/2017/INDII	KK	INDII	hibah dari INDII
477	Kursi Kerja (Working Chair)	Stramm		juli	Baik		274/F/KPI-NAS/VII/2017/KK/INDII	457/F/KPI-NAS/07/2017/INDII	KK	INDII	hibah dari INDII
478	Kursi Kerja (Working Chair)	Stramm		juli	Baik		275/F/KPI-NAS/VII/2017/KK/INDII	458/F/KPI-NAS/07/2017/INDII	KK	INDII	hibah dari INDII
479	Meja Kerja (Working Table)			juli	Baik		276/F/KPI-NAS/VII/2017/MK/INDII	459/F/KPI-NAS/07/2017/INDII	MK	INDII	hibah dari INDII
480	Hardisk	WD 1TB USB 3.0		Februari	Baik	1	004/MCAI/4/08022017	460/M/KPI-NAS/02/2017/MCAI	Keuangan	MCAI	hibah dari INDII
481	Laptop	Asus	Rp. 5.525.000,-	maret	Baik	1	005/MCAI/4/14032017	461/E/KPI-NAS/03/2017/MCAI	Keuangan	MCAI	hibah dari INDII
482	Laptop	Asus	Rp. 5.525.000,-	maret	Baik	1	006/MCAI/4/14032017	462/E/KPI-NAS/03/2017/MCAI	Keuangan	MCAI	hibah dari INDII
483	Laptop	Asus	Rp. 5.525.000,-	maret	Baik	1	007/MCAI/4/14032017	463/E/KPI-NAS/03/2017/MCAI	Keuangan	MCAI	hibah dari INDII
484	Laptop	Asus	Rp. 5.525.000,-	maret	Baik	1	008/MCAI/4/14032017	464/E/KPI-NAS/03/2017/MCAI	Keuangan	MCAI	hibah dari INDII
485	Laptop	Lenovo		juni	Baik	1	009/MCAI/4/14062017	465/E/KPI-NAS/06/2017/MCAI	Keuangan	MCAI	hibah dari INDII
486	Printer	Epson L360		juni	Baik	1	010/MCAI/4/14062017	466/E/KPI-NAS/06/2017/MCAI	KPI Cab. SBD	MCAI	hibah dari INDII
487	Printer	HP Deskjet GT 5810 A11		juni	Baik	1	011/MCAI/4/15062017	467/E/KPI-NAS/06/2017/MCAI	KPI Cab. SBD	MCAI	hibah dari INDII
488	Printer	HP Deskjet GT 5810 A11		juni	Baik	1	012/MCAI/4/15062017	468/E/KPI-NAS/06/2017/MCAI	KPI Cab. Sumtint	MCAI	hibah dari INDII
489	Printer	HP Deskjet GT 5810 A11		juni	Baik	1	013/MCAI/4/15062017	469/E/KPI-NAS/06/2017/MCAI	KPI Cab. Sumtint	MCAI	hibah dari INDII
490	Printer	HP Deskjet GT 5810 A11		juni	Baik	1	014/MCAI/4/15062017	470/E/KPI-NAS/06/2017/MCAI	setnas	MCAI	hibah dari INDII
491	Projector	LG PV150	Rp. 4.149.200,-	juli	Baik	1	CSOLA-KPI-03-VII-2017	471/E/KPI-NAS/07/2017/CSOLA/IT	setnas	CSOLA	hibah dari INDII
492	Vacuum Cleaner	Twinnbird	Rp. 1.180.000,-	juli	Baik	1	CSOLA-KPI-04-VII-2017	472/M/KPI-NAS/07/2017/CSOLA/IT	setnas	CSOLA	hibah dari INDII
493	Hard Disk Internal	Western Digital Ca	Rp. 2.289.000,-	agustus	Baik	1	CSOLA-KPI-05-VIII-2017	473/M/KPI-NAS/08/2017/CSOLA/IT	setnas	CSOLA	hibah dari INDII
494	Printer Portable	HP		november	Baik	1	CSOLA-KPI-02-XI-2016	474/E/KPI-NAS/11/2017/CSOLA	setnas	CSOLA	hibah dari INDII
495	Laptop	ACER Aspire R3-13	Rp. 4.649.000,-	juli	Baik	1	157/E/KPI/07/2017/Lap/CS	475/E/KPI-NAS/07/2017/CS	setnas	CS	hibah dari INDII
496	Laptop	Dell		september	Baik	1	158/E/KPI/09/2017/Lap/kompak	476/E/KPI-NAS/09/2017/KOMPAK	setnas	Kompak	hibah dari INDII
497	Kamera	Canon M 10		september	Baik	1	159/E/KPI/09/2017/Camp/kompak	477/E/KPI-NAS/09/2017/KOMPAK	setnas	Kompak	hibah dari INDII
498	Printer Portable	HP		september	Baik	1	160/E/KPI/09/2017/PP/kompak	478/E/KPI-NAS/09/2017/KOMPAK	setnas	Kompak	hibah dari INDII
499	Perekam Suara	Sony		september	Baik	1	161/E/KPI/09/2017/PS/kompak	479/E/KPI-NAS/09/2017/KOMPAK	setnas	Kompak	hibah dari INDII
500	Perekam Suara	Sony		september	Baik	1	162/E/KPI/09/2017/PS/kompak	480/E/KPI-NAS/09/2017/KOMPAK	setnas	Kompak	hibah dari INDII
501	Perekam Suara	Sony		september	Baik	1	163/E/KPI/09/2017/PS/kompak	481/E/KPI-NAS/09/2017/KOMPAK	setnas	Kompak	hibah dari INDII

502	Perekam Suara	Sony	september	Baik	1	164/E/KPI/09/2017/PS/Kompak	482/E/KPI-NAS/09/2017/KOMPAK	setnas	Kompak	pemakaian baru
503	Perekam Suara	Sony	september	Baik	1	165/E/KPI/09/2017/PS/Kompak	483/E/KPI-NAS/09/2017/KOMPAK	setnas	Kompak	pemakaian baru
504	Perekam Suara	Sony	september	Baik	1	166/E/KPI/09/2017/PS/Kompak	484/E/KPI-NAS/09/2017/KOMPAK	setnas	Kompak	pemakaian baru
505	Perekam Suara	Sony	september	Baik	1	167/E/KPI/09/2017/PS/Kompak	485/E/KPI-NAS/09/2017/KOMPAK	setnas	Kompak	pemakaian baru
506	Hand Traktor Quick Kubota Q-1000		agustus	Baik	15	MCA-1/4/07082017	486/M/KPI-NAS/08/2017/MCAI	4	MCAI	sumba timur
507	Hand Traktor Quick Kubota Q-1000		agustus	Baik	16	MCA-1/4/07082017	487/M/KPI-NAS/08/2017/MCAI	4	MCAI	sumba tengah
508	Hand Traktor Quick Kubota Q-1000		agustus	Baik	17	MCA-1/4/07082017	488/M/KPI-NAS/08/2017/MCAI	4	MCAI	Sumba Barat
509	Hand Traktor Quick Kubota Q-1000		agustus	Baik	18	MCA-1/4/07082017	489/M/KPI-NAS/08/2017/MCAI	4	MCAI	Lombok Tengah
510	Hand Traktor Quick Kubota Q-1000		agustus	Baik	19	MCA-1/4/07082017	490/M/KPI-NAS/08/2017/MCAI	4	MCAI	Lombok Utara
511	Hand Traktor Quick Kubota Q-1000		agustus	Baik	20	MCA-1/4/07082017	491/M/KPI-NAS/08/2017/MCAI	4	MCAI	Lombok Timur
512	Benih kacang tanah		agustus	Baik	21	MCA-1/2/14082017	492/M/KPI-NAS/08/2017/MCAI	2	MCAI	Lombok Utara
513	Penghancur Kertas	Krisbrow	januari	baik			492a/E/KPI-NAS/08/2018	Keuangan		
514	Hand Traktor Quick Kubota Q-1000		januari	Baik	22	MCA-1/2/19012018	493/M/KPI-NAS/01/2018/MCAI	2	MCAI	sumba timur
515	Hand Traktor Quick Kubota Q-1000		januari	Baik	23	MCA-1/2/19012018	494/M/KPI-NAS/01/2018/MCAI	2	MCAI	sumba tengah
516	Hand Traktor Quick Kubota Q-1000		januari	Baik	24	MCA-1/2/19012018	495/M/KPI-NAS/01/2018/MCAI	2	MCAI	Sumba Barat
517	Mol Jagung FCC-23 dan Mesin GX		januari	Baik	25	MCA-1/2/19012018	496/M/KPI-NAS/01/2018/MCAI	2	MCAI	sumba timur
518	Mol Jagung FCC-23 dan Mesin GX		januari	Baik	26	MCA-1/2/19012018	497/M/KPI-NAS/01/2018/MCAI	2	MCAI	sumba tengah
519	Mol Jagung FCC-23 dan Mesin GX		januari	Baik	27	MCA-1/2/19012018	498/M/KPI-NAS/01/2018/MCAI	2	MCAI	Sumba Barat
520	Mol Jagung FCC-23 dan Mesin GX		januari	Baik	28	MCA-1/2/19012018	499/M/KPI-NAS/01/2018/MCAI	2	MCAI	Rumprod SBD
521	2 buah Hand Spray (alat semprot		januari	Baik	29	MCA-1/5/19012018	500/M/KPI-NAS/01/2018/MCAI	5	MCAI	sumba timur
522	2 buah Hand Spray (alat semprot		januari	Baik	30	MCA-1/5/19012018	501/M/KPI-NAS/01/2018/MCAI	5	MCAI	sumba tengah
523	2 buah Hand Spray (alat semprot		januari	Baik	31	MCA-1/5/19012018	502/M/KPI-NAS/01/2018/MCAI	5	MCAI	SBD
524	5 buah Linggis		januari	Baik	32	MCA-1/5/19012018	503/M/KPI-NAS/01/2018/MCAI	5	MCAI	sumba timur
525	5 buah Garpu Tanah		januari	Baik	33	MCA-1/5/19012018	504/M/KPI-NAS/01/2018/MCAI	5	MCAI	sumba timur
526	5 buah Linggis		januari	Baik	34	MCA-1/5/19012018	505/M/KPI-NAS/01/2018/MCAI	5	MCAI	sumba tengah
527	5 buah Garpu Tanah		januari	Baik	35	MCA-1/5/19012018	506/M/KPI-NAS/01/2018/MCAI	5	MCAI	sumba tengah
528	5 buah Linggis		januari	Baik	36	MCA-1/5/19012018	507/M/KPI-NAS/01/2018/MCAI	5	MCAI	SBD
529	5 buah Garpu Tanah		januari	Baik	37	MCA-1/5/19012018	508/M/KPI-NAS/01/2018/MCAI	5	MCAI	SBD
530	2 buah bak penampung pupuk cair		januari	Baik	38	MCA-1/5/19012018	509/M/KPI-NAS/01/2018/MCAI	5	MCAI	sumba timur
531	Gerinding 8 inchi, mesin Honda GP		januari	Baik	38A	MCA-1/2/27012018	510/M/KPI-NAS/01/2018/MCAI	2	MCAI	Lombok Utara
532	2 buah hand Spray Plastik (alat		januari	Baik	39	MCA-1/5/27012018	511/M/KPI-NAS/01/2018/MCAI	5	MCAI	Lombok Utara
533	30 buah sabit		januari	Baik	40	MCA-1/5/27012018	512/M/KPI-NAS/01/2018/MCAI	5	MCAI	Lombok Utara
534	21 buah cangkul		januari	Baik	41	MCA-1/5/27012018	513/M/KPI-NAS/01/2018/MCAI	5	MCAI	Lombok Utara
535	Mesin peneung kacang hijau		januari	Baik	42	MCA-1/2/27012018	514/M/KPI-NAS/01/2018/MCAI	2	MCAI	Lombok Timur
536	2 buah hand spayer plastik		januari	Baik	43	MCA-1/5/27012018	515/M/KPI-NAS/01/2018/MCAI	5	MCAI	Lombok Timur
537	10 buah cangkul		januari	Baik	44	MCA-1/5/30012018	516/M/KPI-NAS/01/2018/MCAI	5	MCAI	Lombok Timur
538	3 buah arco		januari	Baik	45	MCA-1/5/30012018	517/M/KPI-NAS/01/2018/MCAI	5	MCAI	Lombok Timur
539	2 buah terpal		januari	Baik	46	MCA-1/5/30012018	518/M/KPI-NAS/01/2018/MCAI	5	MCAI	Lombok Timur
540	Mesin perontok kedelai Honda GP		januari	Baik	47	MCA-1/2/27012018	519/M/KPI-NAS/01/2018/MCAI	2	MCAI	Lombok Tengah
541	2 buah hand spayer plastik		januari	Baik	48	MCA-1/5/27012018	520/M/KPI-NAS/01/2018/MCAI	5	MCAI	Lombok Tengah
542	4 buah terpal 8 x 5 meter		januari	Baik	49	MCA-1/5/28012018	521/M/KPI-NAS/01/2018/MCAI	5	MCAI	Lombok Tengah
543	5 buah cangkul		januari	Baik	50	MCA-1/5/28012018	522/M/KPI-NAS/01/2018/MCAI	5	MCAI	Lombok Tengah
544	3 buah arco		januari	Baik	51	MCA-1/5/27012018	523/M/KPI-NAS/01/2018/MCAI	5	MCAI	Lombok Tengah
545	20 buah sabit		januari	Baik	52	MCA-1/5/30012018	524/M/KPI-NAS/01/2018/MCAI	5	MCAI	Lombok Tengah
546	2 unit Kompor Hock		januari	Baik	53	MCA-1/5/19012018	525/M/KPI-NAS/01/2018/MCAI	5	MCAI	Rumprod SBD
547	Dandang no 50		januari	Baik	54	MCA-1/5/17012018	526/M/KPI-NAS/01/2018/MCAI	5	MCAI	Rumprod SBD
548	4 buah dulang aluminium		januari	Baik	55	MCA-1/5/18012018	527/M/KPI-NAS/01/2018/MCAI	5	MCAI	Rumprod SBD
549	Magricom		januari	Baik	56	MCA-1/4/16012018	528/M/KPI-NAS/01/2018/MCAI	4	MCAI	Rumprod SBD

550	Stand Mixer Black	1578000	januari	Baik	57/MCA-1/4/13012018	529/M/KPI-NAS/01/2018/MCAI	4	MCAI	Rumprod SBD
551	Wall Fun Ventilating W/pull CO	538.000	januari	Baik	58/MCA-1/4/13012018	530/M/KPI-NAS/01/2018/MCAI	4	MCAI	Rumprod SBD
552	Brankas	449.000	januari	Baik	58A/MCA-1/5/13012018	531/M/KPI-NAS/01/2018/MCAI	5	MCAI	Rumprod SBD
553	Blender dan rolling box Sharp SB T1172G	774.200	januari	Baik	59/MCA-1/4/13012018	532/M/KPI-NAS/01/2018/MCAI	4	MCAI	Rumprod SBD
554	Pemadam kebakaran	650.000	januari	Baik	60/MCA-1/5/30012018	533/M/KPI-NAS/01/2018/MCAI	5	MCAI	Rumprod SBD
555	1 unit Etalase	1.800.000	januari	Baik	61/MCA-1/3/29012018	534/M/KPI-NAS/01/2018/MCAI	3	MCAI	Rumprod SBD
556	1 Meja biro dan 1 set kursi anyam	1.500.000	januari	Baik	62/MCA-1/3/28012018	535/F/KPI-NAS/01/2018/MCAI	3	MCAI	Rumprod SBD
557	3 buah kursi anyam	360.000	januari	Baik	63/MCA-1/3/29012018	536/F/KPI-NAS/01/2018/MCAI	3	MCAI	Rumprod SBD
558	Rak penyimpanan ukuran 180 x 160	700.000	januari	Baik	64/MCA-1/3/28012018	537/F/KPI-NAS/01/2018/MCAI	3	MCAI	Rumprod SBD
559	Rak manajemen ukuran 100 x 150	800.000	januari	Baik	65/MCA-1/3/28012018	538/F/KPI-NAS/01/2018/MCAI	3	MCAI	Rumprod SBD
560	1 unit printer HP	2.400.000	januari	sedang	65A/MCA-1/4/16012018	539/E/KPI-NAS/01/2018/MCAI	4	MCAI	Rumprod SBD
561	1 unit laptop Asus	5.400.000	januari	Baik	66/MCA-1/4/16012018	540/E/KPI-NAS/01/2018/MCAI	4	MCAI	Rumprod SBD
562	1 meja biro	1.500.000	januari	Baik	67/MCA-1/3/29012018	541/F/KPI-NAS/01/2018/MCAI	3	MCAI	Rumprod SBD
563	1 Rak penyimpanan barang ukuran	1.000.000	januari	Baik	68/MCA-1/3/28012018	542/F/KPI-NAS/01/2018/MCAI	3	MCAI	Rumprod SBD
564	1 meja kayu 2 x 1	850.000	januari	Baik	69/MCA-1/3/27012018	543/F/KPI-NAS/01/2018/MCAI	3	MCAI	Rumprod SBD
565	1 meja kayu untuk penjemuran 2 x	600.000	januari	Baik	70/MCA-1/3/27012018	544/F/KPI-NAS/01/2018/MCAI	3	MCAI	Rumprod SBD
566	2 Kipas Angin Trisoni	380.000	januari	Baik	71/MCA-1/4/28012018	545/M/KPI-NAS/01/2018/MCAI	4	MCAI	Rumprod SBD
567	1 spon 120 x 2 x 20	850.000	januari	Baik	72/MCA-1/5/28012018	546/M/KPI-NAS/01/2018/MCAI	5	MCAI	Rumprod SBD
568	1 sealer press plastik 40 cm	450.000	januari	Baik	73/MCA-1/5/30012018	547/M/KPI-NAS/01/2018/MCAI	5	MCAI	Rumprod SBD
569	1 Mol giling daging	750.000	januari	Baik	74/MCA-1/5/30012018	548/M/KPI-NAS/01/2018/MCAI	5	MCAI	Rumprod SBD
570	1 lemari piring	500.000	januari	Baik	75/MCA-1/3/30012018	549/F/KPI-NAS/01/2018/MCAI	3	MCAI	Rumprod SBD
571	Kompor Rinnai RI-522 E	315.000	januari	Baik	76/MCA-1/5/30012018	550/M/KPI-NAS/01/2018/MCAI	5	MCAI	Rumprod SBD
572	Kompor 1 tungku	440.000	januari	Baik	77/MCA-1/5/22012018	551/M/KPI-NAS/01/2018/MCAI	5	MCAI	Rumprod SBD
573	Tabung gas 12 kg + isi	540.000	januari	Baik	78/MCA-1/5/27012018	552/M/KPI-NAS/01/2018/MCAI	5	MCAI	Rumprod SBD
574	Oven	425.000	januari	Baik	79/MCA-1/5/27012018	553/M/KPI-NAS/01/2018/MCAI	5	MCAI	Rumprod SBD
575	Blender Philips	510.000	januari	Baik	80/MCA-1/4/22012018	554/M/KPI-NAS/01/2018/MCAI	4	MCAI	Rumprod SBD
576	Mixer Philips	490.000	januari	Baik	81/MCA-1/4/22012018	555/M/KPI-NAS/01/2018/MCAI	4	MCAI	Rumprod SBD
577	Steel Safe BLK 25EUD	699.000	januari	Baik	82/MCA-1/5/22012018	556/M/KPI-NAS/01/2018/MCAI	5	MCAI	Rumprod SBD
578	Paper Shredder BLK 5302	538.000	januari	Baik	84/MCA-1/5/22012018	557/E/KPI-NAS/01/2018/MCAI	5	MCAI	Rumprod SBD
579	Lemari Es Sharp 53-196/FB	2.600.000	januari	Baik	85/MCA-1/4/31012018	558/M/KPI-NAS/01/2018/MCAI	4	MCAI	Rumprod SBD
580	Kasur-busa 140x18 + bantal	900.000	januari	Baik	86/MCA-1/5/31012018	559/M/KPI-NAS/01/2018/MCAI	5	MCAI	Rumprod SBD
581	Etalase	1.450.000	januari	Baik	87/MCA-1/3/26012018	560/M/KPI-NAS/01/2018/MCAI	3	MCAI	Rumprod SBD
582	Meja Kantor	1.600.000	januari	Baik	88/MCA-1/3/26012018	561/F/KPI-NAS/01/2018/MCAI	3	MCAI	Rumprod SBD
583	Meja Keramik	400.000	januari	Baik	89/MCA-1/3/28012018	562/F/KPI-NAS/01/2018/MCAI	3	MCAI	Rumprod SBD
584	ABC Power Extinguisher 3 KG	1.500.000	januari	Baik	90/MCA-1/5/28012018	563/M/KPI-NAS/01/2018/MCAI	5	MCAI	Rumprod SBD
585	Lemari Untuk Bahan Baku 120x2m	1.300.000	januari	Baik	91/MCA-1/3/28012018	564/F/KPI-NAS/01/2018/MCAI	3	MCAI	Rumprod SBD
586	Meja kerja/ pengepakan	500.000	januari	Baik	92/MCA-1/3/28012018	565/F/KPI-NAS/01/2018/MCAI	3	MCAI	Rumprod SBD
587	Kursi	900.000	januari	Baik	93/MCA-1/3/28012018	566/F/KPI-NAS/01/2018/MCAI	3	MCAI	Rumprod SBD
588	Lemari buku	700.000	januari	Baik	94/MCA-1/3/30012018	567/F/KPI-NAS/01/2018/MCAI	3	MCAI	Rumprod SBD
589	Rak piring	400.000	januari	Baik	94A/MCA-1/3/30012018	568/M/KPI-NAS/01/2018/MCAI	3	MCAI	Rumprod SBD
590	Modem	499.000	januari	Baik	95/MCA-1/5/30012018	569/M/KPI-NAS/01/2018/MCAI	5	MCAI	Rumprod SBD
591	Laptop Asus	5.400.000	januari	Baik	96/MCA-1/4/16012018	570/E/KPI-NAS/01/2018/MCAI	4	MCAI	Rumprod SBD
592	Printer HP	2.400.000	januari	Baik	97/MCA-1/4/16012018	571/E/KPI-NAS/01/2018/MCAI	4	MCAI	Rumprod SBD
593	Mesin Sealer Cup Eaton	750.000	januari	Baik	98/MCA-1/4/27012018	572/M/KPI-NAS/01/2018/MCAI	4	MCAI	Rumprod SBD
594	Hand Sealer 30CM Power	350.000	januari	Baik	99/MCA-1/5/27012018	573/M/KPI-NAS/01/2018/MCAI	5	MCAI	Rumprod SBD
595	Printer	712.000	januari	Baik	100/MCA-1/4/30012018	574/E/KPI-NAS/01/2018/MCAI	4	MCAI	Rumprod SBD
596	Paper Shredder Gemet 320C		Februari	Baik	575/E/KPI-NAS/02/2018/AIPEG	575/E/KPI-NAS/02/2018/AIPEG		AIPEG	
597	Switch Dlink 5 port gg 10/100/100		Februari	Baik	576/M/KPI-NAS/02/2018/AIPEG	576/M/KPI-NAS/02/2018/AIPEG		AIPEG	

KODE_ASSET:
E : Alat-alat elektronik
F : Alat-alat kantor
M : Alat-alat pendukung
(pendukung alat-alat
elektronik maupun alat-alat

JAKARTA 15 FEBRU 2020

Diketahui Oleh

Ariyanto Ariyanto
Pembuat laporan Pembuat Laporan

Syarif Hidayat

Dyah Bintarini
Koord. Kerumahtanggaan



KANTOR STAF PRESIDEN



The **WAHID** Institute
Seeding Plural and Peaceful Islam

WALHI



PKBI
PERKUMPULAN KELUARGA BERENCANA INDONESIA
JAWA TIMUR



Institut
KAPAL Perempuan
Lingkaran Pendidikan Alternatif Perempuan



MIGRANT CARE
Partisipan Indonesia untuk Buruh Migran Perempuan



Australian Government

MAMPU

Kemitraan Australia - Indonesia
untuk Kesetaraan Gender
dan Pemberdayaan Perempuan



The Asia Foundation



Canada

Creating Spaces is implemented with the financial support of the Government of Canada, provided through Global Affairs Canada.



OXFAM

